

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
6	1	Juli 2024	01-98	2785-7766

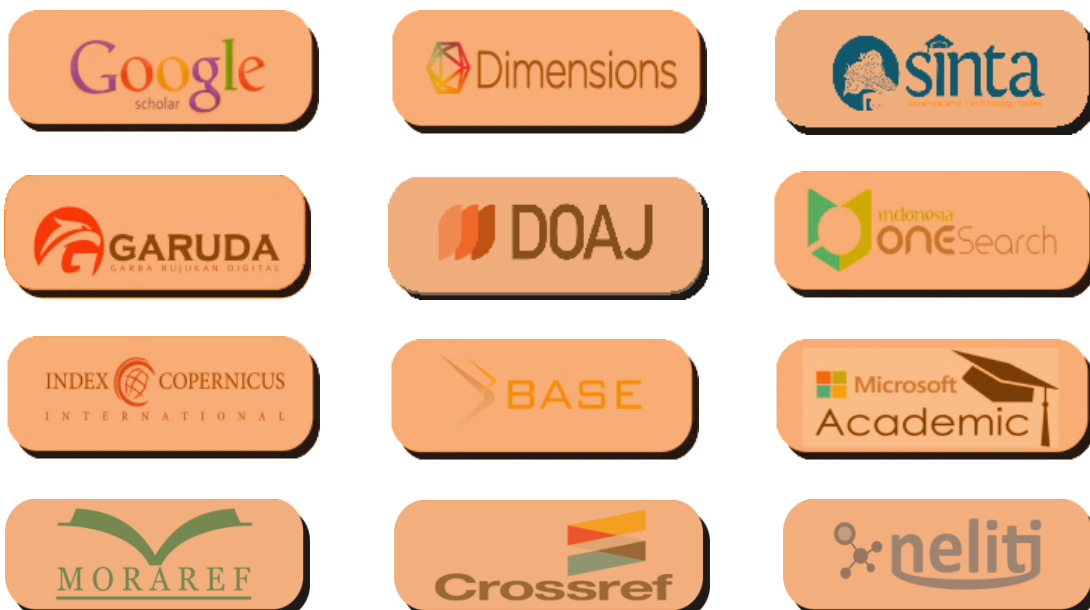
CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang politik yang orisinal dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tunggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 4.500-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Keamanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES TERINDEKS DI:



Volume 6 Nomor 1, Juli 2024

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Januari oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Tiara Elgi Fienda

Redaktur (*Managing Editor*):

Komang Jaka Ferdian

Dewan Editor (*Editorial Board*)

Dr. H. S. Tisnanta

Dr. Yusa Djuyandi

Dr. Oki Hajiansyah Wahab

Penyunting (*Section Editor*):

Bahjatul Murtasidin

Yeby Ma'asan Mayrudin

Restu Rahmawati

Sandy Pratama

La Ode Muhamad Muliawan

Restu Karlina Rahayu

Ranto

Nona Evita

Copy Editor & Lay Out Editor:

Robing

Mitra Bestari (*Reviewer*):

Prof. Ibrahim (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)

Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)

Leo Agustino, Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

Luthfi Makhasin, Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah)

Agung Wibowo, Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah)

Dr. Ratnia Solihah (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Jawa Barat)

Dr. Sulistya Ekwati (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)

Dr. Yusnarida Eka Nizmi (Hubungan Internasional, Universitas Riau, Riau)

Dr. Pahrudin HM (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)

Dr. Ardli Johan Kusuma (Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta)

Dr. Poni Suekaesih Kurniati (Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia)

Ika Riswanti Putranti, Ph.D. (Hubungan Internasional, Universitas Diponegoro)

I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Brawijaya)

Hadi Arnowo, M.Si. (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional)

Dodi Faedlulloh (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Alamat:

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia

Email: jpi@ubb.ac.id

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

e-ISSN: 2685-7766

DAFTAR ISI

Redefining Regional Development: The Case for an ASEAN Development Bank (Brice Tseen Fu Lee, Juan Pablo Sims) https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.160	01-19
Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II (Sri Rahmi Nilasari, Atika Puspita Marzaman, Riska Kurniasari) https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.156	20-31
The Concept of Multi-track Diplomacy in Indonesian Coast Guard to Strengthen the International Maritime Relationship (Sean Narahara, Lukman Yudho Prakoso, Rudi Sutanto) https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.178	32-37
Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan (Laras Ayu Andini, Dina Fadiyah, Sapto Setyo Nugroho) https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.203	38-45
Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban (Kintania Khoirun Nabila, Muhammad Miftahul Huda, Sri Kasiami) https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211	46-58
Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Diaspora in Mindanao (Firsta Falah Hayanda, Nur Azizah) https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.247	59-71
Strategi Partai Golkar Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Airin Rachmi Diany Pada Dapil Banten III (Glenn Kevin Immanuel, Yusa Djuyandi) https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.236	72-86
Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador (Gunawan Lestari Elake, Ferdiansyah Rivai, Retno Susilowati) https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.198	87-98

PENGANTAR REDAKSI

Salam Hangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan Journal of Political Issues. Volume 6 Nomor 1 Juli 2024 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik. Terbitan Juli, Volume 6 Nomor 1 kali ini memuat delapan artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik.

Artikel pertama ditulis oleh Brice Tseen Fu Lee, dan Juan Pablo Sims yang menelaah peran ASEAN Development Bank (ASDB) dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ASDB berkomitmen pada kesejahteraan, keberlanjutan, dan masa depan masyarakat ASEAN. Artikel kedua ditulis oleh Sri Rahmi Nilasari, Atika Puspita Marzaman, dan Riska Kurniasari yang melakukan eksplorasi dampak doktrin Poros Maritim Dunia terhadap perdagangan dan peredaran narkoba di sepanjang jalur ALKI II yang mengungkap adanya interaksi kompleks antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Artikel ketiga ditulis oleh Sean Narahara, Lukman Yudho Prakoso, dan Rudi Sutanto yang membahas tentang Peran Bakamla sebagai penjaga pantai Indonesia yang bertugas untuk menegakan hukum di wilayah maritim Indonesia dan bertanggung jawab terhadap keamanan bangsa dan negara dari sektor maritim.

Artikel keempat ditulis oleh Laras Ayu Andini, Dina Fadiyah, dan Sapto Setyo Nugroho yang menelaah aksi Kamisan sebagai strategi gerakan. Aksi ini merupakan gerakan yang mampu memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang masih terbengkalai. Artikel kelima ditulis oleh Kintania Khoirun Nabila, Muhammad Miftahul Huda, dan Sri Kasiami yang meneliti tentang penggunaan program bantuan keuangan untuk pendidikan politik, dan biaya operasional selama satu tahun pada tiga partai politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP). Penelitian ini fokus kepada pengukuran akuntabilitas penggunaan bantuan tersebut pada aktivitas partai politik. Firsta Falah Hayanda dan Nur Azizah juga menuliskan hasil penelitiannya mengenai upaya KJRI Davao dalam memberikan perlindungan kepada diaspora Indonesia di Mindanao yang mengalami permasalahan status kewarganegaraan, penyelundupan, dan permasalahan lainnya yang memerlukan pendampingan. Artikel berikutnya ditulis oleh Glenn Kevin Immanuel dan Yusa Djuyandi yang melakukan analisis strategi Partai Golkar dalam kemenangan partai dan Airin Rachmi Diany di Dapil Banten III dalam pemilu 2024 yang mampu meraup suara besar dan bahkan mendapatkan penambahan kursi. Artikel kedelapan membahas Gerakan Petani Transnasional di Ekuador, La Via Campesina (LVC) dalam memajukan kedaulatan pangan dengan membentuk empat organisasi anggota Fenocin, Fenacle, CNC, dan FEI untuk mendorong reformasi agraria di Ekuador. Studi ini menyimpulkan bahwa peran, kapasitas, dan pemanfaatan ruang publik adalah poin penting dalam kesuksesan gerakan LVC. Artikel ini ditulis oleh Gunawan Lestari Elake, Ferdiansyah Rivai, dan Retno Susilowati.

Akhirnya, Journal of Political Issues mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi Journal of Political Issues Volume 6 Nomor 1 Juli 2024 serta kepada mitra bestari (*Reviewer*) yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. Journal of Political Issues tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal di edisi

Journal of Political Issues Volume 6 Nomor 1 Juli 2024 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca



Check for updates

Redefining Regional Development: The Case for an ASEAN Development Bank

Brice Tseen Fu Lee^{1*}, Juan Pablo Sims²

¹ School of International Relations and Public Affairs, Fudan University, 200433, Shanghai-China

² Faculty of Government, Universidad Del Desarrollo, 7550000, Santiago- Chile

INFO ARTIKEL

Dikirim: Des 08, 2023

Diterima: Mar 06, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

ASEAN; Development Bank;
Foreign Direct Investment;
Governance; Regional
Integration.

KORESPONDEN:

Brice Tseen Fu Lee

School of International Relations
and Public Affairs, Fudan
University

Email:

briceleetseenfu@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Lee, B. T. F., & Sims, J. P. (2024).
Redefining Regional Development:
The Case for an ASEAN
Development Bank. *Journal of
Political Issues*. 6(1); 1-19.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.160>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.160>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Amidst ASEAN's vibrant economic expansion lies an urgent need for a specialized financial institution—an ASEAN Development Bank (ASDB)—to harness and guide this growth. The region's dynamic diversity in development stages presents a unique opportunity for the ASDB to act as the catalyst for economic resilience and regional integration. This urgency is underscored by the potential for the ASDB to provide targeted financial strategies, directly addressing the specific challenges faced by member states. A robust and equitable governance structure will be crucial for the ASDB to facilitate strategic decision-making and sustainable development. The establishment of the ASDB is not just timely but imperative to ensure that ASEAN's economic growth is balanced, inclusive, and sustainable, positioning the region as an integrated, resilient economic powerhouse on the global stage.

Abstrak Dalam ekspansi ekonomi ASEAN yang dinamis terdapat kebutuhan mendesak akan lembaga keuangan khusus—Bank Pembangunan ASEAN (ASDB)—untuk mengarahkan dan memandu pertumbuhan ini. Keragaman dinamis wilayah ini dalam tahapan pembangunan menyajikan peluang unik bagi ASDB untuk bertindak sebagai katalisator bagi ketahanan ekonomi dan integrasi regional. Urgensi ini ditekankan oleh potensi ASDB untuk menyediakan strategi keuangan yang ditargetkan, langsung mengatasi tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh negara-negara anggota. Struktur tata kelola yang kuat dan adil akan menjadi krusial bagi ASDB untuk memfasilitasi pengambilan keputusan strategis dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendirian ASDB bukan hanya tepat waktu tetapi juga imperatif untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ASEAN seimbang, inklusif, dan berkelanjutan, memposisikan wilayah ini sebagai kekuatan ekonomi yang terintegrasi dan tangguh di panggung global.

TENTANG PENULIS:

Brice Tseen Fu Lee, the author is a Senior Researcher for Universidad del Desarrollo, a Research Analyst for Oxford Global Society, and a PhD Candidate at Fudan University.

Juan Pablo Sim, the author, is a graduate of the Master's in International Relations program at the University of Melbourne, Australia. He is a Political Scientist with a focus on Public Policy from Universidad del Desarrollo. Currently, he is pursuing a PhD (c) in International Politics at Fudan University, China.

INTRODUCTION

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), established in 1967, has evolved from a modest regional grouping into a formidable intergovernmental organization, representing the confluence of diverse cultures, histories, and economies. Encompassing ten Southeast Asian nations, ASEAN has emerged as an economic powerhouse, boasting a combined GDP exceeding \$2.8 trillion, positioning itself as the fifth-largest economy globally ([Thangavelu & Narjoko, 2014](#)). This meteoric rise underscores the region's strategic importance in the global economic matrix, influencing trade, investment, and geopolitical dynamics.

Historically, development banks have played a pivotal role in orchestrating the socio-economic narratives of regions. These institutions, by channeling financial resources, disseminating technical know-how, and offering policy guidance, have been the linchpins supporting infrastructural growth, mitigating inequalities, and championing the cause of sustainable development. Within the ASEAN context, the indispensability of such banks is accentuated, given the region's ambitious vision for comprehensive economic integration juxtaposed against a backdrop of challenges, which span from pronounced infrastructure gaps to intricate socio-economic disparities as well as security issues ([Bibi & Lee, 2023](#); [Ventouri, 2018](#); [Yuan & Lee, 2023b](#)).

The Asian Development Bank (ADB), since its inception in 1966, has been a dominant actor in shaping the developmental contours of the broader Asian region. Its commendable endeavors in infrastructure augmentation, poverty alleviation, and fostering regional collaboration have left indelible marks. However, a critical introspection reveals certain lacunae in its operational paradigm. The consistent leadership of the ADB by Japanese presidents, combined with its overarching Asian focus, has engendered concerns regarding its capacity to genuinely comprehend and address the distinct needs and aspirations of the ASEAN member states ([Chatterjee, 2005](#)).

This observation accentuates the research gap in the existing literature: while the contributions of broader institutions like the ADB are well-documented, there is a paucity of comprehensive studies exploring the potential benefits, challenges, and implications of a dedicated ASEAN Development Bank. Such an institution, with its laser-focused mandate on the ASEAN region, promises a suite of tailored solutions that are harmoniously aligned with the region's socio-cultural nuances and economic priorities. Beyond the tangible economic dividends, an ASEAN-centric bank could be a crucible for fostering enhanced regional solidarity, ensuring that the collective voice of ASEAN resonates more emphatically in global financial and policy arenas ([Pham, 2015](#)).

In light of these considerations, this study delves deep into the discourse surrounding the establishment of an ASEAN Development Bank, weaving together historical contexts, current challenges, and future aspirations to present a holistic perspective on this pivotal proposition.

Research Gap

In the sphere of regional development banking, Southeast Asia presents a unique case for examination. The academic and policy discussions have long recognized the contributions of the Asian Development Bank (ADB), yet there is a distinct lack of focus on the ASEAN region's specific requirements. This oversight calls for a detailed investigation into the creation and potential impact of an ASEAN Development Bank (ASDB), a concept not thoroughly analyzed in existing scholarship.

This research identifies a critical need for a concentrated review of ASEAN's particular socio-cultural, economic, and geopolitical landscapes, which are markedly different from other Asian regions. An ASEAN-centric development bank could propose solutions more aligned with the unique fabric of the region, as opposed to the broader, sometimes less relevant strategies implemented by continental institutions.

Moreover, the call for ASEAN to forge a stronger, unified representation in the global financial arena and to bolster regional solidarity has yet to be fully explored in the context of such a specialized bank. While there are studies on regional development banks elsewhere, a nuanced comparative analysis drawing parallels for an ASEAN-focused entity is notably absent. Such an analysis could illuminate best practices and inform on the potential pitfalls and strategic pathways for the ASDB.

Finally, the future trajectory of the ASDB, including pilot projects, governance frameworks, and long-term effects, remains largely unexplored. A visionary examination of these elements would be instrumental in guiding policy decisions, offering stakeholders a clear vision of what the ASDB could become.

This research aims to fill these gaps, providing a comprehensive assessment of the ASDB's proposed inception, advantages, challenges, and its wider significance. By venturing into this relatively uncharted territory, the study endeavors to lay the groundwork for informed decision-making and to enrich the discourse surrounding the ASDB's establishment and its projected influence on ASEAN's development narrative.

METHODS

To comprehensively understand the potential impact and operational framework for the ASEAN Development Bank (ASDB), our methodology is centered on three fundamental research approaches: case studies, literature review, and policy analysis.

Case Studies: We conducted an in-depth examination of existing regional development banks (RDBs) to draw parallels and gain insights into the potential operational dynamics of the ASDB. These case studies provided real-world examples of successes and challenges faced by RDBs, offering a rich context for understanding the intricacies of regional banking. We explored how these banks have influenced economic development, navigated political complexities, security issues, social issues and addressed regional disparities (Demeure & Lee, 2023b; Yuan & Lee, 2023a).

Literature Review: A systematic review of scholarly articles, economic reports, and historical data was undertaken to build a theoretical foundation for the ASDB's establishment. This literature review spanned topics such as green finance innovation, infrastructure development, corporate recovery lending, and long-term financing for large-scale projects. Through this process, we assessed the theoretical underpinnings that support the role of RDBs in economic growth, sustainability, and development. We also considered studies that articulate the importance of localized banking practices in supporting SMEs and fostering economic stability.

Policy Analysis: We scrutinized existing economic policies and frameworks within the ASEAN region to identify gaps that the ASDB could fill. This analysis involved a critical evaluation of current ASEAN policies, development strategies, and financial mechanisms. By comparing these with global best practices and the operational models of successful RDBs, we outlined strategic recommendations for the ASDB. This approach ensured that the proposed policy structures for the ASDB are robust, equitable, and effective in addressing the specific needs of the ASEAN region.

In summary, by integrating the empirical evidence from case studies, the scholarly insights from literature reviews, and the strategic implications from policy analysis, we have formulated a comprehensive methodology that underpins the operational blueprint and strategic roadmap for the establishment of the ASDB. This multi-faceted approach ensures a well-rounded and deeply informed foundation for the ASDB's development, aiming to maximize its impact on the ASEAN region's growth and integration.

RESULT

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has been a pivotal player in the global economy, with its member states collectively forming a significant economic bloc. Historically, ASEAN has undertaken various initiatives to foster economic cooperation and integration within the region. For instance, the ASEAN Economic Community aims to promote free investment and capital flows, emphasizing the importance of regional financial cooperation to mitigate risks associated with financial integration (Aldaba & Yap, 2009; OUYANG et al., 2022). Moreover, ASEAN's efforts towards economic integration have been influenced by the adoption of certain EU-style institutions, reflecting a convergence of regional integration processes (Jetschke & Murray, 2012).

Existing financial institutions in ASEAN and their roles: Within the ASEAN framework, there have been calls to strengthen existing institutional structures by providing them with adequate mandates, financial resources, and human capital to support the association's growing activities (Rattanasevee, 2014). This is crucial for deepening financial integration in the region, emphasizing the development of financial markets, and ensuring greater macroeconomic and policy coordination (Rillo, 2018).

Comparison with other regional development banks: Regional development banks play a significant role in fostering economic growth and development within their respective regions. For instance, the African Development Bank (AfDB) and the Asian Development Bank (ADB) have been instrumental in promoting good governance in their policies, ensuring that they do not infringe on the national sovereignty of recipient countries (Bøås, 1998). These banks also focus on institutional and political interactions within the public realm to achieve their objectives. Moreover, regional development banks, in general, can contribute to setting up or strengthening specialized regional institutions required to address complex coordination, cost-allocation, financing, and conflict resolution challenges (Perry, 2013b).

Therefore, while ASEAN has made significant strides in economic cooperation and integration, there is a clear need for a dedicated development bank that caters specifically to the region's unique challenges and opportunities. Comparing ASEAN's financial institutions with other regional development banks provides insights into best practices and potential areas of improvement for the proposed ASEAN Development Bank.

DISCUSSION**The Need for a Focused Regional Understanding in the Context of an ASEAN Development Bank**

The vision for an ASEAN Development Bank (ADB) hinges on a deep appreciation of the region's distinct cultural, historical, and economic tapestry. Insight into this tapestry is not merely academic; it's foundational to the bank's guiding principles, strategic operational plans, and policy formulations. A tailored, region-specific approach guarantees that ADB's undertakings will align with, and fully support, the ambitions and exigencies of ASEAN member states, thereby enhancing receptivity and fostering united efforts.

This discourse explores the imperative of such profound regional cognizance. The cultural and historical underpinnings of the ASEAN bloc, comprised of ten diverse yet interconnected member states, fundamentally shape its socio-economic interactions and trajectories. Studies such as Ryoo (2009) examination of the regionalization of cultural flows, shed light on the tendency within ASEAN to engage more deeply with cultural outputs from nations sharing a relatable heritage, an engagement that often outweighs influences from larger global powers. This intra-regional cultural solidarity, coupled with a remarkable capacity to move beyond historical frictions in favor of common interests—as Katsumata (2003) observes—speaks volumes about the strength of these connections.

The economic narrative of ASEAN is one of deliberate and shared pursuit of integration. The establishment of the ASEAN Economic Community stands as a testament to the region's commitment to enabling free investment, trade, and the movement of capital. Aldaba & Yap (2009) articulate the importance of regional financial cooperation in this context, both as a safeguard against the risks of financial integration and as a means to fortify economic bonds between member nations. Notably, the economic motivations for ASEAN's enlargement have been informed by significant disparities in development levels among its members, highlighting the urgent need for a dedicated entity like the ADB to address these divergences (Amer, 1999).

The challenge and opportunity matrix of ASEAN demands bespoke institutional responses. An entity such as the ADB is envisioned to craft and implement solutions attuned to the collective challenges of the region. Rodriguez & Soeparwata (2012) point to the economic performance variances across the ASEAN countries, underscoring the necessity for nuanced strategies that respond to the individual needs and aspirations of each state.

In sum, a deep, nuanced grasp of the ASEAN region's distinctive landscape is critical for the ADB's inception and its operational triumph. Such comprehensive regional understanding is the cornerstone to ensuring the bank's initiatives are efficacious, resonating deeply with the values and aspirations of the ASEAN collective).

Limitations of Broader Institutions: Implications for the Formation of an ASEAN Development Bank (ASDB)

The Asian continent's diversity presents a substantial challenge to broad-spectrum institutions such as the Asian Development Bank (ADB). When one institution attempts to serve an array of nations, each with its own distinct socio-economic, political, and cultural realities, certain limitations become apparent. These constraints not only reflect the struggles of such expansive organizations but also underscore the need for region-specific entities like the proposed ASEAN Development Bank (ASDB).

The ADB, instrumental in guiding Asia's development, contends with the varying priorities of its member nations. Kim Thi Tran et al. (2021) discuss the delicate balance between institutional quality and economic growth, suggesting a quality-threshold beyond which growth effects may diminish, particularly in lower-income nations. This insight supports the notion that a regional bank could more adeptly navigate the diverse priorities within ASEAN, offering more impactful, bespoke interventions.

Asia's development is also characterized by a dichotomy in resource allocation. Nations at different developmental stages mobilize resources distinctively, with wealthier countries relying more on domestic resources (Jha, 1994). Rogers (2014) warns of the risks larger institutions face in perpetuating inequalities due to uneven resource distribution. An ASDB could potentially ensure a more balanced and deliberate allocation of resources, smoothing out these inequalities.

Furthermore, the extensive bureaucracies of large institutions can introduce significant delays. Wan (1995) exposes the complex ties between the ADB and entities like the Japanese Ministry of Finance, which can lead to bureaucratic inertia, a sentiment echoed by Uhlin (2011). A more focused and regionally dedicated ASDB could navigate around such bureaucratic hurdles, promising swifter and more responsive action.

In conclusion, while the ADB has shaped Asia's developmental path, its broad mandate can be restrictive. The challenges of representation, resource allocation, and operational efficiency present a strong case for the ASDB. This institution could provide more precise, region-specific support, ensuring ASEAN's development is not only accelerated but also equitable and resilient.

Strengthening Regional Autonomy through the Establishment of an ASEAN Development Bank (ASDB)

The concept of an ASEAN Development Bank (ASDB) heralds a new chapter for the ASEAN region, promising to bolster autonomy, enhance regional unity, and tackle the diverse developmental disparities among its members. This initiative is poised to be more than a financial institution; it represents a significant stride towards developmental sovereignty and geopolitical cohesion for the ASEAN member states.

Self-reliance is at the heart of this endeavor, encapsulating a vision where ASEAN can independently navigate its developmental journey, free from excessive external dependencies. The establishment of the ASDB could be a critical step in realizing this ambition, anchoring a financial institution within the ASEAN framework that aligns with the region's unique socio-cultural and economic needs. This move could spur sustainable growth paths tailored to the region and inspire economic advancement from within (Lee & Sims, 2023). Leu (2011) echoes the importance of such autonomy, particularly within trade ecosystems, where regional entities like ASEAN can exercise greater policy independence. This autonomy is vital for member states to define and chase their developmental goals, keeping regional interests insulated from outside influences.

Moreover, the ASDB could serve as a beacon of regional solidarity, extending beyond economic cooperation to become a symbol of geopolitical unity, shared values, and collective aspirations. Soesastro (1995) views intra-ASEAN cooperation as a stepping stone towards broader Asian regional collaboration, potentially initiating a ripple effect of cooperative dynamics. Amidst an evolving regional framework where the traditional "ASEAN Way" of dialogue and consensus is being reassessed, the ASDB could emerge as an innovative force, strengthening regional ties and demonstrating ASEAN's commitment to adaptability (Kim, 2007).

Finally, the ASDB is seen as a vital instrument to bridge the developmental gaps within ASEAN. Rather than simplistically dividing the region into 'older' and 'newer' members, Severino (2007) emphasizes the spectrum of development stages, encompassing various dimensions beyond the economic. The ASDB has the potential to be a pivotal force in harmonizing these stages, promoting equitable growth across the region. Sharma et al. (2021) highlight the uneven adoption of Health Technology Assessment (HTA) across ASEAN, illustrating the type of disparities that necessitate a focused developmental approach. The ASDB, by tailoring its initiatives to address specific needs such as healthcare, infrastructure, and strategic planning, can help ensure that every member state's challenges and goals are met, leading to a more thriving, cohesive, and resilient ASEAN.

The potential establishment of the ASEAN Development Bank (ASDB) marks a seminal moment in the ASEAN region's developmental narrative. This initiative is emblematic of a deeper, more profound ethos: the assertion of regional autonomy. Regional autonomy, in the context of ASEAN, encapsulates the collective capability of its member states to independently chart their developmental course, sculpting policies and strategies that deeply resonate with their unique socio-cultural, economic, and geopolitical fabric.

One of the most salient advantages of such autonomy is the crafting of developmental strategies tailored to the specific needs and aspirations of the ASEAN region. Unlike larger, more expansive institutions that cater to a vast and diverse array of nations, the ASDB, with its ASEAN-centric mandate, ensures that interventions are intricately aligned with the region's realities. This alignment not only augments the efficacy of these strategies but also ensures their sustainability, given that they are rooted in a profound understanding of the region's nuances.

Furthermore, this autonomy translates into enhanced responsiveness and agility in decision-making. The shared histories, values, and understanding among ASEAN member

states facilitate swift, adaptive decisions, crucial in a dynamic global landscape. This agility is complemented by a reinforced sense of regional solidarity. By prioritizing the region's collective interests, a deeper sense of unity and shared purpose is fostered, which is invaluable in navigating the complexities of geopolitics and international diplomacy.

Economic resilience is another byproduct of such autonomy. The ASDB, with its focus on ASEAN-specific investments and collaborations, can act as a bulwark against external economic shocks, ensuring stability in times of global economic uncertainties (Ali & Lee, 2022; Demeure & Lee, 2023a; Lee et al., 2023). Moreover, by championing regional autonomy, the ASDB ensures that local stakeholders, spanning governments, businesses, and civil society, are empowered. Their voices, aspirations, and concerns become central to the bank's agenda, leading to more inclusive and holistic growth.

In essence, the ASDB, with its potential "ASEAN for ASEAN" philosophy, is not merely a financial institution; it's a manifestation of the region's aspirations for self-determination. By focusing exclusively on ASEAN, without the distractions or dilutions of broader mandates, the bank can ensure that the region's developmental trajectory is both sustainable and resonant with its unique identity.

Rationale for an ASEAN Development Bank (ASDB)

The ASEAN Development Bank (ASDB) represents a strategic initiative, borne out of the need to address critical developmental imbalances and to harness the collective potential within the ASEAN region. It embodies a profound commitment to fostering equitable growth and regional integration.

Economic disparities within ASEAN are stark, with member states displaying varying degrees of development across a spectrum of socio-economic indicators. These disparities, stretching across sectors such as health, education, and infrastructure, must be addressed to achieve a harmonious regional development. The ASDB is envisioned as a catalyst in this regard, offering solutions that are custom-fitted to the requirements of each country within the region, thus ensuring a more equitable development path for all (Severino, 2007). The ASDB are also able to help solve social policies as well as economic policies benefiting countries that needs support (Khoo & Lee, 2024; Lee et al., 2024; Severino, 2007)

In addition, ASEAN's rapid urbanization and industrial growth spur an urgent demand for robust infrastructure. With the region's energy needs expected to triple by 2035, reflecting trends such as population growth and urban expansion, the need for sustainable infrastructure development is clear (Shi, 2015; Sims et al., 2023). The ASDB could play a crucial role in financing and guiding infrastructure initiatives, aligning them with the region's specific needs and aspirations.

The potential for regional cooperation, particularly in the energy and transportation sectors, is immense within ASEAN. Projects like an integrated power grid could revolutionize energy distribution across member states, enhancing the efficiency of renewable energy utilization (Huber et al., 2015). Championed by the ASDB, these regional undertakings could significantly strengthen intra-ASEAN connectivity, promoting a more cohesive and collaborative economic framework.

Lastly, the historical role of development banks in supporting large-scale infrastructure projects is well-documented, particularly their effectiveness in risk mitigation (Rezende, 2018). The ASDB, with a focus on sustainable development, has the opportunity to ensure that infrastructure investments are not only economically sound but also environmentally and socially responsible (Marodon, 2022). Through the ASDB, ASEAN can look forward to not just economic growth, but a growth that is inclusive, responsible, and sustainable.

In wrapping up the discussion on the rationale for the ASEAN Development Bank (ASDB), it becomes evident that the bank's establishment is not just a strategic move but a

necessary evolution for the ASEAN region. The economic landscape of ASEAN, marked by its pronounced disparities, necessitates a dedicated institution that can provide bespoke solutions tailored to the unique socio-economic fabric of each member state. The ASDB, with its concentrated focus, is poised to fill this gap, ensuring that no nation is left behind in the collective march towards progress.

Furthermore, the rapid urbanization and industrialization trends that have swept across the region in recent decades have brought to the fore the urgent need for robust and sustainable infrastructure development. The ASDB, with its potential access to resources and expertise, can serve as the linchpin in orchestrating and financing large-scale infrastructure projects. These projects, in turn, can act as catalysts, spurring economic growth, enhancing connectivity, and fostering regional integration.

The potential for collaborative regional projects, especially in pivotal sectors like energy and transportation, offers another compelling reason for the ASDB's establishment. Such projects not only bolster intra-ASEAN connectivity but also pave the way for a more integrated and collaborative economic environment. The ASDB can serve as the nexus for these collaborative ventures, ensuring that they are executed with a vision that aligns with the region's long-term developmental goals. Moreover, the bank's unwavering commitment to sustainable development is of paramount significance in today's global context. With environmental concerns taking center stage, the ASDB's focus on projects that are environmentally sustainable, economically viable, and socially inclusive ensures that the ASEAN region remains at the forefront of sustainable growth.

In essence, the establishment of the ASDB is not just about creating another financial institution; it's about crafting a beacon for the ASEAN region's aspirations. By focusing exclusively on the region, the ASDB is uniquely positioned to address its multifaceted challenges while simultaneously harnessing its vast opportunities. This dual capability ensures that the ASDB can play a transformative role in sculpting a future for the ASEAN region that is not only prosperous but also sustainable, inclusive, and reflective of its rich cultural and economic tapestry.

Challenges and Concerns

The establishment of the ASEAN Development Bank (ASDB) is a multifaceted endeavor, fraught with potential benefits as well as significant challenges that require careful consideration. Understanding these challenges is essential for stakeholders to navigate complexities and strategically address the risks involved.

Diversity in political ideologies and historical backgrounds among ASEAN members adds a layer of complexity to the establishment of a cohesive regional development bank. For instance, the South China Sea disputes highlight the kind of geopolitical tensions that may affect the bank's decision-making processes, reflecting the intricate web of historical and territorial contentions within the bloc ([Acharya, 2018](#); [Bibi & Lee, 2023](#)).

Furthermore, the success of the ASDB will greatly depend on its governance structure and the financial contributions from member states. Given the economic disparities across ASEAN, determining fair financial inputs from each member is a daunting task. The governance framework must balance fair representation with the need for operational efficacy to ensure the bank's agility and responsiveness to the region's needs and issues that includes social, development, security and etc. ([Anginer et al., 2014](#); [Lee & Bibi Ms, 2023](#)).

The ASDB must also navigate the complexities of its role in relation to existing institutions. With numerous financial entities already operating within the ASEAN framework and beyond, the potential for overlapping mandates is high. This overlap could lead to inefficiencies and dilute the impact of the ASDB, making the clarity of its unique role and responsibilities vital for its effective operation ([Bhaumik et al., 2018](#); [Bloch, 1968](#)).

Finally, the potential for debt accumulation poses a significant threat to the financial health of the ASDB and its member states. If the member states rely too heavily on the bank's resources, there is a risk of accruing unsustainable levels of debt, which could destabilize the bank's financial standing and, consequently, the economic health of the entire region. Rigorous financial controls and risk management strategies will be essential to safeguard the bank's stability (Kyle & Sachs, 1984).

It becomes evident that this initiative represents more than just a financial institution; it embodies the collective aspirations and future trajectory of the ASEAN region. The vision for the ASDB is both grandiose in its scope and profound in its potential implications, promising to usher in a new era of regional development, cooperation, and integration. However, like any ambitious endeavor, the journey towards the ASDB's fruition is replete with complexities and challenges. These challenges, ranging from political intricacies to economic disparities and overlapping institutional mandates, necessitate a deep, introspective analysis. Each challenge presents not just a potential roadblock but also an opportunity to refine the bank's foundational principles, ensuring that its operations and mandates are both resilient and adaptive.

The significance of these challenges cannot be understated. Yet, it's essential to recognize that they are not insuperable barriers but rather milestones that, when navigated with sagacity and collaboration, can strengthen the bank's foundational pillars. By adopting a proactive stance, engaging in rigorous analytical assessments, and fostering a spirit of regional collaboration, the ASDB can effectively address and mitigate these challenges. Furthermore, the bank's long-term success and sustainability will be contingent upon its ability to strike a delicate balance. On one hand, it must remain steadfast in its developmental objectives, driving economic growth, and fostering innovation. On the other, it must be attuned to the unique socio-cultural, political, and economic tapestry of the ASEAN region, ensuring that its initiatives resonate with the region's identity and are reflective of its diverse aspirations.

In essence, the ASDB represents a beacon of hope and a testament to the ASEAN region's ambition. While the road ahead is undeniably challenging, with careful planning, unwavering commitment, and a spirit of unity, the ASDB can stand as a monumental achievement, catalyzing growth and fortifying the ASEAN region's position on the global stage.

Potential Benefits of the ASEAN Development Bank (ASDB)

The proposal to establish the ASEAN Development Bank (ASDB) is an ambitious strategic move with the potential to bring about comprehensive benefits across economic, socio-cultural, and geopolitical spheres within the ASEAN region. Recognizing these benefits is crucial to understanding the far-reaching impact that the ASDB could have in transforming the region.

Regional integration and cooperation lie at the heart of the ASDB's mission. By facilitating closer ties among member states, the bank aims to enhance collaborative efforts that can lead to sustainable regional development. Such integration can have a cascading effect, potentially strengthening the region's position on the global stage (Yam et al., 1992; Yuan & Lee, 2023c). Institutions like the ASDB are uniquely positioned to promote sustainable development, tapping into the power of collective action and creating synergies among a variety of stakeholders (Sedlacek & Gaube, 2010).

Another significant advantage of the ASDB would be its ability to attract Foreign Direct Investment (FDI). FDI is a catalyst for transformation, offering more than just capital by also fostering technology transfer, enhancing managerial expertise, and creating jobs, which collectively contribute to robust economic growth (Alfaro et al., 2004).

The unique challenges of the ASEAN region require tailored solutions that generic policies cannot adequately address. The ASDB could focus on region-specific innovations, considering the cultural and economic nuances of ASEAN member states to formulate effective

strategies (Máté et al., 2020). This approach acknowledges the importance of cultural context in shaping innovation, emphasizing policy-making that is in harmony with local characteristics (Tödtling et al., 2011).

Lastly, the ASDB is expected to be a champion of sustainable and inclusive growth. While the ASEAN region has experienced significant economic advancement, it is vital to ensure that future growth is environmentally sustainable and socially inclusive. The ASDB could leverage regional frameworks to support growth strategies that balance economic development with social equity and environmental stewardship (Benneworth et al., 2002; Sun et al., 2018). This integrative approach is key to ensuring that the region's development benefits all its people and preserves its resources for future generations.

In a comprehensive assessment of the prospective advantages, the ASEAN Development Bank (ASDB) emerges not merely as a fiscal entity but as a pivotal strategic instrument with the potential to significantly reshape the developmental trajectory of the ASEAN region. Its establishment signifies more than just economic growth; it represents a commitment to enhanced regional integration, attracting pivotal foreign direct investments, crafting tailored solutions for region-specific challenges, and championing sustainable and inclusive growth.

The ASDB's emphasis on addressing the unique challenges intrinsic to the ASEAN region, combined with its capacity to leverage regional opportunities, positions it to drive a growth paradigm that is not only robust in its economic outcomes but also deeply aligned with the cultural, social, and geopolitical nuances of the ASEAN community. This growth, underpinned by principles of sustainability and inclusivity, promises to be transformative, ensuring that no member state is left behind.

However, the realization of these benefits is contingent upon the meticulous design and execution of the bank's operations and mandates. It is imperative that the ASDB's strategies and initiatives are intricately aligned with the region's aspirations and challenges. Only through such alignment can the bank truly fulfill its promise, ensuring that the ASEAN region benefits holistically from its establishment and operations.

Proposed Structure and Governance of the ASEAN Development Bank (ASDB)

In the quest to establish the ASEAN Development Bank (ASDB), the pivotal elements that underpin its prospective success are becoming increasingly evident. These elements—its capital structure, decision-making processes, and the fostering of collaborative relationships—serve as the core pillars that will dictate the bank's effectiveness, reach, and enduring presence. They are the crux of the ASDB's potential to make a significant contribution to the ASEAN region's development goals, underlining the strategic essentials that will propel the region's progress. The impact these pillars have in directing the ASDB's journey, and consequently the ASEAN region's future, is immense and indelible.

A robust capital structure is the bedrock of any regional development bank, setting the stage for its capacity to act, financial health, and project implementation potential. For the ASDB, member state contributions are a testament to the ASEAN community's collective investment in the bank's objectives, reflecting the diverse economic statuses and development goals of the member countries. A tiered contribution system could promote equity and commitment, ensuring contributions are in line with each nation's financial ability and the anticipated benefits derived from the bank's activities (Perry, 2013a). Furthermore, the capital framework must be adaptable, primed to adjust to the changing economic conditions within member states.

The decision-making processes adopted by the ASDB will be a determining factor in its success. In the dynamic context of ASEAN, decisions must be swift yet comprehensive.

Employing scenario planning can lead to more strategic and well-informed decision-making, allowing the bank to implement proactive policies (Chakraborty, 2010). Moreover, a structured decision-making approach, as outlined by Von Koppenfels (2001), can ensure systematic and consensual policies that reflect the collective aspirations of the ASEAN community, fostering transparency and inclusiveness.

Lastly, the ASDB's interactions with other ASEAN bodies and external entities will be crucial in shaping its sphere of influence. The "circle-and-spoke" cooperation model positions the ASDB as a central hub within the ASEAN development network, linked to a variety of regional and global organizations (Lissovlik & Vinokurov, 2019). Such a framework promotes cohesive collaboration and positions the ASDB as a leader in regional development efforts. By building strong partnerships with international development banks and organizations, the ASDB can access a wealth of knowledge, establish best practices, and secure additional resources, thereby maximizing its developmental impact and nurturing a culture of cooperative growth.

In drawing this section to a close, the foundational pillars of the ASEAN Development Bank (ASDB) – its capital structure, decision-making processes, and collaborative relationships – stand out as paramount. The bank's capital structure serves as more than just a fiscal blueprint; it embodies the collective commitment and trust of the ASEAN member states. This structure not only ensures the bank's financial robustness but also symbolizes the shared responsibility of each nation, emphasizing that every member has a vested interest in the bank's endeavors. Such a foundation is indispensable, laying the groundwork for the bank's credibility, sustainability, and capacity to finance transformative initiatives that can reshape the region's developmental trajectory.

Furthermore, the essence of the ASDB's effectiveness is encapsulated in its decision-making. Given the ASEAN region's multifaceted nature, decisions must be both inclusive and agile. A structured decision-making approach ensures that the bank remains adaptable, aligning its strategies with the region's ever-evolving realities, while also being proactive in anticipating future challenges and opportunities. This adaptability is crucial, ensuring that the bank remains a relevant and potent force in a constantly shifting regional landscape.

Beyond its internal mechanisms, the ASDB's external relationships will be pivotal. In the interconnected global landscape, the bank's ability to cultivate and nurture collaborative ties with both regional and global institutions will be a determinant of its influence and impact. Such relationships not only amplify the bank's reach, allowing it to tap into broader knowledge pools and resources, but also underscore its commitment to a collective vision of development. In this collaborative paradigm, growth and development are perceived not as the sole responsibility of a single entity but as a joint endeavor.

In essence, by emphasizing these three pillars, the ASDB is poised to transcend its role as a mere financial entity. It has the potential to emerge as a beacon of regional development, reflecting the aspirations and ethos of the ASEAN community. Yet, this vision's fruition hinges on strategic foresight, meticulous planning, and an unwavering dedication to the values and principles that the ASEAN community cherishes.

Case Studies: Gleaning Insights from Regional Development Banks

The blueprint for the ASEAN Development Bank (ASDB) can draw significantly from the experiences of regional development banks (RDBs) around the globe. An examination of their trajectories—what worked, what didn't, and how they adapted—provides a wealth of insights that the ASDB can leverage to enhance its efficacy within the ASEAN region.

Regional banks, with their concentrated geographic focus, bring distinct advantages, especially when it comes to addressing the needs of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). These entities are often hailed as the economic linchpins of local economies, pivotal

for innovation and job creation. Meslier et al. (2020) have shown that regional banks are adept at alleviating short-term credit constraints for SMEs, underpinning the importance of a banking system that can understand and respond to the nuanced needs of these smaller enterprises. By adopting a similar approach, the ASDB can ensure that the varied and specific challenges of ASEAN SMEs are met, nurturing a dynamic and robust business environment.

The promotion of local economic growth is another arena where regional banks have a proven track record. Hakenes et al. (2014) discuss the effectiveness of small regional banks in fostering growth, particularly in areas that might struggle with issues such as access to credit or lower financial endowments. Such banks are crucial in ensuring that development is not a blanket strategy but one that is intricately woven into the socio-economic tapestry of the region, promoting sustainable and equitable progress.

In terms of crisis management, regional banks have historically played a stabilizing role. Their intrinsic understanding of local conditions enables them to act swiftly and supportively in times of economic distress. The support offered by German Hausbanks during crises, as examined by Flögel & Gärtner (2020), is a testament to the stabilizing influence these banks can exert, reinforcing economic stability and trust within their operational regions.

Moreover, the complexities of development finance demand cooperative strategies. As proposed by Lissovolik & Vinokurov (2019), a "circle-and-spoke" model could be instrumental for the ASDB, fostering collaboration with regional entities and financing systems to adopt a comprehensive approach to development, tapping into collective expertise and resources.

Finally, one of the fundamental challenges for RDBs is managing regional disparities. The research by Onder & Ozyildirim (2010) on state-owned banks elucidates the uneven impact these institutions can have across different provinces, often benefiting more developed areas while neglecting less affluent ones. This highlights the critical need for the ASDB to implement a balanced and inclusive strategy, ensuring that development is not just widespread but also reaches the less developed areas within the ASEAN community, thereby fostering a more unified and equitable growth.

The experiences of regional development banks worldwide offer a treasure trove of insights for the ASDB. By understanding the strategies that have worked, the challenges encountered, and the unique advantages of regional banks, the ASDB can craft a roadmap that is both visionary and grounded in practical realities. The onus lies in harnessing these lessons, ensuring that the ASDB emerges as a beacon of hope, growth, and collaboration for the ASEAN region.

Potential Pilot Projects for the ASEAN Development Bank (ASDB): A Deep Dive into Strategic Initiatives

The inception of the ASEAN Development Bank (ASDB) heralds a pivotal opportunity to pioneer transformative projects that can significantly alter the developmental course of the ASEAN region. Taking cues from the successes of other regional development banks and global best practices, the ASDB is well-placed to initiate several pilot projects that promise considerable potential.

The emergence of green finance as a global imperative presents a strategic avenue for the ASDB to lead the region's sustainable development. Inspired by the effectiveness of dedicated zones highlighted by Wang et al. (2021), the ASDB could create centers of green innovation that intertwine technological advancement with industrial transformation. These zones could become the nucleus for substantial investments in environmental protection, potentially initiating a sustainable development movement across ASEAN. Such initiatives would not only mitigate environmental challenges but could also establish ASEAN as a vanguard of green finance and innovation.

Infrastructure is a crucial pillar of economic growth, enabling trade and development. As Perry (2013b) notes, regional development banks are instrumental in promoting infrastructure,

and the ASDB has the potential to be a significant player in this field. By funding and nurturing institutions that focus on infrastructure, the ASDB can confront a range of associated challenges, ensuring that infrastructural advancements align with ASEAN's specific requirements and growth targets.

Economic resilience, especially for businesses in times of downturns, is vital for regional stability. Local banks play a crucial role in corporate recovery lending, as Koetter et al. (2020) elucidate. The ASDB could emulate this by setting up specialized lending services to support businesses during economic shocks. This would offer a financial lifeline to enterprises, particularly SMEs, helping to sustain employment and economic dynamism through challenging periods.

Lastly, the financing of large-scale, long-term infrastructure projects, especially those with a sustainable focus, is a task well-suited for a development bank. As Arezki & Sy (2016) discuss, development banks are key in funding the earlier, riskier phases of such projects. The ASDB, with its concentrated regional focus and financial resources, can provide the necessary long-term investment to ensure that these ambitious projects not only commence but also achieve their intended outcomes, fostering comprehensive development across the ASEAN landscape.

The potential pilot projects for the ASDB offer a glimpse into the transformative impact the bank can have on the ASEAN region. By prioritizing green finance, infrastructure development, corporate recovery lending, and long-term financing for large projects, the ASDB can chart a course that is both visionary and grounded in the region's realities. These projects, drawing from global best practices and the experiences of other regional banks, set the stage for a new era of growth, collaboration, and sustainable development in the ASEAN region.

CONCLUSION

The vision of launching an ASEAN Development Bank (ADB) is laden with significant potential, promising to reshape the economic and developmental landscape of the ASEAN region. Insights gleaned from similar regional development initiatives paint a picture of the ADB's expansive impact.

The fabric of regional development is intrinsically linked to local-specific factors, where the regional context deeply influences developmental outcomes. Studies, such as those by Xu et al. (2016), emphasize that the strategic geographic positioning and long-term policy framing are essential in steering regional prosperity. In this light, the ADB's establishment is an opportunity to craft strategies that are uniquely attuned to the ASEAN milieu, promoting tailored growth and advancement.

Economic progression, while a primary goal, bears the risk of overextension. ADB's challenge lies in orchestrating economic objectives that avoid placing undue strain on both the regional economy and its constituent firms. As per the analysis by Chen et al. (2021), the bank's structure must therefore be geared towards fostering sustainable and inclusive growth. This approach ensures that development is not only robust but also equitably distributed, benefiting a wide spectrum of society.

The disparities in development across the ASEAN region are complex, often transcending simple economic differences to encompass broader socio-economic dimensions. Here, the ADB can play an instrumental role, acting as a balancing force that endeavors to uplift all member states, reflecting on Bakucs et al. (2018) findings. By channeling resources and attention to areas most in need, the ADB can help to mitigate these disparities, fostering a more unified and equitable regional growth.

Strengthening regional cooperation is a natural byproduct of such an institution's work. An ADB can enhance this collective spirit, drawing member states together in pursuit of

common developmental goals. This collaborative ethos, as Sedlacek & Gaube (2010) have noted, is essential for the region's cohesion and collective advancement.

As ASEAN leaders contemplate this initiative, the path forward involves a series of strategic actions. Deliberations on the ADB's structure, governance, and mandate must be exhaustive, engaging all stakeholders in a dialogue that defines the bank's objectives and operational ethos. Lessons from existing regional development banks are a treasure trove of wisdom, providing a historical lens through which to view potential pitfalls and successes, guiding the ADB's formation.

Inclusivity remains a cornerstone of the ADB's foundational principles, ensuring that all member states are represented and have a stake in the bank's operations. This inclusivity is not just a moral imperative but a strategic one, critical to the bank's success and acceptance across the region.

Lastly, a clear, actionable roadmap outlining the steps for the ADB's establishment and function is vital. Such a framework brings transparency, inspires confidence, and aligns stakeholders towards a shared vision, ensuring that the ASEAN Development Bank emerges as a beacon of regional unity and economic progress.

Therefore, in conclusion, the discourse surrounding the establishment of the ASEAN Development Bank (ASDB) is emblematic of the broader aspirations of the ASEAN region to chart a self-determined, sustainable, and inclusive developmental trajectory. As the global economic landscape becomes increasingly interconnected and complex, regional blocs like ASEAN face both unparalleled opportunities and multifaceted challenges. The ASDB emerges as a strategic response to this dynamic, offering a platform that is uniquely attuned to the region's nuances, challenges, and potential. Several compelling rationales underscore the importance of the ASDB. Firstly, the bank can serve as a beacon of regional autonomy, allowing ASEAN to sculpt policies and strategies that deeply resonate with its socio-cultural, economic, and geopolitical fabric. Such autonomy is not just about self-determination; it's about crafting a developmental narrative that is both sustainable and reflective of the ASEAN ethos. The bank's potential to address economic disparities, cater to the infrastructure and development needs of the region, and harness the potential of regional projects further solidifies its significance.

However, like any ambitious endeavor, the road to the ASDB's realization is fraught with challenges. Political differences, financial considerations, potential overlaps with existing institutions, and concerns over debt accumulation are just a few of the myriad issues that need meticulous navigation. Yet, these challenges, while significant, are not insurmountable. Drawing lessons from other regional development banks and understanding the intricacies of governance, capital structure, and collaborative relationships can provide valuable insights into addressing these concerns. The potential pilot projects for the ASDB, ranging from green finance innovation to infrastructure development, offer a glimpse into the transformative role the bank can play. These projects, rooted in research and global best practices, can serve as catalysts, driving growth, fostering collaboration, and positioning ASEAN as a global leader in sustainable development.

In summary, the ASDB is not just a financial institution; it represents the collective aspirations of the ASEAN community. Its establishment and subsequent operations will be a testament to the region's vision, resilience, and commitment to a future that is prosperous, inclusive, and sustainable. The onus now lies in ensuring that this vision is translated into actionable strategies, ensuring that the promise of the ASDB is not just realized but exceeded, for the benefit of the present and future generations of the ASEAN community.

BIBLIOGRAPHY

Acharya, A. (2018). *The End of American World Order*. Polity Press. Polity Press.

- Aldaba, R. M., & Yap, J. T. (2009). Investment and Capital Flows: Implications of the ASEAN Economic Community. *Research Papers in Economics*.
- Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2004). FDI and economic growth: the role of local financial markets. *Journal of International Economics*, 64(1), 89–112. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(03\)00081-3](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(03)00081-3)
- Ali, S., & Lee, T. F. B. (2022). Deterrence Measure: A Cause for Promoting Regional Instability in South Asia. *Chinese Journal of International Review*, 04(02). <https://doi.org/10.1142/S2630531322500081>
- Amer, R. (1999). Conflict management and constructive engagement in ASEAN's expansion. *Third World Quarterly*, 20(5), 1031–1048. <https://doi.org/10.1080/01436599913479>
- Anginer, D., de la Torre, A., & Ize, A. (2014). Risk-bearing by the state: When is it good public policy? *Journal of Financial Stability*, 10, 76–86. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2013.03.006>
- Arezki, R., & Sy, A. (2016). Financing Africa's Infrastructure Deficit: From Development Banking to Long-term Investing. *Journal of African Economies*, 25(suppl 2), ii59–ii73. <https://doi.org/10.1093/jae/ejw017>
- Bakucs, Z., Fertő, I., Varga, Á., & Benedek, Z. (2018). Impact of European Union development subsidies on Hungarian regions. *European Planning Studies*, 26(6), 1121–1136. <https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1437394>
- Benneworth, P., Conroy, L., & Roberts, P. (2002). Strategic Connectivity, Sustainable Development and the New English Regional Governance. *Journal of Environmental Planning and Management*, 45(2), 199–217. <https://doi.org/10.1080/09640560220116305>
- Bhaumik, S. K., Owolabi, O., & Pal, S. (2018). Private information, institutional distance, and the failure of cross-border acquisitions: Evidence from the banking sector in Central and Eastern Europe. *Journal of World Business*, 53(4), 504–513. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.02.005>
- Bibi, G., & Lee, B. T. F. (2023). Ramifications of India's Naval Build-Up in Nuclear Realms. *Margalla Papers*, 27(2). <https://doi.org/10.54690/margallapapers.27.2.171>
- Bloch, H. S. (1968). Regional Development Financing. *International Organization*, 22(1), 182–203. <https://doi.org/10.1017/S0020818300013515>
- Bøås, M. (1998). Governance as Multilateral Development Bank Policy: The Cases of the African Development Bank and the Asian Development Bank. *The European Journal of Development Research*, 10(2), 117–134. <https://doi.org/10.1080/09578819808426720>
- Chakraborty, A. (2010). Scenario Planning for Effective Regional Governance: Promises and Limitations. *State and Local Government Review*, 42(2), 156–167. <https://doi.org/10.1177/0160323X10377344>

- Chatterjee, S. (2005). Poverty Reduction Strategies—Lessons from the Asian and Pacific Region on Inclusive Development. *Asian Development Review*, 22(01), 12–44. <https://doi.org/10.1142/S0116110505000023>
- Chen, J., Chen, X., Hou, Q., & Hu, M. (2021). Haste doesn't bring success: Top-down amplification of economic growth targets and enterprise overcapacity. *Journal of Corporate Finance*, 70, 102059. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.102059>
- Demeure, N., & Lee, B. T. F. (2023a). Effect of the zero-covid policy on Chinese FDI inflows and government's response: Has the Pandemic led to distinctive paradigm change in China's hypergrowth approach to development? *Journal of Strategic and Global Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v6i2.1124>
- Demeure, N., & Lee, B. T. F. (2023b). France in The Middle East: A Democratic Justification for Military Interventions in Iraq and Beyond. *Journal of Middle East and Islamic Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i2.167>
- Flögel, F., & Gärtner, S. (2020). The COVID-19 Pandemic and Relationship Banking in Germany: Will Regional Banks Cushion an Economic Decline or is A Banking Crisis Looming? *Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie*, 111(3), 416–433. <https://doi.org/10.1111/tesg.12440>
- Hakenes, H., Hasan, I., Molyneux, P., & Xie, R. (2014). Small Banks and Local Economic Development. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2390696>
- Huber, M., Roger, A., & Hamacher, T. (2015). Optimizing long-term investments for a sustainable development of the ASEAN power system. *Energy*, 88, 180–193. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.065>
- Jetschke, A., & Murray, P. (2012). Diffusing Regional Integration: The EU and Southeast Asia. *West European Politics*, 35(1), 174–191. <https://doi.org/10.1080/01402382.2012.631320>
- Jha, S. C. (1994). Resource mobilization in developing Asia: Changing patterns and emerging issues. *Journal of Contemporary Asia*, 24(4), 459–482. <https://doi.org/10.1080/00472339480000271>
- Katsumata, H. (2003). Reconstruction of Diplomatic Norms in Southeast Asia: The Case for Strict Adherence to the “ASEAN Way.” *Contemporary Southeast Asia*, 25(1), CS25-1f. <https://doi.org/10.1355/CS25-1F>
- Khoo, S. P., & Lee, B. T. F. (2024). Role of Fat Talk on The Relationships in The Bruneian Chinese Society. *International Review of Humanities Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.7454/irhs.v9i1.1287>
- Kim, H. J. (2007). Asean Way and Its Implications and Challenges for Regional Integration in Southeast Asia. *Jati- Journal of Southeast Asian Studies*, 12. <https://jati.um.edu.my/index.php/jati/article/view/5779>
- Kim Thi Tran, O., Dinh Le, H., & Hong Viet Nguyen, A. (2021). Role of institutional quality in economic development: A case study of Asian countries. *Problems and Perspectives in Management*, 19(2), 357–369. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(2\).2021.29](https://doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.29)

- Koetter, M., Noth, F., & Rehbein, O. (2020). Borrowers under water! Rare disasters, regional banks, and recovery lending. *Journal of Financial Intermediation*, 43, 100811. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.01.003>
- Kyle, S., & Sachs, J. (1984). *Developing Country Debt and the Market Value of Large Commercial Banks*. <https://doi.org/10.3386/w1470>
- Lee, B. T. F., Asihaer, A., & Sims, J. P. (2024). The Role of Mayors in Achieving Brunei Darussalam's Wawasan 2035, Lessons from China. *Journal of Global and Strategic Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.7454/jsgs.v7i1.1141>
- Lee, B. T. F., Asihaer, A., Sims, J. P., & Ali, S. (2023). The Interplay of Public Health, Politics, and Economics in COVID-19 Border Control Strategies: A Comparative Study of Brunei Darussalam, UK, China, Germany, and Australia. *Unnes Political Science Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/upsj.v7i2.75374>
- Lee, B. T. F., & Bibi Ms, G. (2023). Power Projection and Counter-Terrorism: Strategies for Small States Like Brunei Darussalam. *Journal of Terrorism Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.7454/jts.v5i2.1064>
- Lee, B. T. F., & Sims, J. P. (2023). Maslow's Hierarchy of Needs: A Framework for Understanding China's SOEs, SMEs and Decentralisation. *China Report*, 59(4), 402–421. <https://doi.org/10.1177/00094455231187692>
- Leu, G. (2011). ASEAN's Preferential Trade Agreements (PTA) Strategy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30(2), 31–64. <https://doi.org/10.1177/186810341103000203>
- Lissovolik, Y., & Vinokurov, E. (2019). Extending BRICS to BRICS+: the potential for development finance, connectivity and financial stability. *Area Development and Policy*, 4(2), 117–133. <https://doi.org/10.1080/23792949.2018.1535246>
- Marodon, R. (2022). Can Development Banks Step Up to the Challenge of Sustainable Development? *Review of Political Economy*, 34(2), 268–285. <https://doi.org/10.1080/09538259.2021.1977542>
- Máté, D., Rabbi, M. F., Novotny, A., & Kovács, S. (2020). Grand Challenges in Central Europe: The Relationship of Food Security, Climate Change, and Energy Use. *Energies*, 13(20), 5422. <https://doi.org/10.3390/en13205422>
- Meslier, C., Sauviat, A., & Yuan, D. (2020). Comparative advantages of regional versus national banks in alleviating SME's financial constraints. *International Review of Financial Analysis*, 71, 101471. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101471>
- Onder, Z., & Ozyildirim, S. (2010). Banks, regional development disparity and growth: evidence from Turkey. *Cambridge Journal of Economics*, 34(6), 975–1000. <https://doi.org/10.1093/cje/bep077>
- OUYANG, H., LI, C., LIU, G., ZHANG, M., & LEE, B. T. F. (2022). Development Zones and Firm Innovation: Evidence from Shanghai. *Chinese Journal of Urban and Environmental Studies*, 10(04). <https://doi.org/10.1142/S2345748122500282>

- Perry, G. E. (2013a). Beyond lending: How multilateral banks can help developing countries manage volatility. *Center For Global Development*. .
- Perry, G. E. (2013b). Regional Public Goods in Finance, Trade and Infrastructure. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2353978>
- Pham, Q. M. (2015). ASEAN's Indispensable Role in Regional Construction. *Asia-Pacific Review*, 22(2), 82–101. <https://doi.org/10.1080/13439006.2015.1117183>
- Rattanaseevee, P. (2014). Towards institutionalised regionalism: the role of institutions and prospects for institutionalisation in ASEAN. *SpringerPlus*, 3(1), 556. <https://doi.org/10.1186/2193-1801-3-556>
- Rezende, F. C. de. (2018). *Financial Sustainability and Infrastructure Finance* (Vol. 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198827948.003.0012>
- Rillo, A. (2018). ASEAN Financial Integration: Opportunities, Risks, And Challenges. *Public Policy Review*, 14(5). https://ideas.repec.org/a/mof/journal/ppr14_05_04.html
- Rodriguez, V., & Soeparwata, A. (2012). ASEAN benchmarking in terms of science, technology, and innovation from 1999 to 2009. *Scientometrics*, 92(3), 549–573. <https://doi.org/10.1007/s11192-011-0603-7>
- Rogers, S. (2014). Betting on the strong: Local government resource allocation in China's poverty counties. *Journal of Rural Studies*, 36, 197–206. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2014.08.001>
- Ryoo, W. (2009). Globalization, or the logic of cultural hybridization: the case of the Korean wave. *Asian Journal of Communication*, 19(2), 137–151. <https://doi.org/10.1080/01292980902826427>
- Sedlacek, S., & Gaube, V. (2010). Regions on their way to sustainability: the role of institutions in fostering sustainable development at the regional level. *Environment, Development and Sustainability*, 12(1), 117–134. <https://doi.org/10.1007/s10668-008-9184-x>
- Severino, R. C. (2007). The ASEAN Developmental Divide and the Initiative for ASEAN Integration. *Asean Economic Bulletin*, 24(1), AE24-1C. <https://doi.org/10.1355/AE24-1C>
- Sharma, M., Teerawattananon, Y., Dabak, S. V., Isaranuwatthai, W., Pearce, F., Pilasant, S., Sabirin, J., Mayxay, M., Guerrero, M., Phuong, N. K., Sastroasmoro, S., & Htoo, T. S. (2021). A landscape analysis of health technology assessment capacity in the Association of South-East Asian Nations region. *Health Research Policy and Systems*, 19(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s12961-020-00647-0>
- Shi, X. (2015). Energy Efficiencies in ASEAN Region. In *Handbook of Clean Energy Systems* (pp. 1–19). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118991978.hces056>
- Sims, J. P., Lee, Y.-T., & Lee, B. T. F. (2023). New Chinese Economic Policy to Latin America? A QCA Approach to the Belt and Road Initiative. *Chinese Political Science Review*. <https://doi.org/10.1007/s41111-023-00244-w>

- Soesastro, H. (1995). ASEAN and APEC: Do concentric circles work? *The Pacific Review*, 8(3), 475–493. <https://doi.org/10.1080/09512749508719151>
- Sun, C., Liu, L., & Tang, Y. (2018). Measuring the Inclusive Growth of China's Coastal Regions. *Sustainability*, 10(8), 2863. <https://doi.org/10.3390/su10082863>
- Thangavelu, S. M., & Narjoko, D. (2014). Human capital, FTAs and foreign direct investment flows into ASEAN. *Journal of Asian Economics*, 35, 65–76. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2014.11.002>
- Tödtling, F., Prud'homme van Reine, P., & Dörhöfer, S. (2011). Open Innovation and Regional Culture—Findings from Different Industrial and Regional Settings. *European Planning Studies*, 19(11), 1885–1907. <https://doi.org/10.1080/09654313.2011.618688>
- Uhlin, A. (2011). National democratization theory and global governance: civil society and the liberalization of the Asian Development Bank. *Democratization*, 18(3), 847–871. <https://doi.org/10.1080/13510347.2011.563121>
- Ventouri, A. (2018). Bank competition and regional integration: Evidence from ASEAN nations. *Review of Development Finance*, 8(2), 127–140. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2018.08.002>
- Von Koppenfels, A. K. (2001). Informal but Effective: Regional Consultative Processes as a Tool in Managing Migration. *International Migration*, 39(6), 61–84. <https://doi.org/10.1111/1468-2435.00179>
- Wan, M. (1995). Japan and the Asian Development Bank. *Pacific Affairs*, 68(4). <https://doi.org/10.2307/2761274>
- Wang, Y., Zhao, N., Lei, X., & Long, R. (2021). Green Finance Innovation and Regional Green Development. *Sustainability*, 13(15), 8230. <https://doi.org/10.3390/su13158230>
- Xu, X., Xu, X., Chen, Q., & Che, Y. (2016). The research on generalized regional “resource curse” in China's new normal stage. *Resources Policy*, 49, 12–19. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.04.002>
- Yam, T. K., Heng, T. M., & Low, L. (1992). ASEAN and Pacific Economic Co-operation. *ASEAN Economic Bulletin*, 309–332.
- Yuan, C., & Lee, B. T. F. (2023a). ASEAN in the Conflict Management of the Rohingya Crisis. *Journal of Autonomy and Security Studies*, 7, 39–60. <https://jass.journal.fi/article/view/142892>
- Yuan, C., & Lee, B. T. F. (2023b). EXPLORING CHINA'S RESPONSE TO THE ROHINGYA CRISIS: A LIBERAL PERSPECTIVE. *Journal of Terrorism Studies*, 5(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v5i1.1056>
- Yuan, C., & Lee, B. T. F. (2023c). FROM RIVALS TO PARTNERS: THE EVOLUTION OF ENVIRONMENTAL COOPERATION AMONG CHINA, JAPAN, AND KOREA. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 25(1). <https://doi.org/10.7454/global.v25i1.1267>



Check for updates

Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II

Sri Rahmi Nilasari^{1*}, Atika Puspita Marzaman¹, Riska Kurniasari²

¹Department of International Relations Science, Universitas Hasanuddin, 90245, Makassar-Indonesia

²Government Department, Universitas Hasanuddin, 90245, Makassar- Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Des 04, 2023

Diterima: Mei 07, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Maritime Axis Doctrine;
Maritime Security; Narcotics
trafficking.

KORESPONDEN:

Sri Rahmi Nilasari

Department of International
Relations Science, Hasanuddin
University.

Email:

rahmiemi62@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Nilasari, S. R., Marzaman, A. P., &
Kurniasai, R. (2024). Doktrin Poros
Maritim Dunia dan Keamanan di
Bidang Maritim Studi Kasus:
Perdagangan Narkotika di Jalur
ALKI II. *Journal of Political Issues*.
6 (1); 20-31.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.156>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.156>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Indonesia, aspiring to become a strong, independent, progressive maritime country that contributes positively to regional and global security and peace while upholding national interests, faces significant challenges. This vision, known as the World Maritime Axis, is tested by the realities of the ALKI II route, a critical waterway in central Indonesia. This route, while vital for trade, is also a conduit for drug trafficking. This research explores the impact of the World Maritime Axis doctrine on drug trade and distribution along the ALKI II route. The findings reveal that despite the implementation of the doctrine, narcotics trafficking remains high. The complexities of illicit drug networks, the vastness of the marine environment, and intricate socio-economic factors necessitate a multi-faceted approach combining robust law enforcement, strong international cooperation, comprehensive conservation strategies, and sustainable development initiatives. These are crucial to safeguard marine life and ecosystems in the ALKI II region and beyond, and to realize the vision of the World Maritime Axis.

Abstrak Indonesia, yang bercita-cita menjadi negara maritim yang kuat, mandiri, progresif, dan memberikan kontribusi positif terhadap keamanan dan perdamaian regional dan global dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan nasional, menghadapi tantangan yang signifikan. Visi yang dikenal dengan Poros Maritim Dunia ini diuji dengan realitas jalur ALKI II, jalur perairan penting di Indonesia bagian tengah. Jalur ini, meskipun penting untuk perdagangan, juga merupakan jalur perdagangan narkoba. Penelitian ini mengeksplorasi dampak doktrin Poros Maritim Dunia terhadap perdagangan dan peredaran narkoba di sepanjang jalur ALKI II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin tersebut telah diterapkan, namun peredaran narkotika masih tetap tinggi. Kompleksitas jaringan obat-obatan terlarang, luasnya lingkungan laut, dan faktor sosio-ekonomi yang rumit memerlukan pendekatan multi-sisi yang menggabungkan penegakan hukum yang kuat, kerja sama internasional yang kuat, strategi konservasi yang komprehensif, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kehidupan laut dan ekosistem di kawasan ALKI II dan sekitarnya, serta untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

TENTANG PENULIS:

Sri Rahmi Nilasari, saat ini penulis sedang menempuh studi S-1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin Makassar.

Atika Puspita Marzaman, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2013, saat ini sedang menjadi tenaga pengajar di Universitas Hasanuddin.

Riska Kurniasari, Penulis menyelesaikan studi S-1 di Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin pada tahun 2022, saat ini penulis sedang menempuh studi S-2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Hasanuddin Makassar.

PENDAHULUAN

Fitur geografis unik yang menjadikan Indonesia salah satu negara kepulauan terpadat di dunia. Indonesia adalah salah satu negara terpadat di dunia, dengan populasi lebih dari 17.000 jiwa dan hutan yang sangat lebat. Sektor maritim merupakan komponen penting dari identitas dan perekonomian Indonesia. Negara maritim yang dimiliki Indonesia, menuntut Indonesia untuk memiliki jati diri yang kuat sebagai negara maritim dengan menguraikan strategi menjaga keselamatan maritim dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Letak persilangan antara dua benua dan dua samudera, atau lebih dikenal, menjadikan Indonesia memiliki potensi aktivitas maritim dan seismik. Letak Indonesia yang hampir seluruh wilayah Indonesia berbatasan dengan laut, memberikan kontribusi besar terhadap potensi perekonomian negara dan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai hasil dari terobosan geografi strategis Indonesia, terdapat manfaat yang signifikan bagi masyarakat adat dalam aspek biologi, ekonomi, dan budaya. Karena letak geografisnya yang unik, Indonesia kini dianggap sebagai salah satu mitra dagang internasional terkemuka yang akan memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi negara. Menurut filsafat agama, keberadaan budaya keagamaan akan memberi manfaat bagi Indonesia dan menimbulkan keanekaragaman agama yang ada. Selain itu, dari segi biologi, Indonesia mempunyai keanekaragaman tumbuhan dan hewan.

Konvensi Hukum Laut Montego-Boy Jamaica tahun 1982 dilaksanakan di Indonesia oleh 117 negara yang telah memenuhi kewajiban terkait, dan diresmikan dalam UU No. 17 Tahun 1985. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada dunia internasional adalah produksi latex lintasx. Salah satu tujuannya adalah menutup alur laut kepulauan, yang berarti perdagangan luar negeri dan masuknya modal dapat terus berlanjut tanpa menimbulkan kerusakan. Alur Laut Kepulauan Indonesia merupakan pedoman yang digunakan sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi serangan kekuatan asing di wilayah Indonesia (Hutagalung, 2017).

Karena letak geografisnya yang unik, Indonesia juga mendapat manfaat dari tingkat subsisten lingkungannya. Mineral, minyak bumi, gas, perikanan, dan sumber daya air permukaan lainnya terbatas di wilayah Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai produktif terbesar kedua di dunia, terbentang sepanjang 81.000 km, dengan luas garis pantai sekitar 5,8 juta km². (Anugrahdwi 2023) Mengingat mayoritas wilayah daratan Indonesia adalah wilayah perjalanan laut dan udara, negara ini mempunyai potensi ekonomi kelautan yang cukup besar. Potensi perekonomian maritim Indonesia meliputi pemanfaatan industri maritim, perdagangan, wisata bahari, dan sumber daya laut.

Menurut PDB Maritim Indonesia 2010–2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Departemen Statistika (Dinas Komunikasi Publik, 2020), kontribusi sektor maritim Indonesia terhadap perekonomian negara masih tergolong kecil, hanya berkisar 6% saja. dari produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2018. Namun, terdapat kemungkinan besar bahwa industri kelautan akan tumbuh dan menjadi pendorong utama pertumbuhan perekonomian Indonesia di masa depan. Kota-kota yang terletak di wilayah pesisir dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi maritim dalam beberapa cara, seperti upah yang lebih tinggi, persaingan pasar tenaga kerja yang lebih terlokalisasi, dan standar hidup yang lebih tinggi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Sea Lines of Communication (SLOC) merupakan jalur maritim yang menghubungkan negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik dengan Samudera Indonesia. Mereka sangat penting bagi perdagangan global. Sekitar 40% perdagangan internasional dilakukan melalui laut, dan Indonesia menyumbang 40% transit ini (Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2018). Permukaan laut yang mulus—yang juga paling terjangkau—antara Asia Tenggara dan Tenggara Tengah dicapai melalui Selat Malaka. Menurut studi tahun 2020 yang dilakukan oleh Institut Penelitian Ekonomi ASB, jika konflik atau blokade terjadi di Laut Cina Selatan, sanksi

internasional akan dikenakan, yang akan mengakibatkan penurunan perdagangan dengan Singapura sebesar 22% dan penurunan perdagangan dengan Singapura sebesar 10-15%. pengurangan perdagangan dengan Singapura. penurunan perdagangan secara global dengan Malaysia, Vietnam, Hong Kong, dan Filipina. Oleh karena itu kebebasan melintas sangatlah penting bagi ASEAN ([Lemhannas RI, 2023](#)).

Menjaga stabilisasi dan perdagangan yang efisien di kawasan ini berkontribusi terhadap keamanan maritim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 40% perdagangan global dilakukan melalui Indonesia dan hingga 90% perdagangan dilakukan melalui lautan ([Lemhannas RI, 2023](#)). Selat Malaka adalah gelombang lentur yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Tenggara, membantu meminimalkan waktu dan biaya pelayaran. Blokade di Laut Cina Selatan atau konflik literasi yang menghambat perdagangan internasional dapat mengakibatkan hilangnya 10%–15% perdagangan secara global di banyak negara ([Lemhannas RI, 2022](#)).

Indonesia berbatasan laut dengan sejumlah negara tetangganya, antara lain Timor Leste, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Selain itu, Malaysia berbatasan darat dengan Indonesia. Terdapat perjanjian batas maritim antara Indonesia dan sekitar sepuluh negara tetangga. Perselisihan tersebut diselesaikan secara diplomatis. Laut Pasifik dan Laut Cina Selatan berbatasan dengan bagian utara, Samudera Hindia berbatasan dengan bagian selatan, Samudera Pasifik berbatasan dengan bagian timur, dan Samudera Hindia berbatasan dengan bagian barat merupakan beberapa perbatasan laut tersebut.

Menurut Kominfo ([2016](#)), Indonesia terus menjadi negara maritim yang kuat, mandiri, dan progresif yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan keamanan regional dan global dengan tetap menjaga kepentingan nasional yang tinggi. Pulau ini dikenal dengan nama Bumi Laut Poros. Kebijakan Kelautan Dunia menyarankan agar tidak menggunakan diplomasi maritim untuk memperkuat hubungan antara negara-negara anggota di tingkat bilateral dan multilateral guna mengatasi masalah keamanan maritim dan perburuan bersama. Penguatan hubungan internasional melalui domain maritim dikenal dengan istilah diplomasi maritim. Menghidupkan kembali sektor ekonomi maritim, meningkatkan dan mengembangkan konektivitas maritim, memperbaiki kerusakan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kelautan merupakan beberapa inisiatif utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai kelautan.

Presiden Jokowi telah menyoroti posisi kritis Indonesia sebagai negara maritim terkemuka di dunia sejak didirikan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa peristiwa, antara lain KTT Asia Timur pada tahun 2015 dan HUT Parade Maritim Nasional ke-57 tahun 2021 ([Panrb, 2021](#)). Sebagai hasil dari mengusung jati diri Indonesia sebagai negara maritim, menjunjung tinggi keselamatan dan kepentingan maritim, memanfaatkan potensi maritim untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan memperluas pengaruh maritim di berbagai domain seperti infrastruktur, politik, kesejahteraan sosial, hukum, keselamatan maritim, dan ekonomi, konsep maritim global bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, kuat, dan mandiri ([Najeri et al., 2018](#)).

Doktrin Poros Maritim Dunia didukung poset Indonesia di kancah global, terkait isu maritim dan lingkungan hidup. Konsep poros maritim dunia berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan sejahtera dengan mengembalikan diri Indonesia sebagai negara maritim, membela kepentingan dan keamanan maritim, serta memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia ([Jannah, 2020](#)). Pemerintah menetapkan lima tujuan besar, yang pertama adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim utama. Di sisi lain, terdapat komitmen untuk mengkaji dan mengembangkan sumber daya kelautan dengan tujuan penyelesaian pangan laut dengan menciptakan sektor

perikanan dan menjadikan nelayan sebagai sumber daya utama. Ketiga, perlunya mendukung pembangunan infrastruktur dan ekologi kelautan, serta pengembangan industri maritim, jalan raya laut, sektor logistik dan konstruksi, serta bahari wisata. Kedua, diplomasi maritim bertujuan untuk mendorong kolaborasi industri maritim di seluruh Indonesia. Pertama, memperkuat upaya terkait kecelakaan laut (Pratama & Nailufar, 2020). Mencapai ambang batas maritim NKRI, menghidupkan kembali perekonomian maritim, meningkatkan dan memperkuat ekosistem laut, menjaga lingkungan pesisir dan melestarikan keanekaragaman hayati laut, serta meningkatkan standar dan kuantitas sumber daya manusia kelautan merupakan tujuan utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. permukaan planet bumi (Kominfo, 2016).

Mengakomodasi Indonesia bercita-cita sebagai pemimpin dunia dalam konservasi laut, pelestarian lingkungan, dan perlindungan biota laut. Hal ini terkait dengan pidato Presiden Jokowi mengenai Indonesia sebagai kekuatan maritim global. Penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup dan konservasi keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia laut, tata kelola dan kelembagaan kelautan, perekonomian dan infrastruktur laut, penegakan pengawasan wilayah maritim NKRI, revitalisasi sektor ekonomi laut, dan seterusnya hanya beberapa kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut (Hardiana & Trixie, 2014). Buku putih Kebijakan Maritim Indonesia (KKL) yang mengedepankan diplomasi maritim dan juga telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 2017 (Ambari, 2019). Selain itu, Indonesia berupaya memperkuat pertahanan maritim sebagai bagian dari kewajibannya menegakkan keselamatan maritim dan perdamaian maritim.

Ayat 1 Pasal 53 menjelaskan bahwa lalu laut dan lalu lintas udara dapat ditentukan oleh suatu negara kepulauan yang cepat secara terus-menerus untuk melintasi atau melalui perairan dan wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tersebut. Hal ini menjadi kendala besar bagi negara-negara kepulauan dalam membangun jalurnya. "Selain kepulauan alur, negara kepulauan mempunyai kemampuan untuk menandai skema sinkronisasi, lintas untuk kebutuhan keselamatan, dan lintas kapal melalui alur yang ramping di kepulauan alur." Disebutkan dalam ayat 1 pasal 53 bahwa berbagai jenis perahu dan kapal pelaut diperbolehkan menggunakan Kepulauan Alur Laut. Satu-satunya jalur laut kepulauan yang dapat dilaksanakan adalah hal ini, dan harus dilakukan secepat dan hati-hati. Selain itu, sistem pertahanan udara teritorial yang diserang termasuk yang berada di jalur laut kepulauan, yang harus disesuaikan agar pendaratan dapat dilakukan dengan tenang dan tidak terhalang (Hutagalung, 2017).

Kriteria berikut harus dipertimbangkan ketika mengidentifikasi alur laut semenanjung: Pertama, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1982 dan perjanjian hukum internasional lainnya. Kategori kedua mencakup bidang teknologi bawah air seperti fotografi bawah air, fotografi bawah air, hidrografi, perlindungan batas laut, fotografi bawah air, fotografi bawah air, fotografi bawah air, fotografi bawah air, dan fotografi bawah air. Yang ketiga adalah kepulauan-sifat jalur laut. Sejauh mana keempat jalur laut kepulauan sudah diberlakukan oleh Indonesia? Secara khusus, ALKI I mencakup alur sungai Natuna, Jawa, Karimata, Sunda, dan Cina Selatan yang menghubungkan perdagangan internasional dan selanjutnya Sungai Lintas dari Afrika dan Australia Barat ke Jepang dan Sungai Cina Selatan, dan seterusnya. Selat Makassar, Selat Lombok, Laut Sulawesi, dan Laut Lombok adalah bagian dari ALKI II. Kualitas udara ini memfasilitasi perdagangan internasional dan, terlebih lagi, perjalanan udara antara Afrika, Asia Tenggara, dan Jepang serta Australia, Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Samudera Pasifik, Selat Ombai, Laut Sawu, Laut Banda (Pulau Buru, wilayah barat), Selat Maluku dan Seram (Pulau Magole, wilayah timur), dan Selat Ombai terhubung dengan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan wilayah barat

Australia dengan Australia. Sebaliknya, baik Filipina maupun Jepang sama sekali tidak ada di ALKI III A. Melalui Selat Torres dan alur di sekitarnya, yaitu melalui Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Banda, dan Laut Maluku, ALKI III B menangkap peluang maritim internasional. perdagangan yang menguasai wilayah timur Australia, Selandia Baru, dan Kepulauan Pasifik. Alki III C untuk perjalanan menuju Samudera Hindia dari Samudera Pasifik melalui Perairan Sawu, Selat Ombai, Banda, Seram, dan Maluku. Mengenai pemetaan sungai Sawu, Selat Ombai, Banda, Seram, dan Maluku di India, lihat ALKI Cabang III E ([Hutagalung, 2017](#)).

Mengingat ambisi Indonesia untuk membentuk kekuatan pertahanan maritim yang kuat, studi ini menekankan pada pilar kelima doktrin poros maritim global. Indonesia, sebagai negara maritim penting yang terlibat dalam perdagangan global, harus menjamin keamanan maritim untuk memitigasi ancaman yang berasal dari dalam negeri dan internasional ([Andriani, 2018](#)). Bidang maritim mempunyai banyak risiko yang dapat membahayakan keamanan maritim Indonesia, dan perdagangan narkoba melalui laut menjadi perhatian utama. Penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dampak pencemaran laut global terhadap kehidupan laut, dengan menggunakan studi kasus perdagangan narkoba di wilayah ALKI II. Penelitian ini juga akan mengevaluasi strategi konservasi laut yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi ancaman perdagangan narkoba dan dampak lingkungannya di wilayah ALKI II.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menjaga lingkungan dan keamanan maritim Indonesia. Sebagai negara maritim, kesejahteraan lingkungan hidup Indonesia secara intrinsik berkaitan dengan keamanan nasional dan stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, memahami hubungan antara pencemaran laut dan kegiatan terlarang seperti perdagangan narkoba sangat penting untuk merancang strategi konservasi dan keamanan laut yang efektif.

METODE PENELITIAN

Teknik deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan penekanan pada pengumpulan data wawancara dan numerik. Menurut Bogdan dan Taylor dalam ([Abdussamad, 2021](#)), Metode yang dikenal sebagai "penelitian kualitatif" menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan serta observasi. Salah satu dari sekian banyak fenomena yang menjadi fokus metode deskriptif kualitatif adalah unsur tunggal. Meskipun demikian, penyelidikan menyeluruh mungkin dilakukan.

Penelitian ini terutama akan mengandalkan sumber data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan (Sugiyono, 2017). Maka untuk menyelidiki dampak pencemaran laut global terhadap kehidupan laut, dengan fokus pada perdagangan narkoba di wilayah ALKI II. Data spesifik yang akan digunakan akan mencakup Laporan Keamanan Maritim yang memberikan wawasan mengenai pola dan tren perdagangan narkoba melalui jalur laut di wilayah ALKI II dan implikasinya terhadap keamanan maritim Indonesia. Kemudian juga digunakan beberapa hasil studi dampak lingkungan untuk memberikan informasi mengenai dampak pencemaran laut terhadap lingkungan, termasuk dampaknya terhadap ekosistem laut, keanekaragaman hayati, dan kualitas air di wilayah ALKI II.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis triangulasi seperti yang dikemukakan oleh Miles & Huberman ([2018](#)) untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas analisis data. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode, atau perspektif untuk menguatkan temuan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena penelitian. Dalam penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber data sekunder, seperti laporan keamanan maritim, studi dampak lingkungan, dan strategi konservasi laut. Data yang terkumpul akan dianalisis melalui analisis deskriptif, komparatif, dan korelasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara pencemaran

laut dan peredaran narkoba di wilayah ALKI II. Dengan menggunakan analisis triangulasi, penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi temuan dan memastikan pemahaman yang kuat dan beragam mengenai implikasi lingkungan dan keamanan dari perdagangan narkoba dan pencemaran laut di wilayah maritim Indonesia.

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis. Untuk menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menghasilkan hasil penelitian, data yang terkumpul kemudian dibersihkan secara menyeluruh dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu keunggulan geografis Indonesia yang paling signifikan terletak pada kedekatannya dengan dua pulau besar yang menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia. Sekitar 80% dari bergantung jalur digunakan dalam transportasi laut, dan jalur ini menunjukkan dua titik kemacetan yang berbeda, dan dua di antaranya berlokasi di wilayah Indonesia. Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan global, khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kualitas udara (Rahmadani et al., 2019).

Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan laut bagian timur dan barat merupakan nama lain dari kawasan perdagangan global ini (Hutagalung, 2017). Pertumbuhan perekonomian penduduk Indonesia difasilitasi oleh hambatan perdagangan ALKI; Namun, hal ini juga memaparkan masyarakat pada risiko terkait potensi ancaman yang mungkin timbul dari dalam atau luar negeri, seperti penipuan, pembajakan, senjata, dan masuknya narkoba ke Indonesia (Supartono dkk., 2020).

Bisnis global dan kepentingan lainnya memang dapat menimbulkan konflik besar dalam konteks ini. Bichler, et. al. (2017) sebelumnya telah memperingatkan akan terjadinya konvergensi krisis karena pasar obat-obatan terlarang terus berkembang. Laporan ini menyoroti bagaimana kesenjangan sosial dan ekonomi mendorong – dan didorong oleh tantangan narkoba, kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh perdagangan obat-obatan terlarang dan meningkatnya dominasi obat-obatan sintetis. Permintaan untuk mengobati gangguan terkait narkoba sebagian besar masih belum terpenuhi, dan laporan tersebut berpendapat bahwa kesehatan masyarakat, pencegahan, dan akses terhadap layanan pengobatan harus diprioritaskan di seluruh dunia. Bichler et. al. (2017) lebih lanjut menggarisbawahi perlunya respons penegakan hukum untuk mengimbangi model bisnis kriminal yang tangkas dan penyebaran obat-obatan sintetis murah yang mudah dipasarkan. Tren ini terus meningkatkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat Indonesia dan masyarakat global pada umumnya.

Peredaran Narkotika di Wilayah ALKI II

Jalur laut di Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan penggunaan narkoba. Garis pantai yang luas dan banyak pulau di negara ini menjadikannya pusat utama perdagangan narkoba (Latschan, 2015). Jalur laut tradisional, yang dulunya digunakan untuk mengangkut narkoba seperti opium, telah diubah menjadi jalur pengiriman narkoba jenis baru seperti tablet kristal metamfetamin (Salleh, 2023). Meningkatnya lokasi produksi di Segitiga Emas dan Bulan Sabit Emas telah mendorong pergeseran ini. Pandemi COVID-19 semakin mengubah lanskap perdagangan narkoba, dimana jaringan sindikat semakin bergantung pada perdagangan maritim. Jalur Maritim Barat, yang menghubungkan garis pantai selatan dan barat Myanmar di sepanjang Laut Andaman dan Selat Malaka ke pasar-pasar lain di kawasan ini, telah menjadi pusat perdagangan ini.

Ada tiga ALKI utama di Indonesia, dengan ALKI II yang paling sentral, berpusat di sekitar Selat Makassar. Selat Makassar menghadirkan risiko penyelundupan narkoba yang signifikan karena berfungsi sebagai “saluran” perairan Indonesia. Karena kelembapan luar

yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba, maka narkoba digunakan sebagai sarana kesehatan luar. Selain itu, jumlah narkoba yang beredar juga meningkat secara signifikan. Penduduknya terkena dampak perdagangan narkoba hampir di setiap tingkatan. Penggunaan narkoba tidak terbatas pada masyarakat umum; hal ini juga berdampak pada sistem peradilan dan sipil pemerintah. Salah satu pertimbangan penting adalah meningkatkan penggunaan narkoba di kalangan siswa kelas satu dan dua (Rachmawati, 2016).

Statistik menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat secara signifikan. Terdapat 4,2 juta pengguna pada bulan Juni 2015 dan 5,9 juta pengguna pada bulan Oktober 2015. Hal ini menunjukkan bahwa hanya terjadi peningkatan 1,7 juta pengguna narkoba dalam waktu 4 minggu saja. Provinsi Sulawesi Selatan, dengan 128 ribu pengguna narkoba, merupakan provinsi kesembilan terpadat di Indonesia, dengan 5,9 juta pengguna narkoba. Jumlah kasus semakin meningkat pada tahun 2016, mencapai 133.503 (1,95%), dimana 15% diantaranya menggunakan suntikan dan 40% merupakan pengguna narkoba berat. Dengan jumlah pengguna narkoba sebanyak 138.937 jiwa (2,27% dari total penduduk), Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat ketujuh pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan pelayaran, 70% peredaran narkoba di Sulsel melalui jalur laut, 20% melalui jalur bandara, dan 10% melalui jalur laut. paket jasa pengiriman (Rachmawati, 2016).

Peredaran narkoba dilakukan dengan berbagai cara. Kapal-kapal mulai dari kapal pesiar mewah, perahu pompa yang dimodifikasi, dan perahu Iran diduga digunakan dalam perdagangan narkoba yang sedang berkembang ini (Salleh, 2023). Narkoba seringkali dipasang pada alat pelacak dan dijatuhkan ke laut untuk kemudian diambil (Wong & Ng, 2023). Selain itu, obat-obatan yang bersumber dari luar Indonesia, seperti Eropa, India, dan Iran, dikirim melalui Kamboja, Thailand, dan Malaysia sebelum sampai di tanah Indonesia.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika di Wilayah ALKI II)

Banyak dari berbagai pihak terlibat dalam peredaran narkoba di Indonesia. Kelompok kriminal, yang seringkali terlibat dalam berbagai aktivitas terlarang, termasuk perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan perdagangan narkoba, memainkan peran penting (UNODC, 2024). Warga negara asing juga terlibat, dan beberapa di antaranya menghadapi hukuman mati karena tuduhan terkait narkoba (Fransiska, 2022). Peran kelompok kejahatan terorganisir Tiongkok dan Iran juga hadir dalam industri narkoba di Indonesia. Meskipun ada upaya pemerintah untuk memerangi ancaman-ancaman ini, kapasitas lembaga dan pejabat untuk menghadapinya tampaknya masih belum memadai (UNODC, 2024).

Selain itu, seiring dengan bertambahnya populasi pengguna narkoba, maka semakin banyak jenis dan variasi obat yang dikembangkan. Setiap tahun, sejumlah jenis obat baru dikembangkan, dan efek sampingnya menyebabkan orang semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan data CNN pada tahun 2015, dilaporkan bahwa 35 jenis obat berbeda—dari 251 jenis obat di seluruh dunia—masuk ke Indonesia pada tahun 2015. Hingga tahun 2017, Indonesia merupakan rumah bagi 68 dari 800 jenis obat yang ditemukan di seluruh dunia (Rachmawati, 2016).

Pemerintah Indonesia sangat menyadari masalah perdagangan narkoba dan telah bersikap proaktif dalam upaya memerangi ancaman ini. Menurut Setiyono, (2020) pemerintah telah meratifikasi banyak instrumen hukum internasional yang penting dan terus meningkatkan kapasitas aktor dan lembaga kelembagaan. Namun, meskipun terdapat upaya-upaya tersebut, kapasitas lembaga dan pejabat untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut tampaknya masih belum memadai.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang pengenalan narkoba di Indonesia. Paragraf berikut menjelaskan implikasi penggunaan zat adiktif dan psikotropika yang dibahas dalam Pasal 74, 113, 118, 119, 121, 132,

133, dan 144. Jumlah minimum untuk narkoba adalah 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati. Namun informasi dan data yang dapat diandalkan diperlukan untuk meningkatkan penegakan dan pencegahan kejahatan terhadap hewan di Indonesia terkait dengan pelanggaran hukum, khususnya dalam kasus eksploitasi hewan di Selat Makassar (Alam, 2009).

Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia dapat dicermati melalui data jumlah tersangka tindak pidana narkoba yang diungkap Badan Narkotika Nasional antara tahun 2015 hingga 2022 di sekitar ALKI II :

Table 1. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba Sekitar Jalur ALKI II

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sulawesi Selatan	1.621	3.591	2.282	2.229	2.129	2.984	2.879
Sulawesi Tengah	302	421	504	678	645	776	743
Sulawesi Tenggara	404	456	287	434	301	493	505
Sulawesi Utara	998	1.674	268	178	191	217	260
Sulawesi Barat	-	128	201	326	221	440	411
Gorontalo	33	62	70	129	153	196	168
Nusa Tenggara Timur	72	60	15	155	89	55	28
Nusa Tenggara Barat	313	242	609	931	926	735	753

Sumber Data : Badan Narkotika Nasional, 2023.

Sabu berasal dari Malaysia, negara yang merupakan bagian dari jaringan jalur perdagangan global yang memajukan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Penyelundupan narkoba dari Malaysia sudah sampai ke wilayah Makassar, seperti informasi BNNP Sulsel dan lembaga kelautan lainnya. Perdagangan narkoba telah mengakibatkan banyak penangkapan di wilayah Sulawesi Selatan. Penerapan langkah-langkah keamanan yang dilaksanakan oleh badan-badan pengatur industri maritim untuk menghentikan penyelundupan Meskipun petugas intelijen telah sering mencari dan mengumpulkan informasi awal untuk digunakan dalam melakukan operasi, penyelundupan narkoba di Selat Makassar terus terjadi pada tingkat yang relatif tinggi. Hal ini dilakukan baik secara mandiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini, terdapat perbedaan yang mencolok antara keduanya; Operasi sering kali dilakukan berdasarkan data intelijen, namun tidak mampu membatasi perdagangan narkoba yang ada saat ini (Hutagalung, 2017).

Dampak Pencemaran Laut Global oleh Perdagangan Narkoba di Wilayah ALKI II Terhadap Kehidupan Laut

Dampak pencemaran laut global terhadap kehidupan laut, khususnya dalam konteks perdagangan narkoba di wilayah ALKI II, mengungkap adanya interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Perdagangan narkoba, yang difasilitasi oleh jalur laut yang luas dan seringkali tidak diatur, berkontribusi terhadap pencemaran laut dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap keanekaragaman hayati laut. Aktivitas terlarang ini tidak hanya mengganggu ekosistem laut namun juga mempunyai potensi dampak sosio-ekonomi bagi masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut (Bruwer, 2020).

Strategi konservasi laut sedang diterapkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memitigasi dampak ini. Strategi-strategi ini berkisar dari penetapan kawasan perlindungan laut hingga penerapan peraturan yang lebih ketat mengenai kegiatan maritim (Ward et. al., 2022). Namun, efektivitas strategi ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk kapasitas penegakan hukum, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kerja sama internasional (Ward et. al., 2022).

Dalam situasi saat ini, meskipun ada upaya untuk memerangi perdagangan narkoba dan mendukung konservasi laut, tantangan masih tetap ada. Sifat dinamis dari jaringan obat-obatan terlarang, luasnya lingkungan laut, dan rumitnya faktor sosio-ekonomi yang terlibat menjadikan masalah ini rumit untuk diatasi (Bruwer, 2020). Oleh karena itu, pendekatan multi-aspek yang menggabungkan penegakan hukum yang kuat, kerja sama internasional yang kuat, strategi konservasi yang komprehensif, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi kehidupan laut dan ekosistem di kawasan ALKI II dan sekitarnya (Fan et. al., 2022).

KESIMPULAN

Indonesia adalah pemain kunci dalam arena perdagangan global dalam hal pertumbuhan ekonomi dan kualitas udara. Jalur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan laut bagian timur dan barat merupakan nama lain dari gelombang perdagangan global tersebut. Dengan demikian, runtuhnya perdagangan ALKI dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi penduduk Indonesia, namun juga dapat menciptakan peluang eksternalitas positif, seperti pembohong, penangkapan ikan, dan ekspor senjata ke Indonesia, serta peningkatan ekspor narkoba. buruh.

Penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara: melalui udara, laut, dan darat. Narkoba asal Malaysia terutama disalurkan melalui jalur ALKI II yang bertujuan menjangkau sejumlah lokasi antara lain Tarakan, Derawan, Bontang, Palu, Pare-Pare, dan Makassar. Keberadaan Doktrin Poros Maritim Dunia telah membantu dalam beberapa hal, termasuk penurunan jumlah kasus di dekat wilayah jalur ALKI II. Namun karena semakin canggihnya teknik yang digunakan oleh para pengedar narkoba tersebut, maka Doktrin Poros Maritim Dunia tidak selalu terlihat ketika mengkaji sisi peredaran narkoba di kawasan jalur ALKI II.

Eksplorasi dampak pencemaran laut global terhadap kehidupan laut, khususnya dalam konteks perdagangan narkoba di wilayah ALKI II, mengungkap adanya interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terlepas dari penerapan strategi konservasi laut, sifat dinamis dari jaringan obat-obatan terlarang, luasnya lingkungan laut, dan rumitnya faktor sosio-ekonomi yang terlibat menjadikan masalah ini rumit untuk diatasi. Oleh karena itu, pendekatan multi-sisi yang menggabungkan penegakan hukum yang kuat, kerja sama internasional yang kuat, strategi konservasi yang komprehensif, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk melindungi kehidupan laut dan ekosistem di kawasan ALKI II dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rappanna, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Syakir Media Press.
- Alam, A. S. (2009). Analisis Kebijakan Publik Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 81–96.
- Anugrahdwi. (2023, July 24). *Potensi Ekonomi Maritim Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/potensi-ekonomi-maritim-indonesia/>
- Andriani, A. (2018). *Saya Indonesia, Negara Maritim Jati Diri Negaraku*. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Ambari, M. (2019, March 29). *Seperti Apa Kebijakan Kelautan Indonesia untuk Kedaulatan Maritim?* Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2019/03/29/seperti-apa-kebijakan-kelautan-indonesia-untuk-kedaulatan-maritim/>
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2018, March 2). *Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia Melewati Indonesia*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia>
- Bichler, G., Malm, A., & Cooper, T. (2017). Drug supply networks: a systematic review of the organizational structure of illicit drug trade. *Crime Science*, 6, 1-23.
- Bruwer, C. (2020). Smuggling and trafficking of illicit goods by sea. *Global challenges in maritime security: an introduction*, 49-73.
- Fan, H., Huang, M., Chen, Y., Zhou, W., Hu, Y., & Wei, F. (2023). Conservation priorities for global marine biodiversity across multiple dimensions. *National Science Review*, 10(6), nwac241.
- Fransiska, Asmin. (2022). Indonesia's zero tolerance drug laws leave hundreds on death row. The Jakarta Post. Diakses melalui: <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/08/31/indonesias-zero-tolerance-drug-laws-leave-hundreds-on-death-row.html>
- Hutagalung, S. M. (2017). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) : Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 75–91. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/japs/article/view/>
- Hardiana, I., & Trixie, B. (2014, October 21). *Menuju Indonesia Sebagai Negara Poros Maritim*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/menuju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>
- Jannah, R. (2020, September 23). *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan Universitas Gadjahmada. <https://kmip.faperta.ugm.ac.id/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia/>
- Kantor Komunikasi Publik. (2020, August 31). *Indonesia Bisa Sejahtera dari Sektor Ekonomi Kelautan*. Universitas Padjajaran. <https://www.unpad.ac.id/2020/08/indonesia-bisa-sejahtera-dari-sektor-ekonomi-kelautan/>
- Kominfo. (2016, October 18). *Menuju Poros Maritim Dunia*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
- Latschan, Thomas. (2015). A major drug hub. Deutsche Welle. Diakses melalui: <https://www.dw.com/en/unodc-indonesia-is-a-major-drug-trafficking-hub/a-18231494>
- Lemhannas RI. (2022, August 25). *Laut, Jalur Penting Perdagangan*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1693-laut-jalur-penting-perdagangan>
- Lemhannas RI. (2023, June 14). *Menjaga Stabilitas Konektivitas Maritim Melalui Kolaborasi*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. <https://www.lemhannas.go.id/index>

php/publikasi/press-release/1939-menjaga-stabilitas-konektivitas-maritim-melalui-kolaborasi

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2018). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Najeri, M., Syahrin, A., Muhammadiyah, U., & Timur, K. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia. In *Indonesian Perspective* (Vol. 3, Issue 1).
- Panrb. (2021, September 24). *Presiden Jokowi: Kerja Nyata Kokohkan Identitas Indonesia Sebagai Bangsa Maritim*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/daristana/presiden-jokowi-kerja-nyata-kokohkan-identitas-indonesia-sebagai-bangsa-maritim>
- Pratama, C. D., & Nailufar, N. N. (2020, December 25). *Upaya Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia*. Kompas. https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/25/190408269/upaya-indonesia-menjadi-poros-maritim-dunia?page=all#google_vignette
- Rachmawati, I. (2016, January 11). *Buwas : Pengguna Narkoba di Indonesia Meningkat Hingga 5,9 Juta Orang*. Kompas.
- Rahmadani, S., Kusmanto, H., & Warijo. (2019). Strategi Cina menghadapi “Malacca Dilemma” dalam Rangka Pengamanan Jalur Energy Cina di Selat Malaka. *JUPIIS: PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(1),135. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.12680>
- Salleh, Asyura. (2023). Illicit Maritime Drug Trafficking as An Evolving Threat To Southeast Asia’s Maritime Security. Asia Maritime Transparency Initiative. Diakses melalui: <https://amti.csis.org/illicit-maritime-drug-trafficking-as-an-evolving-threat-to-southeast-asias-maritime-security/>
- Setiyono, J. (2020). Integrated policy management of narcotics trafficking as transnational organized crime in Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 260-276.
- Supartono, Sugiharto, S., & Adriyanto, A. (2020). Peran Instansi Kemaritiman Dalam Pencegahan Penyeludupan Narkoba di ALKI II (Studi Kasus di Selat Makassar Periode 2015-2019). *Jurnal Keamanan Maritim*, 6(2), 161–181. <https://regional.kompas.com/read/2016/01/11/1431>
- UNODC. (2024). Indonesia: Counter transnational organized crime and illicit trafficking. UNODC. Diakses melalui: <https://www.unodc.org/indonesia/en/issues/counter-transnational-organized-crime-and-illicit-trafficking.html>
- Ward, D., Melbourne-Thomas, J., Pecl, G. T., Evans, K., Green, M., McCormack, P. C., ... & Layton, C. (2022). Safeguarding marine life: conservation of biodiversity and ecosystems. *Reviews in fish biology and fisheries*, 32(1), 65-100.
- Wong, May & Ng, Darelle. (2023). Drug smugglers in Southeast Asia have found a way past land patrols – the sea route. Channel News Asia. Diakses melalui:

<https://www.channelnewsasia.com/asia/drugs-smugglers-traffickers-east-southeast-asia-maritime-sea-route-crystal-meth-3544861>



Check for updates

The Concept of Multi-track Diplomacy in Indonesian Coast Guard to Strengthen the International Maritime Relationship

Sean Narahara^{1*}, Lukman Yudho Prakoso¹, Rudi Sutanto¹

¹ Universitas Pertahanan Indonesia, 16810, Jawa Barat-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Jan 07, 2024

Diterima: April 21, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Bakamla; Multi-track diplomacy; Trinity roles.

KORESPONDEN:

Sean Narahara

Universitas Pertahanan Indonesia

Email:

seannara02@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Narahara, S., Prakoso, L. Y., & Sutanto, R. (2024). The Concept of Multi-track Diplomacy in Indonesian Coast Guard to Strengthen the International Maritime Relationship. *Journal of Political Issues*. 6(1); 32-37.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.178>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.178>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world with vast stretches of ocean. The pillars in the effort to defend Indonesia's seas are not only found in the TNI, but also in the coast guard. Bakamla as Indonesia's coast guard is tasked with protecting the country's oceans, however Bakamla faces many problems. This problem is in the form of a shortage of personnel, and is also Bakamla's main step in becoming part of Indonesia's maritime defense strategy. This research was created using a qualitative approach and literature review methods to reach the right solution to solve this problem. The results of this research include that Bakamla has a crucial role in law enforcement in Indonesia's maritime areas and also has a major responsibility for the security of the nation and state from the maritime sector. Bakamla also has the rights and opportunities to implement the precise trinity roles that is implemented in the navy since both of them serve the similar roles. As an advancement of this those roles, Bakamla also has the rights to implement the use of Multi-track Diplomacy concept to strengthen its function in international diplomacy with other country in order to reduce or even avoid the tension that has been the main issues of current era. Therefore, it is hoped that Bakamla can apply the concept of multi-track diplomacy within the naval trinity concept further, so that Indonesia's maritime defense can increase.

Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan hamparan lautan yang sangat luas. Pilar dalam upaya mempertahankan laut Indonesia tidak hanya terdapat pada TNI saja, namun juga pada penjaga pantai. Bakamla sebagai penjaga pantai Indonesia bertugas melindungi lautan negara, namun Bakamla menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan tersebut berupa kekurangan personel dan juga menjadi langkah utama Bakamla untuk menjadi bagian dari strategi pertahanan maritim Indonesia. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tinjauan pustaka untuk mencapai solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hasil penelitian tersebut antara lain Bakamla mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia dan juga mempunyai tanggung jawab besar terhadap keamanan bangsa dan negara dari sektor maritim. Bakamla juga mempunyai hak dan kesempatan untuk menjalankan peran trinitas yang sama persis seperti yang diterapkan di TNI Angkatan Laut karena keduanya menjalankan peran yang sama. Sebagai peningkatan peran tersebut, Bakamla juga berhak menerapkan konsep Multi-track Diplomacy untuk memperkuat fungsinya dalam diplomasi internasional dengan negara lain guna mengurangi atau bahkan menghindari ketegangan yang selama ini menjadi isu utama di era saat ini. Oleh karena itu, Bakamla diharapkan dapat menerapkan lebih jauh konsep diplomasi multi jalur dalam konsep trinitas angkatan laut, sehingga pertahanan maritim Indonesia dapat meningkat.

TENTANG PENULIS:

Sean Narahara, the author is a graduate student pursuing a master's degree in Maritime Defense Strategy at Universitas Pertahanan Indonesia. As a author, Narahara demonstrates a deep dedication to the field of maritime defense, combining theory and practice to enhance his strategic understanding.

Lukman Yudho Prakoso, the author is a lecturer and researcher in the Maritime Security program at Universitas Pertahanan Indonesia. He completed his doctoral studies at the Universitas 17 August 1945 Surabaya.

Rudi Sutanto, the author is a lecturer and researcher in the Maritime Defense Strategy program at Universitas Pertahanan Indonesia. He completed his doctoral studies at Universitas Negeri Jakarta in 2019.

INTRODUCTION

Indonesia is a famous country for its beautiful sceneries. One of those so-called famous sceneries is its ocean. Ocean in Indonesia is veins connecting all the islands all over the country. Indonesia is also in between of two big ocean that are Indian Ocean and Pacific Ocean. Because of this country characteristic to be one of the most islandic countries in the world or even the biggest islandic country throughout the world which consist of 17.504 islands, ocean becomes the key part in linking all those islands. With the total of 5,8 million km² in terms of size, normal ships, cargo ships, or even trading ships can travel across each island with ease. By the size of ocean it has, this becomes authentic evidence that Indonesia become the biggest and prosperous maritime country. Other than that, Indonesia also has a unique ocean characteristic where its ocean is used as a lane for international transportation supported by its geostrategic position (Bakamla, 2020). This becomes an advantage for Indonesia to become the central trading country. As the central market, Indonesia become full of foreign country. This has become not only an issue, but also an opportunity for Indonesia to create an unbreakable bond of relationship with the other countries. This effort about forging a bond can be achieved not only with trading, but also with diplomacy.

Diplomacy itself is an exclusive duty of the Ministry of Foreign Affairs; however, Booth (2012) states that diplomacy can also be performed by the navy. This statement is indeed describing the other roles of the navy other than for war or for combat, in this term is diplomatic purposes between nations. Described in the trinity roles of navy, diplomacy can be performed. Trinity roles of navy is a concept put forward by Ken Booth, an international security strategist to refers to the three main roles played by navies in the context of international security, namely the military role, the diplomatic role and the policy role. The diplomatic role involves the use of sea power to establish diplomatic relations with other countries and promote peace and stability in international waters. This role includes participation in joint military exercises, ship visits, and cooperation in peacekeeping operations. This means every navy can put on an effort creating peace through a diplomacy act to one another.

The roles of navy diplomacy are also evolving and advancing further throughout the years. The changing diplomacy from a simple concept of relation between multiple variables keep happening for years. This evolvement of it is described by Diamond and McDonald (1996). Through their books, diplomacy evolve to a term known as multi-track diplomacy. Multi-track Diplomacy is a system approach focusing in peacebuilding and conflict resolution. It identifies nine different "tracks" or channels through peacemaking and peacebuilding activities occur. These tracks are interlinked and work together to create a "synergy" that enables the development of peace. The concept of Multi-Track Diplomacy itself is an extension of the notion of "track two diplomacy" or "citizens' diplomacy," which was first introduced previously by foreign service officer Joe Montville in 1981. Montville made the distinction between "Track One", which he defined as official governmental action, and "Track Two", which included unofficial, non-governmental actors involved in peacebuilding activities. Then, Diamond and McDonald further expanded this concept by dividing "Track Two" into multiple tracks, recognizing the diverse range of actors and activities involved in peacebuilding.

The Multi-Track Diplomacy framework emphasizes the importance of engaging a wide array of actors and activities in the pursuit of peace, going beyond traditional state-centric diplomacy. It highlights the interconnectedness of these different tracks and the need for coordinated, collaborative efforts to address complex conflicts and promote sustainable peace.

Furthermore, multi-track diplomacy approach allows the involvement of non-state actors in conflict resolution and diplomacy efforts, so that it can be an effective tool in the context of international relations. In practice, multi-track diplomacy can help in resolving international conflicts by expanding the network of actors involved in the diplomatic process, thereby increasing opportunities to achieve peace and resolve conflicts. Apart from that, multi-track diplomacy can also help in building trust and strengthening relations between countries, thereby reducing the possibility of conflict in the future. With a multi-track diplomacy approach, all sectors of society are considered important and need to be involved, supported, listened to, and trained in a common language regarding dialogue, conflict resolution, and peace building to prevent or end violent conflicts. Therefore, multi-track diplomacy is an important concept in the context of international conflict resolution, because it allows the involvement of all parties involved in efforts to achieve global peace and stability.

The explanation above is intriguing for the author to analyze the gap of the role of Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, also famously known as Bakamla RI that is formed through Peraturan Presiden Nomor 178 (2014), in implementing and carrying out the concept of multi-track diplomacy proposed by Diamond and McDonald. Bakamla RI itself is an instance that serves similar roles as the navy (TNI). Its roles essentially protecting, guarding, and patrolling around the nation across the sea lines from outside threats. Within their similarities in their roles, the trinity function of the navy, which functions to form a relation within other countries with Indonesia, can also be applied not only to navy but also to Bakamla RI (Rasiddin et al, 2021).

METHODS

This research focuses on the theory of trinity function of navy which specified in the multi-track diplomacy. In practice, these theories can also be implemented in Bakamla RI since they serve a similar duty to the navy. Therefore, this research uses a qualitative approach to find out the results. Moreover, qualitative descriptive research design, in this case literature study, is utilized to describe each argumentation and generate useful new ideas as a result of this research. As stated by Sugiyono (2010); Cohen (2007), qualitative design is a research design that utilizes the researcher's empirical experience. Qualitative research can also be described as a research that focuses on describing and analyzing a certain phenomenon through the opinion of some people or organizations about that phenomenon (Moleong, 2019), (Machi, 2016), (Onwuegbuzie, 2016); Petersen (2015). Apart from that, this research also uses researchers as the main instrument and data collection tool in this research to elaborate the primary and secondary data from various preliminary research to reduce the subjectivity. It also has the aims to be the tool to examine each conclusion from these books and articles and create new ideas and theories regarding the issues that are currently being discussed in this research (Rob et al, 2022); (Booth, 2012).

RESULT AND DISCUSSION

With the aim of strengthening and improving the results of this research, previous research is used as a reference and reference material so that the research results obtained will not be far from the proper connotation. The research results state that Bakamla is present in monitoring, supervising, preventing and combating illegal acts in Indonesian waters and Indonesian jurisdiction. Bakamla carries out various functions in carrying out security and safety patrol duties in Indonesian waters and Indonesian jurisdiction. Then, Bakamla also implemented and prepared a strategic plan to further maintain and optimize the security and safety of Indonesia's territorial waters, as explained in Peraturan Presiden Nomor 178 (2014) which states that the Strategic Plan for Maritime Security in the Territory of the Republic of Indonesia for the 2020-2024 period, hereinafter referred to as the Bakamla RI Strategic Plan (2020) is a guideline for

planning and implementing as well as evaluating programs and activities carried out to achieve the vision and mission of the Republic of Indonesia Maritime Security Agency in securing Indonesian waters. Apart from that, the benefit of the establishment of Bakamla that can be felt by the Indonesian state is that in the provisions of Bakamla an early warning system or early detection system (Early Warning System) has been established which is really needed by the Indonesian state. In terms of geology and climate, this area is classified as an area prone to natural disasters. Therefore, Bakamla's role as a part of Indonesia's defense in the transition period with various international threats is very necessary, so that Bakamla becomes the main focus in the country's defense against every threat. So, Bakamla must continue to receive support in terms of procurement of defense equipment, fleet and personnel.

Bakamla must also be able to become one of the main strategies for national defense in the dynamic maritime sector as it is today. As the current issue that become a serious matter, tension between countries will always be the main case. There have been several tensions between countries showed in international scene diplomacy in the past few decades, such as the United States and the Soviet Union in the Cold War. Furthermore, there are People's Republic of China and Taiwan, Russia and Ukraine, China and India, and ultimately the long-taken tension between the arch enemies of Palestine and Israel. Reflecting on these matters, diplomacy will always be the selling point. Through this theory of multi-track diplomacy, Bakamla can reduce or even avoid the risk of tension between Indonesia with other country. The description above also shows that Bakamla RI has implemented the 4th (fourth) and 5th (five) concept of multi-track diplomacy where each point is: 4) Research, Training and Education, and also 5) Special communities. According to this, Bakamla has demonstrated by a part of multi-track diplomacy through a policy by implementing training activities for each of its personnel. This action is conducted not only to increase the quantity of the personnels, but also the quality simultaneously. Apart from that, actions such as research related to strategy, tactics and other instruments are also been implemented and developed by Bakamla. Therefore, these two things are a sign that Bakamla RI has implemented 2 (two) points of multi-track diplomacy.

As the main point, multi-track diplomacy is a concept that can be implemented not only in the navy, but also Bakamla. This concept, can be applied by Bakamla through different ways. As stated in the previous passage, Bakamla actually has implemented some of the main parts of multi-track diplomacy. As for the other parts of it, it can be applied through a new policy or regulation by increasing its relationship and communication with the government, raising its funding to improve the organization itself, and also increasing its activism in terms of protecting and creating a relation with several business sectors to support Bakamla's every actions. These ideas and concepts, in theory, will work out and not only increasing Bakamla's supremacy, but also strengthening its applied concept of multi-track diplomacy since it will implement every point of multi-track diplomacy respectively.

CONCLUSION

Bakamla, as one of the agencies newly formed by the Indonesian government, actually has a greater role than what has been carried out so far. Bakamla has a role as the main defense apart from the TNI which has the task of defending the nation and state from threats that are present at this time or in the future. As the navy has trinity roles, Bakamla that has purpose to the navy, can also has that trinity roles. One of those roles is diplomacy. Through the theory of multi-track diplomacy developed throughout the years, Bakamla can also perform every single point in that theory. Prior to that, Bakamla has several issues regarding the development of the organization, diplomating with other nations, and it also has problems on the overlapping duty with other instances (Fernando, 2020); (Wardhani, 2022). These series of issues that Bakamla faced all occurred before multi-track diplomacy was implemented. The implementation can

present in a form strengthening the relation between Bakamla with the government, handling conflict with a resolution, and involving and coordinating the business sectors to support the action of Bakamla to a certain degree. Furthermore, other actions such as personnel enrolment and training can also be applied to increase the quantity and quality of themselves. Other than that, better funding management can also be seen as one of the main factors in Bakamla's maritime defense by providing space to develop the fleet, defense equipment and personnel who will become the main pillars of protection for the Indonesian nation. Apart from that, Bakamla can also continue to develop by implementing the naval trinity concept which was then developed with the multi-track diplomacy concept. With this concept, it is believed that Bakamla can strengthen Indonesia's maritime defense by implementing these concepts.

BIBLIOGRAPHY

- Aris Wardhani, P., Rivai Ras, A., Widodo, P., & Juni Risma Saragih, H. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Pertahanan Negara di Era Globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2573>
- Bakamla. (2020). *Rencana Strategi Bakamla 2020-2024*. https://www.bakamla.go.id/uploads/static_page/RENSTRA_BAKAMLA_2020-2024_FINAL.pdf
- Bakamla. (2020). Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia No 24 Tahun 2020.
- Booth, A., Papaioannou, D., & Sutton, A. (2012). *Systematic approaches to a successful literature review*. <http://lib.ugent.be/en/catalog/rug01:002101878/items/000010929920/>
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education. In *Routledge eBooks*. <https://doi.org/10.4324/9780203029053>
- Dekkers, Rob; Carey, Lindsey; Langhorne, Peter (2022). Making Literature Reviews Work: A Multidisciplinary Guide to Systematic Approaches. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-90025-0>
- Diamond L. & McDonald J. W. (1996). *Multi-track diplomacy : a systems approach to peace*. Kumarian Press.
- Fernando, Z. J. (2020). Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional pada Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 8(3), 272–282. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/184/96>
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success*. California: Corwin. <https://doi.org/10.4135/9781071939031>
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Onwuegbuzie, A. J. & Frels, R. (2016). Seven Steps to a Comprehensive Literature Review: A Multimodal and Cultural Approach (dalam bahasa Inggris). London: SAGE Publications Ltd.
- Petersen, K., Vakkalanka, S., & Kuzniarz, L. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2015.03.007>

Rasiddin, L., & Sutanto, R. (2022). Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam Pengamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(3), 220–231. <https://doi.org/10.33172/spl.v7i3.861>

Sugiyono (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.



Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan

Laras Ayu Andini^{1*}, Dina Fadiyah¹, Sapto Setyo Nugroho¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, 15418, Banten-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Mar 25, 2024

Diterima: Mei 27, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Human Right Issues; Kamisan Action; Social Movement.

KORESPONDEN:

Laras Ayu Andini

Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Terbuka

Email:

larasayu@ecampus.ut.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Andini, L. A., Fadiyah, D., & Nugroho, S. S. (2024). Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan II. *Journal of Political Issues*. 6 (1); 38-45.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.203>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.203>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Kamisan action is a peaceful action that is carried out routinely on Thursdays every week as a form of protest to the state for human rights violations and violence committed without resolution and forgiveness. Kamisan action is a form of pressure on the government to rush to resolve various cases of human rights violations that have not yet found a bright road. This paper explores Kamisan as a collective movement that pressures the government to rush to resolve a number of abandoned cases of human rights violations. The Kamisan action uses peaceful demonstrations as a form of protest to the state while showing respect for the victims without involving violence. This paper also highlights the government's response as a challenge faced by the protesters. The movement has experienced ups and downs for 17 years. This research uses a qualitative method with a case study approach. Primary data came from interviews with victims' families, the Commission for the Disappeared and Victims of Violence, and academics. The analysis includes grouping the findings into themes or categories, and interpreting the meaning in descriptive form. The results show that the kamisan action is a collective movement to fight injustice in the settlement of human rights violations in Indonesia. Using a number of symbols as the identity of the movement. Rooted in emotional attachment and solidarity between the participants of the action, especially for the victims and their families who did not receive a fair settlement. Although the pressure exerted on the government met with resistance which led to impunity.

Abstrak Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang dilakukan secara rutin pada hari kamis setiap minggunya sebagai bentuk protes kepada negara atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dilakukan tanpa penyelesaian dan kata maaf. Aksi Kamisan merupakan bentuk tekanan kepada pemerintah untuk bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak juga menemui jalan terang. Tulisan ini mengeksplorasi Kamisan sebagai sebuah gerakan kolektif yang menekan pemerintah untuk bergegas menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terbengkalai. Aksi Kamisan menggunakan bentuk demonstrasi damai sebagai bentuk protes kepada negara sekaligus menunjukkan penghormatan kepada korban tanpa melibatkan kekerasan. Pasang-surut gerakan telah dialami oleh gerakan ini selama 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemdekatan studi kasus. Data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan akademisi. Daftar pertanyaan disusun dengan menggunakan pertanyaan terbuka. analisis meliputi pengelompokkan hasil temuan menjadi tema atau kategori, dan interpretasi makna dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Aksi kamisan merupakan gerakan kolektif untuk melawan ketidakadilan dalam penuntasan pelanggaran kasus HAM di Indonesia. Memakai sejumlah simbol sebagai identitas gerakan. Berakar pada keterikatan emosional dan solidaritas antar para peserta aksi utamanya terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapat penyelesaian yang adil. Meskipun tekanan yang diberikan kepada pemerintah menemui penolakan yang berujung pada impunitas.

TENTANG PENULIS:

Laras Ayu Andini, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2018. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka.

Dina Fadiyah, Penulis menyelesaikan studi S-2 Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gdjah Mada pada tahun 2016. Penulis saat ini

bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka.

Sapto Setyo Nugroho, Penulis menyelesaikan studi S-2 Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2019. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka.

PENDAHULUAN

Pelanggaran HAM berat di Indonesia terus menjadi masalah yang menghambat kemajuan keadilan di negara ini. Setara Institute merilis kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum tersentuh proses hukum juga kasus pelanggaran HAM yang macet di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Kasus tersebut antara lain, Kasus Marsinah, Kasus Bulukumba, Kasus Dukun Santet, Peristiwa Malari, dan Pembunuhan Wartawan Udin, sedangkan, Kasus Pelanggaran HAM yang Macet di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM antara lain Peristiwa Pembunuhan Massal 1965, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Tragedi Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998, Tragedi Semanggi I 1998, Tragedi Semanggi II 1999, Kasus Wasior, Kasus Wamena, Kerusuhan Mei 1998 dengan rekomendasi penyelesaian berupa Presiden Jokowi Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan ([Setara Institute, 2015](#)).

Di tengah perjalanan panjang tersebut, Aksi Kamisan telah turut hadir kebersamaan upaya penegakan HAM selama hampir 17 tahun. Aksi Kamisan atau yang lebih akrab terdengar dengan sebutan Aksi Damai Kamisan atau Kamisan muncul sebagai fenomena yang menarik banyak atensi publik. Aksi Kamisan, juga dikenal sebagai Black Umbrella Protest, merupakan inisiatif aksi damai yang muncul sebagai langkah untuk mencari keadilan atas kejadian yang terjadi selama tahun 1998-1999. Kasus-kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, seperti tragedi Semanggi I-II dan Trisakti yang melibatkan penculikan, pembunuhan, penembakan, dan penghilangan paksa ([Rini, 2022](#)).

Aksi ini berdiri diam di depan Istana Negara dan menyampaikan petisi kepada Presiden Indonesia untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan yang dipelopori oleh Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Berkaca pada gerakan serupa di Plaza de Mayo Argentina, yang dipelopori oleh para ibu yang melakukan perlawanan terhadap rezim yang memuja kekerasan. Ranah domestic yang seringkali identik dengan peran perempuan di rumah, para ibu ini mengambil langkah ke ranah politik. Meyakini bahwa tragedy hak asasi manusia membuat masyarakat tercerai berai dan melihat pentingnya mengangkat suara mengenai hal ini ([Andalas, 2017](#)).

Aksi Kamisan memanfaatkan solidaritas kolektif dan mobilisasi massa untuk mengangkat isu-isu HAM yang telah lama diabaikan. Gerakan ini menggunakan simbol-simbol dan tindakan konkret untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Upaya kolektif berupa tekanan ini memberikan respon yang bervariasi sepanjang tahun khususnya dari pemerintah.

Upaya kolektif yang berasal dari para peserta Aksi Kamisan ini selalu berupaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan khususnya dalam isu HAM. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakaria yang berjudul "Digital Citizenship and Social Movements: How the Aksi Kamisan Discourse on Human Rights Enforcement Issues on Social Media". Aksi Aksi Kamisan adalah sebuah gerakan yang berfokus pada wacana isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini memiliki agenda rutin yaitu berdiri di depan gedung Istana Kepresidenan Istana Negara. Namun, di era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Aksi Kamisan bermanuver dengan membungkus isu-isu yang mereka angkat di media sosial.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat untuk memberikan tekanan kepada pemerintah (Zakaria, 2022)

Dan penelitian yang dilakukan oleh Putra yang berjudul “Aktivisme Gerakan Aksi Kamisan Dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia” menunjukkan Peluang politik untuk Aksi Kamisan dianggap kecil karena berbagai hambatan dalam penyelesaian kasus-kasus HAM. Meskipun demikian, mobilisasi massa berhasil meluas ke berbagai daerah. Namun, mobilisasi politik Aksi Kamisan masih belum mampu menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia. Kamisan berhasil muncul sebagai aksi simbolis yang konsisten dalam menuntut penyelesaian pelanggaran HAM. Gerakan melawan impunitas menjadi citra utama Aksi Kamisan, dengan maksud agar kasus-kasus HAM tetap diadili. (Putra, 2020).

Aksi Kamisan memanfaatkan solidaritas kolektif dan mobilisasi massa untuk mengangkat isu-isu HAM yang telah lama diabaikan. Gerakan ini menggunakan simbol-simbol dan tindakan konkret untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya menghargai dan melindungi hak asasi manusia. Upaya kolektif berupa tekanan ini memberikan respon yang bervariasi sepanjang tahun khususnya dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan besar dalam kajian ini, Bagaimana Aksi Kamisan dapat dilihat sebagai sebuah gerakan sosial yang menekan pemerintah dalam upaya penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia?

LANDASAN TEORITIK

Dalam penelitian ini, penerapan teori gerakan sosial membantu kita memahami bagaimana mobilitas dan pembentukan solidaritas massa memengaruhi efektivitas serta keberlanjutan gerakan tersebut. Sebaliknya, konsep kelompok penekan memberikan pemahaman tentang bagaimana tekanan dan advokasi dari kelompok-kelompok kecil namun berpengaruh dapat mempengaruhi kebijakan dan respons pemerintah terhadap isu-isu hak asasi manusia. Dengan menggunakan kerangka teoritis ini, kita dapat menyelidiki lebih mendalam faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perjalanan serta dampak dari Aksi Kamisan, serta implikasinya pada proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Gerakan Sosial

Tarrow menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya bersama oleh individu-individu untuk mencapai tujuan bersama, yang melibatkan solidaritas dan interaksi yang berkelanjutan dengan pihak-pihak yang berseberangan, termasuk elit dan penguasa. (Rochadi, 2020). Terdapat empat penekanan pada konsep Tarrow bahwa gerakan sosial menyusun aksi melawan kelompok elit, dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, berakar pada rasa solidaritas dan melanjutkan aksi kolektifnya menjadi sebuah gerakan sosial (Rochadi, 2020).

Menurut Locer (2002), sebuah gerakan sosial umumnya memiliki tiga ciri khas. Pertama, gerakan tersebut terorganisir, yang berarti pendukungnya mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemimpin melalui tugas-tugas yang dibagikan kepada anggota. Kedua, gerakan sosial tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bertahan, sejalan dengan tujuan yang dicanangkan. Ketiga, gerakan sosial tersebut sengaja dibentuk oleh anggotanya meskipun dalam kasus Aksi Kamisan jaringan anggotanya cenderung longgar yang ditandai dengan lebih banyaknya pendukung aksi, dan setiap anggota memiliki peran yang ditentukan sesuai dengan tugasnya (Haris et al., 2019).

Dari sudut pandang gerakan sosial, partisipasi dalam aksi kamisan memiliki potensi besar untuk memengaruhi kebijakan pemerintah serta memperjuangkan perubahan sosial yang lebih luas. Pertumbuhan beragam gerakan sosial juga mencerminkan dinamika realitas sosial, di mana masa lalu membentuk kondisi saat ini dan kondisi saat ini membentuk arah masa depan (Rochadi, 2020).

Dalam gerakan sosial dikenal incipient stage, dalam melihat Aksi Kamisan, ini adalah suatu kondisi yang tergambar pada awal mula terbentuknya aksi yang berpangkal dari

keresahan para korban beserta keluarga terkait dengan pelanggaran HAM. Para inisiator Kamisan berbagi informasi melalui komunikasi yang efektif. Kedua, pada tahap organizational stage, semua kegiatan yang direncanakan, termasuk rencana aksi yang terlibat di dalamnya, telah dipersiapkan dengan cara yang terstruktur dan teratur, sehingga setiap tindakan di lapangan menjadi bagian dari rencana yang telah disusun sebelumnya (Haris et al., 2019).

Kelompok Penekan

Kelompok penekan adalah entitas atau organisasi yang menggunakan berbagai metode persuasif, propaganda, atau cara lainnya untuk mempengaruhi dan membentuk kebijakan pemerintah. Dalam batasan konsep ini, setiap organisasi, baik yang bersifat politik maupun non-politik, ketika melakukan tekanan politik untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu, dapat dianggap sebagai kelompok penekan (Djuyandi et al., 2021).

Kelompok penekan terbentuk bukan untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan untuk menggerakkan atau memaksa pihak yang berada di dalam pemerintahan atau kepemimpinan menuju arah yang diinginkan. Sasarannya adalah menekankan kepentingan masyarakat secara umum dan berperan sebagai sarana untuk menyuarakan kepentingan masyarakat (Pureklolon, 2020). Kelompok penekan mencari cara agar bisa mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau tuntutan masyarakat luas (Pureklolon, 2016).

Peter Willett mengkategorikan kelompok penekan menjadi dua jenis, yaitu kelompok sektorsial dan kelompok promosional (Djuyandi et al., 2021). Promosional adalah kelompok yang tidak mewakili salah satu golongan tertentu dalam masyarakat, kelompok ini terbentuk untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu berlandaskan kepercayaan dan tujuan yang khusus (Hartati, 2014).

Tanggapan pemerintah terhadap kelompok penekan tercermin dalam dua bentuk reaksi. Pertama, merespons tuntutan dengan menerapkan kebijakan baru atau melakukan modifikasi terhadap kebijakan yang ada. Kedua, menolak utamanya ketika terdapat konflik kepentingan politik atau ekonomi yang kuat, dengan mencegah atau membatasi aktivitas kelompok tersebut melalui penggunaan alat hukum atau administratif (Putranto, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan kontekstual mengenai Aksi Kamisan. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi perjuangan Aksi Kamisan sebagai suatu kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pengumpulan data yang detail dan mendalam dilakukan dengan melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan) dan melaporkannya dalam bentuk deskripsi kasus (Creswell, 2016).

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam Aksi Kamisan, yakni para peserta Aksi Kamisan, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang memiliki keahlian dalam bidang HAM. Data sekunder berasal dari laporan tahunan yang berasal dari lembaga resmi terkait, arsip, jurnal, koran juga majalah baik cetak maupun elektronik juga catatan para peserta Aksi.

Analisis data merupakan langkah sistematis dalam menyusun informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, pemecahan menjadi unit-unit terperinci, sintesis, serta pengambilan kesimpulan untuk menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami (Anggito & Setiawan, 2018).

Analisis dalam penelitian ini melewati sejumlah langkah. Pertama, transkripsi data hasil wawancara. Kedua, pengkodean data berdasarkan kategori dan topik Kamisan. Ketiga, Mengembangkan tema dengan merujuk pada sumber data baik primer maupun sekunder. Keempat, interpretasi data. Terakhir, penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penguatan Gerakan Pada Aksi Kamisan

Sejarah Kamisan berawal di ujung tahun 2006 saat Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), yakni sebuah paguyuban korban juga keluarga korban, bersama dengan Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) dan KontraS mencari alternatif bentuk perjuangan dalam mengungkapkan fakta kebenaran dan keadilan dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM. Maria Catarina Sumarsih, Ibu dari Bernardus Realino Norma Irawan, mahasiswa Atma Jaya yang tewas tertembak peluru pada Peristiwa Semanggi I tahun 1998, Suciwati, istri dari aktivis Munir dan Bedjo Untung merupakan inisiator yang terlibat dalam pelaksanaan Aksi Kamisan. Pada Selasa, 9 Januari 2007 “Aksi Diam” lahir bersamaan dengan disepakati pula mengenai hari, tempat, waktu, warna pakaian dan mascot yang kemudia menjadi symbol gerakan ini. Namun Aksi ini pertama kali dilangsungkan pada Kamis 18 Januari 2007.

Model aksi ini mengambil inspirasi dari gerakan The Mothers (Plaza de Mayo) di Argentina yang dimulai pada 30 April 1977. Gerakan ini menonjolkan kekuatan simbolik perempuan, khususnya suara para ibu yang tiba-tiba kehilangan anak-anak mereka dalam peristiwa perlawanan terhadap rezim militer dan kudeta terhadap Presiden Isabel Peron ([Yunianty et al., 2021](#))

Sebelum munculnya Aksi Kamisan, telah ada banyak inisiatif aksi yang diusulkan namun tidak bertahan lama. Contohnya adalah aksi damai yang dilakukan oleh aktivis perempuan pada tahun 1999 dan Konvoi Sepeda Motor untuk Munir pada tahun 2006. Perbedaan terlihat dalam cara aksi damai dilakukan oleh aktivis perempuan tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Suara Ibu Peduli (SIP). SIP memulai kegiatan mereka sejak November 1997 di Yayasan Jurnal Perempuan, lalu berpindah ke Bunderan Hotel Indonesia (HI) pada tanggal 23 Februari 1998, untuk terus menyuarakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ([Yudistira, 2022](#)).

Kamisan memiliki simbol ikonik yang menjadi penanda gerakan. Payung hitam merupakan mascot yang dipilih untuk melambangkan bentuk perlindungan dan keteguhan iman dari aksi ini. Payung juga berfungsi sebagai pelindung para peserta aksi atas hujan dan terik matahari ketika aksi damai berlangsung. Sedangkan diam dan berdiri sebagai pilihan menunjukkan bahwa peserta aksi bukanlah warga negara yang sulit diatur. Lebih lanjut menunjukkan bahwa korban beserta keluarga korban pelanggaran HAM adalah warga negara yang memberikan contoh bahwa keadilan harus terus diperjuangkan dengan penuh kedamaian serta tanpa kekerasan. Simbol yang menjadi identitas Kamisan ini berfungsi sebagai sarana ekspresi dan memberikan makna bagi identitas kelompok. Semua simbol ikonik tersebut memegang peranan penting dalam mobilisasi gerakan sekaligus sebagai bentuk komunikasi antar para peserta aksi. Atau dengan kata lain, sebagai metode protes untuk merespon kebijakan-kebijakan yang dianggap timpang dan mengumumkan kepada publik bahwa permasalahan mengenai HAM belum terselesaikan ([Apriyani, 2021](#)).

Pada beberapa aksi daerah, tidak ada sinergitas isu antara Kamisan Jakarta dengan Kamisan di daerah tersebut, namun hal ini tidak menyalahi prosesifitas gerakan. Sebab, aksi di daerah tetap diawasi oleh organisasi masyarakat sipil setempat. Isu yang diangkat pada aksi-aksi daerah berkisar pada isu HAM atau kebijakan di tingkat lokal bergantung pada masing-masing kota. Menurut catatan, setidaknya muncul 50 gerakan aksi serupa di beberapa daerah seperti Yogya, Bandung, Semarang, Mojokerto dan Tulung Agung. Aksi-aksi tersebut tumbuh secara organik di ibukota provinsi atau kota-kota besar. Meskipun dalam perjalanannya tidak semua kota melanjutkan aksi ini secara rutin yang disebabkan oleh beberapa hal seperti pelarangan atau kesibukan dari inisiator di kota tersebut.

Setidaknya terdapat tiga faktor pembentuk Aksi Kamisan daerah. Pertama, diinisiasi oleh organisasi non-pemerintah seperti Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) milik KontraS. Kedua, diinisiasi langsung oleh keluarga korban pelanggaran HAM di daerah. Ketiga, peran media yang membawa pemberitaan dan isu-isu HAM dalam peliputannya telah memberi inspirasi hadirnya aksi damai di beberapa daerah (Yudistira & Husodo, 2021).

Sebagai aksi yang bersifat terbuka, tantangan terbesar Kamisan berasal dari rasa antusias peserta yang fluktuatif. Para peserta aksi menetapkan batasan sebanyak tiga peserta sebagai syarat digelar Kamisan. Setidaknya, Kamisan pernah dihadiri oleh delapan orang dalam dua kali penyelenggaraan aksi tersebut. Mobilisasi gerakan menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan yang perlu dihadapi, selain kerentanan bahwa Kamisan menjadi batu loncatan bagi beberapa oknum untuk aktif di politik praktis. Koordinasi yang lebih efektif antar jaringan di Jakarta dan daerah dapat memberikan tekanan yang lebih efektif kepada pemerintah dan menyuarakan tujuan dari aksi ini secara lebih tajam.

Tanpa hirarki garis komando yang formal Aksi Kamisan tetap terorganisir dengan baik, aksi ini bersifat terbuka membebaskan siapa pun untuk turut bergabung dan berkontribusi untuk membentuk opini publik dan membentuk sikap guna mempengaruhi keputusan negara dalam menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Efektivitas gerakan Kamisan tidak terpengaruh oleh jaringan anggota yang longgar. Format kepersertaan ini memungkinkan lebih banyak pendukung untuk terlibat dan berpartisipasi, baik secara langsung dalam aksi maupun melalui dukungan moral dan logistik. Fleksibilitas keanggotaan membawa pada perluasan wilayah dan pendukung aksi juga mengarah pada meluasnya advokasi isu-isu HAM.

Aksi Kamisan melibatkan interaksi berkelanjutan antara kelompok masyarakat sipil, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk elit dan penguasa. Empat aspek yang disoroti oleh konsep Tarrow tentang gerakan sosial dalam Aksi Kamisan tercermin dalam, pertama, aksi disusun melawan kelompok elit, tergambar dalam upaya peserta menyoroti dan menentang ketidakadilan dari pihak berwenang. Kedua, aksi dilakukan atas dasar tuntutan serupa terhadap lawan, yaitu keadilan dan penegakan hak asasi manusia. Ketiga, gerakan ini didorong oleh solidaritas di antara peserta, yang bersama-sama berjuang untuk tujuan yang sama. Terakhir, aksi kolektif Kamisan berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih besar, mencerminkan perjuangan berkelanjutan untuk perubahan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Aksi Kamisan telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama. Sejak pertama kali dimulai, gerakan ini konsisten mengadakan aksi setiap Kamis di depan Istana Negara, yang menunjukkan ketekunan dan komitmen mereka terhadap tujuan utama yaitu menuntut keadilan atas pelanggaran hak asasi manusia. Kontinuitas ini penting untuk menjaga momentum dan memastikan isu-isu HAM tetap menjadi perhatian publik dan pemerintah.

Selain konsistensi pada aktor yang terlibat, metode damai dan agenda atau isu yang diusung, Kamisan dapat terus bertahan sebab adanya nurani, perasaan kebaikan yang mendalam untuk membangun solidaritas yang kuat antara peserta aksi dalam mewujudkan perubahan. Tanpa nurani yang kuat untuk melawan ketidakadilan, agenda-agenda kemanusiaan yang diusung Kamisan akan jauh lebih sulit dicapai. Nurani ini juga menjadi penjaga bagi setiap peserta aksi untuk fokus pada perjuangan hak asasi manusia.

Kamisan telah membawa kesempatan masyarakat untuk mempengaruhi isu juga keputusan yang lebih transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk memenuhi hak para keluarga serta korban dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara dimasa lampau. Keluarga juga korban menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas, mendorong pemerintah agar tetap ingat dan bergegas menyelesaikan pekerjaan rumah yang terbengkalai bertahun-tahun tanpa hasil yang pasti.

Respon pemerintah dalam menyikapi aksi kamisan tercermin dalam dua bentuk reaksi. Pertama, merespon tuntutan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan dan tim untuk mempercepat penyelesaian kasus. Kedua, menolak utamanya ketika terdapat konflik kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan politik juga ekonomi. Dalam konteks Aksi Kamisan, pemerintah sering kali lebih cenderung menolak tuntutan dengan menggunakan berbagai cara administratif dan hukum. Hal ini mencerminkan adanya konflik kepentingan atau keengganan untuk mengakui serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu

Konflik kepentingan dalam Kamisan berujung pada impunitas. Melawan impunitas menjadi salah satu seruan yang terus disuarakan oleh Kamisan. Impunitas merujuk kepada situasi ketidakmungkinan untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses termasuk peradilan kriminal, sipil, administratif atau disipliner. Hal ini terjadi karena pelaku tidak dapat diadili atau dihukum sehingga tidak memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan atau penjatuan hukuman yang pantas. Impunitas juga menghambat upaya untuk memberikan reparasi kepada korban-korban mereka (KontraS, 2005).

KESIMPULAN

Aksi Kamisan memiliki tiga karakteristik utama gerakan, terorganisir, konsisten dan berkelanjutan hingga saat ini, serta memanfaatkan simbol-simbol gerakan sebagai identitas kelompok. Meskipun memiliki jaringan anggota yang longgar, gerakan ini tetap berhasil melaksanakan aksinya secara rutin dan efektif, menunjukkan daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi berbagai tantangan. Solidaritas yang kuat di antara para pendukungnya serta kemampuan untuk terus memobilisasi massa menjadi faktor kunci keberhasilan Aksi Kamisan dalam mempertahankan perhatian publik terhadap isu-isu HAM.

Meskipun dilakukan secara terorganisir dan memiliki identitas kolektif yang kuat, kamisan belum memberikan tekanan yang signifikan kepada pemerintah terkait penuntasan kasus-kasus HAM. Sebab, kemauan politik dan hukum untuk menindaklanjuti kasus-kasus HAM masih terbatas. Selain itu, mesti aksi ini secara berkala dilakukan setiap minggu, seringkali hilang ditengah isu-isu sosial politik yang lain. Tekanan yang diberikan kepada pemerintah menemui penolakan berupa kebijakan yang tidak memihak korban beserta keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalas, M. (2017). Lamenting Women, State Violence, and Human Security. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 13(1), 31–43.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital. *Kalijaga Journal of Communication*, 3(1), 17–30. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14421/kjc.31-02.2021>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- Djuyandi, Y., Siregar, M. M., & Muradi, M. (2021). Peran Suporter Sepakbola Sebagai Kelompok Penekan. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP)*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.17219>
- Haris, A., Rahman, A. B. H. A., & Ahmad, W. I. W. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal of Sociolog*, 1(1), 15–24.

- Hartati, A. Y. (2014). *Politik dan Pemerintahan Australia*. Wahid Hasyim University Press.
- KontraS. (2005). *Menolak Impunitas, Serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia* (1st ed.). KontraS.
- Pureklolon, T. T. (2016). *Komunikasi Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pureklolon, T. T. (2020). *Perilaku Politik Menelisik Perpolitikan Indonesia Sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Putra, A. M. R. (2020). Aktivisme Gerakan Aksi Kamisan Dalam Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia. *Epistemik*, 1(1), 85–98.
- Putranto, A. (2024). *Komunikasi Politik*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Rini, M. S. (2022). Kajian Yuridis Terhadap HAM: Timbulnya Aksi Kamisan Sebagai Representatif Peristiwa 1998-1999. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 7(4), 294–305.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22619>
- Rochadi, A. S. (2020). *Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial*. CV Rasi Terbit.
- Setara Institute. (2015). *Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*.
- Yudistira, A. (2022). *Sejarah Aksi Kamisan Jakarta: Gerakan Sosial Baru Tahun 2007-2021*. Universitas Andalas.
- Yudistira, A., & Husodo, P. (2021). Jalan Panjang Mencari Keadilan: Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007-2021. *Jurnal Ceteris Paribus*, 1(2), 1–10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jcp.v1i2.1-10.2022>
- Yunianty, A. R., Murlianti, S., & Nanang, M. (2021). Combatting Environmental Injustice: Social Hermeneutic Analysis of the Retextualization of the Jakarta Kamisan Action into Kaltim Kamisan Action. *4th International Confrenece on Future of Social Sciences*, 22–34. <https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/09/22-1132.pdf>
- Zakaria, D. (2022). Digital Citizenship and Social Movements: How the Aksi Kamisan Discourse on Human Rights Enforcement Issues on Social Media. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(1), 3416–3423. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4008>



Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban

Kintania Khoirun Nabila^{1*}, Muhammad Miftahul Huda¹, Sri Kasiami¹

¹Universitas Bojonegoro, 62119, Jawa Timur-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Mar 29, 2024

Diterima: Juni 25, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Accountability; Financial Assistance for Political Parties; Political Parties.

KORESPONDEN:

Kintania Khoirun Nabila
Universitas Bojonegoro

Email:

kintanianabilaa@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Khoirun Nabila, K., Miftahul Huda, M., & Kasiami, S. (2024). Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban. *Journal of Political Issues*. 6 (1); 46-58.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.211>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract Political parties act as organizations that are expected to be a forum for conveying aspirations regarding social problems that arise in society through legislative members at the Regency or Regency DPRD level. In carrying out their various activities, political parties have three financial sources, namely contributions from party members, legally authorized donations, and financial assistance originating from the APBN/APBD. In 2022, the three political parties that will receive the largest financial assistance in Tuban Regency are PKB, Golkar Party and PDI Perjuangan. The three political parties use financial assistance for political education and funding for secretariat operations for one year. This research aims to describe the accountability of political parties in Tuban Regency in managing financial assistance. This research uses a descriptive qualitative approach with primary and secondary data sources. The results of the research show that the Political Party Financial Assistance program in Tuban Regency in 2022 is still not fully accountable. There is compatibility between implementation and standard procedures. Implementation has gone well, starting from determining the nominal amount of financial assistance, collection deadlines to the format of accountability reports in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 78 of 2020. There are sanctions stipulated for errors or omissions in implementation that are not running, there are no sanctions or penalties for late submission of financial aid accountability reports. The existence of measurable output and outcomes does not work optimally. The output is the implementation of various political education activities and the operations of the secretariat office have been carried out. Meanwhile, the outcome is nil, there are no follow-up activities from political education.

Abstrak Partai politik berperan sebagai organisasi yang diharapkan menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi dari permasalahan sosial yang timbul di masyarakat melalui anggota legislatif di tingkat Kabupaten atau DPRD Kabupaten. Dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya, partai politik memiliki tiga sumber keuangan, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi secara hukum, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Tahun 2022, tiga partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan terbesar di Kabupaten Tuban yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Ketiga partai politik tersebut menggunakan bantuan keuangan untuk Pendidikan politik dan pembiayaan Operasional sekretariat selama satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Tuban dalam mengelola bantuan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Tuban tahun 2022 masih belum sepenuhnya akuntabel. Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan telah berjalan dengan baik, mulai dari penetapan nominal bantuan keuangan, batas waktu pengumpulan hingga format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Adanya Sanksi yang Ditetapkan Atas Kesalahan atau Kelalaian Dalam pelaksanaan tidak berjalan, tidak adanya sanksi atau hukuman dari keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur tidak berjalan maksimal. Outputnya yaitu terselenggaranya berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor sekretariat telah terlaksana. Sedangkan outcomenya nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik.

TENTANG PENULIS:

Kintania Khoirun Nabila, Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro yang sedang menyelesaikan tugas akhir untuk persyaratan kelulusan S-1.

Muhammad Miftahul Huda, Menyelesaikan studi S-2 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini merupakan Dosen di Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro.

Sri Kasiami, menyelesaikan studi S-2 di Universitas Wijaya Putra. Saat ini merupakan Dosen di Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro.

PENDAHULUAN

Partai politik telah ada di Indonesia sejak masa sebelum kemerdekaan, yang dibentuk sebagai tempat bagi para pemuda dalam skala nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada abad ke-19, partai politik berkembang dengan cepat karena didukung oleh legitimasi legal-rasional (Fitriyah, 2018). Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara (Indonesia, 2011). Tujuan partai politik tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi anggotanya dalam kegiatan politik, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai etika dan budaya politik dalam kehidupan sosial. Partai politik menggunakan seluruh sumber daya keuangannya guna memperebutkan hati masyarakat dan meraih kemenangan dalam pemilu demi mendapatkan kursi sebanyak mungkin di tingkat legislatif (Natasyah, 2019).

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki sistem di mana partai politik memiliki peran sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah (Sinaga, 2017). Hal tersebut sesuai dengan salah satu peran partai politik, yaitu sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Selain itu, partai politik dapat menjadi sarana bagi individu yang ingin terlibat dalam penyelenggara pemerintahan, terutama di tingkat eksekutif dan legislatif. Partai politik memberikan pengaruhnya dalam perumusan kebijakan yang akan diterapkan di pemerintahan setelah memperoleh kekuasaan (Nahuddin, 2015). Peran lain partai politik bagi masyarakat adalah menyelenggarakan pendidikan politik untuk mendorong terwujudnya demokrasi yang berkualitas, meningkatkan pemahaman tentang politik, dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu setiap lima tahun sekali. Partai politik sebagai organisasi tentu memiliki fungsi, tujuan, kewajiban, hak dan kegiatan politik yang mencakup pendidikan politik, operasional sekretariat kaderisasi dan konsolidasi, aksi publik, perjalanan dinas, dan kampanye (Nafriyulita, 2016). Tujuan pendidikan politik selain untuk masyarakat luas, juga untuk pembenahan anggota partai politik secara keseluruhan (Sukma, 2021).

Peraturan mengenai partai politik di Indonesia dijelaskan dalam UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam menjalankan berbagai kegiatan politik dan biaya operasional kantor sehari-hari, partai politik memiliki tiga sumber keuangan yang diakui negara, yaitu iuran dari anggota partai, sumbangan yang resmi, dan bantuan keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, partai politik memerlukan dana yang besar agar mesin politiknya berfungsi secara optimal untuk menarik suara pemilih dan memenangkan pemilu (Nahuddin, 2015). Pedoman yang digunakan dalam proses perhitungan hingga pelaporan bantuan keuangan partai politik adalah Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ([Kementerian Dalam Negeri, 2020](#)).

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD ([Indonesia, 2011](#)). Regulasi yang mengatur bantuan keuangan untuk partai politik adalah PP Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ([Indonesia, 2018](#)). Pasal 5 ayat (6) peraturan tersebut menjelaskan, bagi Pemerintah Kabupaten/Kota besaran bantuan keuangan Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah anggaran tahun berjalan, apabila besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500 per suara sah. Pasal 5 ayat (7) juga menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bisa meningkatkan besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten/Kota sejalan dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 5 tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Pasal 3 ayat (2), jumlah bantuan keuangan untuk partai politik sebesar Rp. 2.500 per suara sah. Pada tahun 2023, bantuan keuangan meningkat menjadi Rp. 5.000 per suara sah sesuai dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 6 tahun 2023.

Tiga penerima bantuan keuangan partai politik terbesar di Kabupaten Tuban sejak pemilihan umum 2019 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), dan PDI Perjuangan (PDIP). Diketahui, ketiga partai tersebut merupakan partai yang mendominasi dan berlomba-lomba dalam meraih suara masyarakat. Penetapan tingkatan bantuan keuangan berdasarkan hasil dari pemilihan umum terakhir dengan perolehan kursi legislatif terbanyak. Untuk itu, yang membedakan total bantuan keuangan yang diterima Partai Politik setiap tahunnya adalah peraturan mengenai besaran dana bantuan per suara sah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tuban. Pada tahun 2022, PKB dengan perolehan suara 191.173 dikalikan dengan Rp. 2.500 per suara, jumlah bantuan keuangan yang diperoleh yaitu Rp. 477.932.500, Partai Golkar dengan 111.816 suara dikalikan Rp. 2.500 per suara berjumlah Rp. 279.540.000, dan PDIP total 78.917 suara dikalikan Rp. 2.500 per suara memperoleh Rp. 197.292.500. Sedangkan pada tahun 2023, PKB, Partai Golkar, dan PDIP dengan jumlah suara sah yang sama dikalikan dengan Rp. 5.000 masing-masing berjumlah Rp. 955.865.000 untuk PKB, Rp. 559.080.000 untuk Partai Golkar, dan Rp. 394.585.000 untuk PDIP.

Dalam mengelola bantuan keuangan, terutama di Kabupaten Tuban, prinsip utama yang diperlukan partai politik adalah transparansi dan akuntabilitas melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban individu maupun organisasi untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kewenangan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam ([Sinaga, 2017](#)). Dalam kehidupan badan atau organisasi publik, akuntabilitas merupakan suatu mesin profesional yang harus selalu berfungsi dalam pengawasan keterbukaan agar dapat meraih kepercayaan publik terhadap organisasi publik tersebut ([Latif et al., 2022](#)). Salah satu upaya mencegah dan mengurangi penyalahgunaan dana publik berupa bantuan keuangan bagi partai politik yaitu dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan prinsip akuntabilitas pada partai politik untuk memastikan adanya tanggung jawab selama proses penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan tidak bertentangan dengan etika ([Supriyanti & Prabhawati, 2021](#)).

Bantuan keuangan yang cukup besar dan bersumber dari APBD Kabupaten Tuban tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Partai Politik, untuk pendidikan politik dan kebutuhan sekretariat. Kedua kegiatan tersebut merupakan komponen utama laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang wajib disampaikan partai politik setahun sekali. Namun, tidak semua kegiatan pendidikan politik berdampak bagi anggota partai politik maupun masyarakat. Akuntabilitas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan masih

rendah karena kegiatan yang dilaksanakan terkesan formalitas belaka, cenderung hanya menggugurkan kewajiban, khususnya dalam melaksanakan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat (Abadi, 2020). Selain itu, partai politik dapat dikenai sanksi apabila tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik berupa penghentian bantuan keuangan di tahun anggaran yang sama. Pelaksanaan bantuan keuangan di Kabupaten Klaten belum berjalan dengan baik karena ada beberapa partai politik penerima bantuan keuangan yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan (Atmoko, 2015). Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban berimbas terhadap perencanaan kinerja dan realisasi pencairan dana bantuan tersebut oleh Bakesbangpol Kota Pekanbaru, dan menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas penggunaan keuangan daerah oleh partai politik yang duduk di kursi DPRD Kota Pekanbaru (Ratnasari et al., 2022).

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Studi Pada Partai Politik Di Salatiga)” oleh Daniel Parsaoran Sinaga (2017) menyimpulkan bahwa kurangnya akuntabilitas partai politik di Salatiga dalam mengelola bantuan keuangan dan tidak memprioritaskan bantuan keuangan untuk pendidikan politik. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan atau regulasi yang menyatakan prioritas bantuan keuangan partai politik adalah untuk pendidikan politik bagi kader dan anggota partai politik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Oka Counstanta Natasyah menggunakan teori Ramlan Subakti yang berjudul “Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik” memperoleh hasil bahwa tertutupnya akses terhadap laporan keuangan DPD Partai Golkar Kota Surabaya dan pengalokasian dana bantuan keuangan tidak dirinci terhadap sub-sub pengeluarannya.

Laporan keuangan partai politik harus diperiksa oleh akuntan publik dan diumumkan kepada publik, baik yang terkait dengan laporan keuangan kampanye maupun laporan keuangan dari bantuan pemerintah (Natasyah, 2019). Dengan demikian, partai politik harus melaporkan kegiatannya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Akuntabilitas dilakukan kepada publik karena bantuan keuangan partai politik berasal dari dana pemerintah, baik APBN maupun APBD (Widayanti et al., 2023). Harapan masyarakat dalam membangun kepercayaan suaranya terhadap partai politik yang dipilih adalah melalui transparansi dan akuntabilitas (Latif et al., 2022). Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana partai politik dalam mengelola bantuan keuangan yang berasal dari APBD beserta penggunaannya. Hal tersebut yang mendorong peneliti melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan bantuan keuangan di Kabupaten Tuban.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban menggunakan perpektif akuntabilitas. Indikator akuntabilitas menurut Dadang Solihin terdiri dari tiga aspek, di antaranya : 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, 2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan 3. Adanya output dan outcome yang terukur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk menggambarkan data berupa skema, gambar, dan kata. Data yang terkumpul dalam metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan bentuk kata dan gambar, sehingga tidak berfokus pada angka semata (Sugiyono, 2018). Informan pada penelitian ini adalah Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban. Informan lainnya yaitu tiga partai politik Kabupaten Tuban yang memiliki dana bantuan keuangan politik terbesar tahun 2022, PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Lokasi penelitian ini adalah di DPC PKB, DPD Partai Golkar, dan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui triangulasi atau gabungan dari beberapa teknik. Untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda (Sugiyono, 2018). Pertama, yaitu observasi dengan mengamati dan mencatat yang ada di lokasi penelitian. Kedua, wawancara yang dilakukan melalui pertemuan langsung dengan informan. Ketiga, studi dokumen dengan melibatkan dokumen-dokumen seperti jurnal, artikel, dan peraturan hukum yang relevan.

Teknik analisis data adalah suatu teknik yang dilakukan, dalam proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan yang berada di lapangan maupun dokumentasi (Widayanti et al., 2023). Tiga tahapan analisis data yang dilakukan adalah menurut Miles and Huberman (2014), yaitu reduksi data dengan merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, display atau penyajian data dengan bentuk uraian dan deskripsi, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan didukung bukti-bukti yang valid (Sugiyono, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas bantuan keuangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban diukur dengan tiga indikator teori Akuntabilitas menurut Dadang Solihin (2007), yaitu Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan, Adanya Sanksi Yang Ditetapkan Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pelaksanaan Kegiatan, dan Adanya Output dan Outcome Yang Terukur.

Adanya Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban yang berasal dari APBD dan dialokasikan setiap tahun yang menjadi bukti bahwa partai politik telah melaporkan seluruh kegiatannya yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat akuntabilitas partai politik dalam mengelola bantuan keuangan untuk kegiatan partai selama satu tahun. Besaran bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban tahun 2022 adalah Rp. 2.500 per suara sah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2022). Untuk tahun 2023 sebesar Rp. 5.000 per suara sah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 (Pemerintah Kabupaten Tuban, 2023). Jumlah yang cukup banyak tersebut tentu mempunyai tanggung jawab yang besar dan memerlukan pelaporan yang akurat. Dalam proporsi penggunaan bantuan keuangan yang diterima partai politik, 60% tetap dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik, lalu 40% untuk biaya operasional sekretariat. Partai politik diharuskan menyertakan rencana pemakaian dana bantuan sebagai syarat penerimaan bantuan keuangan yang memuat setidaknya 60% dari total bantuan yang diberikan untuk kegiatan pendidikan politik (Tangkere et al., 2022).

Menurut sekretariat dari PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan yang merupakan tiga penerima Bantuan keuangan Kabupaten Tuban terbesar selama 5 tahun terakhir, penyusunan laporan pertanggungjawaban partai politik sudah sesuai dengan regulasi, yaitu 60% untuk Pendidikan politik, dan 40% untuk kegiatan operasional kantor. Selain itu, ketiga partai politik tersebut kompak menyebutkan bahwasanya pencairan dana bantuan keuangan sering kali telat atau melewati batas ketentuan yang mengakibatkan para partai politik menggunakan dana dari sumber yang lain, seperti kas yang dimiliki partai politik. PKB, Golkar, dan PDIP juga mengatakan bahwa kendala utama penyusunan laporan pertanggungjawaban adalah nota yang terselip, kuitansi yang hilang. Untuk itu, nota dan kuitansi kegiatan harus disimpan dengan baik agar tidak menjadi kendala dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.

Gambar 1. Alur Pelaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik



Sumber : (Bakesbangpol Kota Malang, 2024)

Standar prosedur pelaksanaan pengumpulan laporan pertanggungjawaban partai politik dari bantuan keuangan yang telah digunakan adalah akhir bulan Januari atau satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban menyatakan selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Bantuan keuangan untuk partai politik tidak akan berjalan dengan maksimal apabila organisasi yang melaksanakannya tidak mampu mengelola dana bantuan dengan efektif sesuai peraturan yang telah ditetapkan (Lestari et al., 2022).

Adanya Sanksi Yang Ditetapkan Atas Kesalahan Atau Kelalaian Dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang melibatkan publik, diperlukan aturan atau regulasi tertulis untuk memberikan batasan terkait apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan demi tercapainya tujuan kegiatan. Begitu pun pelaksanaan program Bantuan Keuangan Politik yang memiliki persyaratan dan larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh partai politik agar proses pemberian bantuan keuangan tersebut tidak terhambat. Apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu partai politik akan berdampak bagi partai politik yang lain, yakni keterlambatan dalam pemberian bantuan keuangan. Hal tersebut terjadi karena pemberian bantuan keuangan politik dilaksanakan jika seluruh partai politik tingkat Kabupaten Tuban telah mengajukan proposal beserta persyaratan pendukung lainnya.

Tidak adanya sanksi atau hukuman khusus apabila terdapat partai politik yang telat mengumpulkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sesuai yang ditetapkan oleh regulasi, yaitu satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Keleluasaan inilah yang menjadi alasan mengapa partai politik terkesan tidak takut untuk terlambat dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Padahal, bantuan keuangan yang diberikan pemerintah sangat penting penggunaannya bagi partai politik. Oleh sebab itu, partai politik Kabupaten Tuban bersaing untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya pada saat pemilihan umum, karena mempengaruhi besar kecilnya bantuan keuangan yang diberikan untuk partai politik.

PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan menyatakan bahwa tidak pernah terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Tiga partai politik tersebut menyampaikan selalu patuh dan taat pada regulasi terkait laporan pertanggungjawaban mulai dari waktu pengumpulan sampai dengan formatnya. Tidak ada perubahan yang signifikan terhadap format laporan pertanggungjawaban dari tahun ke tahun. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan juga mengaku bahwa laporan pertanggungjawaban dari masing-masing partai

disetujui tanpa adanya catatan khusus. Karena, apabila terdapat salah satu bukti pendukung seperti nota atau kuitansi hasil pembelanjaan kurang atau tidak ada, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengembalikan laporan pertanggungjawaban ke partai politik yang bersangkutan untuk dibenahi.

Oleh karena itu, diperlukan sanksi atau hukuman yang membuat partai politik agar tidak mengulangi kesalahannya. Kesalahan sekecil apapun akan berdampak bagi proses pemberian bantuan keuangan politik. Tidak hanya bagi partai politik yang melakukan kesalahan saja, tapi juga berdampak bagi partai politik lain yang dapat menghambat proses pemberian bantuan keuangan politik, dan kemungkinan terburuk juga pencairannya terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Belum adanya regulasi yang mengatur sanksi keterlambatan dan pergantian pengurus partai politik merupakan faktor penghambat penyampaian laporan oleh partai politik (Ratnasari et al., 2022). Pemberlakuan sanksi atau hukuman bisa secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, sampai dibatalkannya bantuan keuangan politik. Tidak adanya sanksi yang diterima oleh PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban dalam penyampaian pertanggungjawaban menjadi salah satu faktor bahwa partai tersebut telah akuntabel dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik.

Adanya Output Dan Outcome Yang Terukur

Output dan outcome tidak dapat dihindarkan dalam suatu kegiatan, terlebih pada program yang telah menggunakan dana publik dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Output merupakan keluaran atau hasil langsung yang dapat dirasakan manfaatnya dalam program atau kegiatan dalam jangka waktu dekat. Sedangkan outcome adalah efek atau manfaat jangka panjang dari suatu program atau kegiatan yang dapat berkembang dan berkelanjutan. Output dan outcome didapat apabila program atau kegiatan telah terlaksana. Dalam program bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban, partai politik diminta untuk merencanakan kegiatan yang akan terlaksana dalam satu tahun dengan dana dari APBD. Setelah berakhirnya tahun anggaran, berbagai kegiatan yang didanai dari APBD tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan nominalnya.

Output dari bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban adalah terselenggaranya kegiatan Pendidikan politik seperti sarasehan dan musyawarah Tingkat Desa maupun Kecamatan yang menghadirkan masyarakat. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan berpolitik masyarakat dan juga sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan suara masyarakat terkait apa saja yang sedang dibutuhkan saat ini, permasalahan apa saja yang sedang dihadapi masyarakat, yang diharapkan partai politik hadir sebagai perantara untuk membantu menyampaikan tuntutan dari masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Tuban. Output lain dari bantuan keuangan partai politik adalah biaya operasional kantor yang jelas dan nyata, mulai dari keberadaan kantor sekretariat yang aktif dan berfungsi dan biaya sewa per tahun, pembelian alat tulis kantor (ATK), rapat internal, transport perjalanan dinas, pengadaan peralatan kantor, dan honor pegawai yang berada di sekretariat. Tidak hanya itu saja, biaya operasional lainnya seperti langganan telepon, air, listrik, jasa pos atau giro, media cetak, pemeliharaan data dan peralatan kantor secara elektronik dan manual selama satu tahun juga termasuk ke dalam bantuan keuangan partai politik.

PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan turut menyampaikan berbagai kegiatan pendidikan politik dan operasional kantor yang telah terlaksana sebagai output dari bantuan keuangan partai politik. Kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Tuban berlokasi di Jalan Basuki Rahmat, 245 A, Tuban telah melaksanakan 13 kegiatan pendidikan politik selama tahun anggaran 2022 dengan lokasi yang berbeda-beda.

Tabel 1. Kegiatan Pendidikan Politik Partai Golkar Kabupaten Tuban Tahun 2022

Kegiatan	Waktu
Kintania Khoirun Nabila, Muhammad Miftahul Huda, Sri Kasiami Akuntabilitas Bantuan Keuangan Partai Politik (PKB, Partai Golkar, dan PDIP) di Kabupaten Tuban	

Kegiatan Pengukuhan PimCat Se-Kab. Tuban Serta Pendidikan Politik	12 Februari 2022
Kegiatan MusCamLub Kec. Widang	05 Maret 2022
Kegiatan Jalan Sehat Dalam Rangka HUT Partai Golkar Ke-58	16 Oktober 2022
Kegiatan Sarasehan dan Tasyakuran Dalam Rangka HUT Partai Golkar Ke-58	23 Oktober 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Tambakboyong	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Jenu	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Jatirogo	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Tuban	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Montong	26 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Kerek	27 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Merakurak	27 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Rengel	27 November 2022
Kegiatan MusCam/MusLur Partai Golkar di Kec. Semanding	27 November 2022

Sumber : DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban

Kegiatan pendidikan politik Partai Golkar selama tahun 2022 yang meliputi Pengukuhan PimCat (Pimpinan Kecamatan), Sarasehan, MusCamLub (Musyawarah Kecamatan Luar Biasa), MusCam (Musyawarah Kecamatan), dan MusLur (Musyawarah Kelurahan) menyebar di berbagai wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban. Terdapat 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban, tetapi Partai Golkar hanya melaksanakan pendidikan politik di 10 Kecamatan, sisanya tidak tercakup. Pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar tidak diselenggarakan rutin setiap bulan selama tahun 2022, tetapi di bulan-tertentu menyesuaikan kebutuhan partai dengan rata-rata peserta yang hadir 50 orang termasuk masyarakat umum dan kader Partai Golkar. Musyawarah tingkat Desa dan Kecamatan yang diadakan Partai Golkar bertempat di rumah-rumah kader-kader partai untuk meningkatkan keakraban antar kader partai dan sebagai wadah silaturahmi dengan masyarakat yang juga diisi dengan materi pendidikan politik yang menambah pengetahuan dan wawasan kader Partai Golkar dalam berpolitik sesuai tema yang telah tersedia.

Operasional kantor sekretariat Partai Golkar yang bersumber dari Bantuan Keuangan Partai Politik penggunaannya untuk berbagai kebutuhan operasional sekretariat mulai dari langganan listrik, air, telepon, internet, surat kabar atau koran, air minum, yang dibayarkan setiap bulan. Kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban aktif, dengan halaman yang luas dan terdapat beberapa kendaraan dinas yang terparkir. Dilengkapi dengan ruangan berupa aula yang digunakan sebagai tempat pertemuan atau rapat internal petinggi partai dengan stafnya. Beberapa kegiatan politik juga bertempat di aula tersebut dengan peralatan dan perlengkapan seperti meja, kursi, lampu yang berfungsi dengan baik. Terdapat beberapa penjaga dan administrator yang mengelola kantor sekretariat dan melayani keperluan masyarakat yang honornya juga berasal dari bantuan keuangan. Sehingga, output dari Bantuan keuangan partai politik Kabupaten Tuban pada Partai Golkar adalah terselenggaranya pendidikan politik dan operasional sekretariat yang aktif.

Tidak jauh berbeda dengan partai politik lainnya, lokasi kantor sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan adalah di Jalan Teuku Umar No. 25, Latsari,

Kecamatan dan Kabupaten Tuban berfungsi dan aktif melayani keperluan masyarakat yang berhubungan dengan partai. Diketahui, kantor tersebut diresmikan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan bangunan dua lantai dan dominan berwarna merah. PDI Perjuangan merupakan penerima bantuan keuangan partai politik terbesar nomor tiga, setelah PKB dan Partai Golkar sejak pemilihan umum tahun 2019.

Tabel 2. Kegiatan Pendidikan Politik PDI Perjuangan Kabupaten Tuban Tahun 2022

Kegiatan	Waktu
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	27 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	28 Februari 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	03 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	03 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	03 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	03 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	05 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	05 Maret 2022
Dialog Interaktif (Konsolidasi Persiapan Verifikasi Parpol)	06 Maret 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	04 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	04 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	11 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	11 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	12 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	12 Juni 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	25 Juni 2022

Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	20 Agustus 2022
Dialog Interaktif dan Rapat DPC Diperluas	21 Agustus 2022
Sarasehan Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila	01 Juni 2022
Sarasehan Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI Ke-77	17 Agustus 2022
Sosialisasi Pembentukan Pengurus DPD DPC Repdem	27 Maret 2022
Sosialisasi Hasil Rakernas II PDIP	06 Juli 2022
Sosialisasi Hasil Rapat DPD PDIP Jawa Timur	23 Juli 2022

Sumber : DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban memaksimalkan kegiatan pendidikan politik tahun anggaran 2022 pada Dialog Interaktif, Sarasehan, dan Sosialisasi yang merata ke seluruh Kecamatan di Tuban. Tidak hanya dihadiri kader partai, tetapi juga turut mengundang masyarakat sebagai ajang musyawarah untuk mendiskusikan berbagai permasalahan sosial yang sedang dihadapi masyarakat dengan rata-rata 100 peserta yang hadir. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik PDI Perjuangan tidak selalu dilakukan setiap bulan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan partai. Fokus kegiatan pendidikan politik tahun 2022 PDI Perjuangan yakni persiapan menuju pemilihan umum tahun 2024 yang berlangsung pada 14 Februari. Tempat pelaksanaan kegiatan tersebut di masing-masing rumah Pengurus Anak Cabang (PAC) seluruh Kecamatan yang telah disepakati bersama.

Gedung DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban yang terdiri dari dua lantai dengan halaman yang luas. Operasional kantor sekretariat tersebut digunakan untuk berlangganan listrik, air, telepon, surat kabar atau koran, internet per bulannya. Terdapat meja, kursi, dan lampu yang berfungsi dengan baik, kemudian di lantai dua digunakan untuk rapat internal atau ruang pertemuan. Terdapat beberapa penjaga dan administrasi yang setiap hari berada di kantor sekretariat. Pengeluaran biaya operasional kantor lainnya adalah pemeliharaan data berupa arsip untuk kebutuhan sekretariat. Terlaksananya pendidikan politik dan operasional kantor dari PDI Perjuangan merupakan bukti bahwa terdapat output dari Bantuan Keuangan Partai Politik.

Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Tuban terletak di Jalan Raya Bogorejo No. 10, Merakurak, Tuban aktif dan berfungsi. Tidak seperti kedua partai sebelumnya, PKB tidak menyebutkan secara pasti kegiatan pendidikan politik apa saja yang telah terlaksana selama tahun 2022. Staf dari PKB menyebut kegiatan pendidikan politik hanya dilakukan di bulan-bulan tertentu, bisa satu bulan lebih dari dua kali, bisa juga dua bulan sekali. Secara garis besarnya, kegiatan pendidikan politik PKB meliputi Seminar, Sarasehan, Sosialisasi, dan Kaderisasi yang dilakukan menyebar di tingkat Kecamatan dengan rata-rata peserta yang hadir 100 orang. Tema yang digunakan dalam kegiatan tersebut mulai dari Pendalaman mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat.

Biaya operasional kantor sekretariat DPC PKB Kabupaten Tuban selain untuk honor administrator yang berada di sekretariat, juga diperuntukkan berlangganan listrik, air, internet, surat kabar atau koran, air minum setiap bulan. Gedung yang berada di area ruko tersebut memiliki halaman yang luas, tidak terdapat penjaga dan hanya satu administrator di kantornya. Lampu, meja, dan kursi juga berfungsi dengan baik. Sekretariat PKB juga bersebelahan dengan Rumah Aspirasi salah satu Calon Legislatif partai tersebut. Untuk pemeliharaan data berupa arsip kantor tidak tersedia, dibuktikan dengan tidak adanya salinan Laporan Pertanggungjawaban atau hanya ingin menghindari masyarakat yang bertanya. Terlepas

permasalahan tersebut, output Bantuan Keuangan Partai Politik pada PKB yang berupa Pendidikan Politik dan Operasional Kantor telah digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam suatu kegiatan atau program yang terselenggara, terdapat hasil yang dapat bermanfaat bagi jangka panjang dan berkelanjutan yang disebut outcome. Hasil tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari output atau keluaran dari suatu program. Akan tetapi, jika tidak terdapat kegiatan yang berkelanjutan dari output yang telah dihasilkan, maka outcome dari suatu program tersebut nihil. Seperti halnya dengan program Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban yang seharusnya memberikan output, outcome, dan impact kepada masyarakat karena telah didanai dari APBD yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar dari Pajak Daerah. Berbanding terbalik, tiga partai politik penerima program Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban terbesar tahun 2022, yaitu PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan yang memiliki output yaitu terselenggaranya kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat tidak memiliki outcome. Kegiatan Pendidikan politik ketiga partai hanya terbatas pada acara semata, tidak adanya kegiatan lanjutan yang bermanfaat bagi para kader masyarakat yang telah diikutsertakan. Dengan demikian, pengetahuan yang didapat selama pendidikan politik hanya sebatas teori, tanpa adanya aksi dan tindakan nyata.

KESIMPULAN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tuban menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik setiap tahunnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa, Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD. Laporan pertanggungjawaban dibuat untuk melaporkan dan memberitahukan kepada publik mengenai program dan kegiatan partai politik selama satu tahun meliputi kegiatan pendidikan politik sebesar 60% dan kegiatan operasional sekretariat sebesar 40% dari jumlah keseluruhan dana bantuan keuangan, dalam hal ini ketiga partai tersebut juga telah menerapkan proporsi penggunaan bantuan keuangan sesuai dengan peraturan. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban juga tidak pernah terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

Output dari PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan Kabupaten Tuban dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik yaitu terselenggaranya Kegiatan Pendidikan Politik dan Pembiayaan Operasional Kantor Sekretariat telah terlaksana dengan baik dan maksimal. PKB, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan menyelenggarakan kegiatan tersebut menyebar ke tingkat Kecamatan dan Desa. Untuk operasional kantor sekretariat partai, tiga partai tersebut menggunakan dana bantuan untuk berlangganan listrik, air, internet, surat kabar atau koran, dan honor untuk penjaga dan administrator yang berada di sekretariat. Sedangkan outcome dari program Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Tuban nihil, tidak adanya kegiatan lanjutan dari pendidikan politik. Sehingga, kegiatan pendidikan politik terbatas pada acara saja, dan manfaatnya pun hanya menjadi ingatan semata karena tanpa implementasi yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, S. A. (2020). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 328–340. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p328-340>

- Atmoko, L. S. (2015). *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Klaten* [Universitas Gadjah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79145>
- Bakesbangpol Kota Malang. (2024). *Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*. <https://bakesbangpol.malangkota.go.id/7938-2/>
- Fitriyah, D. N. (2018). *Pendidikan Politik Kader Partai Di Indonesia (Studi Kasus Pendidikan Kader Pratama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163724>
- Indonesia, R. (2011). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>
- Indonesia, R. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/64525/pp-no-1-tahun-2018>
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163283/permendagri-no-78-tahun-2020>
- Latif, I. R., Ikhsan, Afriandi, F., Saputra, A., & Sri Lestari, Y. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Partai Politik Lokal Aceh. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1790>
- Lestari, N. P., Djohan, D., & Nurdin, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4640–4665. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9006>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. <https://eric.ed.gov/?q=+The+Sage+book+of+Qualitative+Research+&id=ED565763>
- Nafriyulita, M. (2016). *Politik Hukum Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik Oleh Negara* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/3978>
- Nahuddin, Y. E. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(2), 276–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v6i2.1462>
- Natasyah, O. C. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi DPD Partai Golkar Kota Surabaya Terhadap Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik. *Jurnal Politik Muda*, 7(3), 93–107. <https://journal.unair.ac.id/JPM@penerapan-prinsip-akuntabilitas->

[dan-transparansi-dpd-partai-golkar-kota-surabaya-terhadap-pengelolaan-bantuan-keuangan-partai-politik-article-12527-media-80-category-80.html](https://doi.org/10.24014/je.v4i1.14388)

- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2022). *Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun 2022*. <https://jdih.tubankab.go.id/peraturan/detail/1577>
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2023). *Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun 2023. In Pemerintah Kabupaten Tuban*. <https://jdih.tubankab.go.id/peraturan/detail/1932>
- Ratnasari, S., Syahril, A., & Syam, A. (2022). Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. *Eksekusi: Journal of Law*, 4(1), 53–70. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v4i1.14388>
- Sinaga, D. P. (2017). *Akuntabilitas Dana Bantuan Keuangan Partai Politik (Studi Pada Partai Politik di Salatiga)* [Universitas Kristen Satya Wacana]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26835>
- Solihin, D. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung: Bappenas
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma, S. M. (2021). Problematika Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(27), 1463–1472. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/27>
- Supriliyani, N. W., & Prabhawati, N. P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekretariat Partai Demokrasi Perjuangan Gianyar Dan Klukung Provinsi Bali. *Jurnal Niara*, 14(1), 250–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.5346>
- Tangkere, G. M., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2022). Efektivitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2018). *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 17(3 MDK), 995–1006. <https://doi.org/https://doi.org/10.35.791/agrsosek.17.3%20MDK.2021.37510>
- Widayanti, W., Priyadi, M. P., & Ardini, L. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Pada Laporan Keuangan Partai (Studi Kasus di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 135–156. <https://doi.org/https://doi.org/1035591/wahana.v22i2.170>



Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Citizens in Mindanao

Firsta Falah Hayanda^{1*}, Nur Azizah¹

¹Department of International Relations, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 55183, Yogyakarta-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Mei 22, 2024

Diterima: Juni 20, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Consulate General; Indonesia; Illegal Smuggling; Mindanao; Stateless.

KORESPONDEN:

Firsta Falah Hayanda

Department of International Relations,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Email:

fhayanda05@gmail.com

SITASI CANTUMAN:

Hayanda, F. F., & Azizah, N. (2024). Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Citizens in Mindanao. *Journal of Political Issues*. 6 (1); 59-71.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.247>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.247>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract In 2016, the Indonesian Consulate General in Davao and UNHCR registered 8,745 Persons of Indonesian Descents (PIDs). Furthermore, 2,399 of them have been confirmed as Indonesian citizens. Since 2020-2023, there have been approximately 30 cases experienced by the Indonesian diaspora in Mindanao such as criminal acts and lack of documents for Indonesian citizens. This research aims to analyze how the Indonesian Consulate General in Davao's efforts to provide legal protection to the Indonesian diaspora in Mindanao. This research uses a qualitative method by collecting secondary data from literature studies such as books, journal articles, websites, reports, and another research. The findings of this study show that the Indonesian Consulate General in Davao in providing assistance on various legal issues, offers legal assistance to Indonesian citizens involved in various criminal and civil cases by providing or arranging the services of lawyers. The Indonesian Consulate General in Davao also cooperates with the Philippine Department of Justice (DOJ), with the assistance of UNHCR Philippines in order to provide legal identity to undocumented Indonesian citizens.

Abstrak Pada tahun 2016, Konsulat Jenderal RI Davao dan UNHCR telah mendaftarkan 8.745 Orang Keturunan Indonesia (PID). Selanjutnya, 2.399 orang di antaranya telah dikonfirmasi sebagai WNI. Sejak tahun 2020-2023, terdapat kurang lebih 30 kasus yang dialami oleh diaspora Indonesia di Mindanao seperti tindakan kriminal dan kekurangan dokumen bagi WNI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya KJRI Davao dalam memberikan perlindungan kepada diaspora Indonesia di Mindanao. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari studi literatur seperti buku, artikel jurnal, website, laporan, dan penelitian lainnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa KJRI Davao dalam memberikan pendampingan terhadap berbagai permasalahan hukum, menawarkan bantuan hukum kepada WNI yang terlibat dalam berbagai kasus pidana dan perdata dengan menyediakan atau mengatur jasa pengacara. KJRI Davao juga bekerja sama dengan Departemen Kehakiman (DOJ) Filipina, dengan bantuan UNHCR Filipina dalam rangka memberikan identitas legal kepada WNI yang tidak berdokumen.

TENTANG PENULIS:

Firsta Falah Hayanda, the author is currently pursuing a Bachelor's degree in International Relations at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nur Azizah, the author earned her doctorate in political science from Gadjah Mada University in Yogyakarta. Her research focuses on gender issues and Indonesian migrant workers. She is currently a lecturer at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

INTRODUCTION

Around the 17th century, the migration of Sangihe and Talaud residents to the Philippines coincided with the Dutch colonial presence in Indonesia (Wuryandari & Raharjo, 2019).

Because of their language and origins in North Sulawesi, Indonesians are referred to as "Sangir/Marore" and are found living among the indigenous people in South Cotabato province in southern Mindanao, namely General Santos City (formerly Dadiangas), Davao del Sur, and Sarangani. These areas are very close to the Sulawesi Island chain in northeastern Indonesia, home to people who have historically dared to take big risks to sail and live in southern Mindanao (Talampas, 2015). In 2004, the number of Indonesian citizens from Sangir and Talaud in Southern Mindanao was around 7,946 people (Putri, 2017). The Indonesian population living in the Philippines consists of immigrants and foreign workers from Indonesia and their descendants. Among them are a large number of individuals who were previously stateless and officially known as Person of Indonesian descent (PIDs). The governments of both countries and the United Nations (UN) are helping these people obtain citizenship (UNHCR, 2016).

The sea that connecting the Philippines, Malaysia and Indonesia include strategic economic routes. Throughout 2015, more than 100,000 ships passed through Sulu waters carrying 55 million metric tons of cargo, passing through more than 1 million 20-foot containers. Sulu waters are also the crossing of 18 million ship passengers. Various businesses and networks of terror and international crime, often smuggling products from Indonesia such as cigarettes and even roosters, because in the Philippines, the culture of saving cock-fights still exists and becomes the entertainment of the community and local leaders (Santosa, 2016). The close regional relations between North Maluku, North Sulawesi and the Southern Philippines to Sabah and North Kalimantan have been going on since before the arrival of Europeans to these areas (Jafar, 2023). With this close traditional relationship in the past, it is possible for cases of illegal smuggling to occur in Mindanao. The Indonesian Consulate General in Davao City as the representative of the Indonesian government in Davao has handled various problems experienced and carried out by Indonesian Citizens (WNI) in Mindanao. Some violations of the law are committed such as arms smuggling, fish smuggling, cigarette smuggling, buying and selling illegal goods, difficulty obtaining a passport, difficulty making a visa, not having enough documents to make a passport. However, statelessness is the main reason why they do not have identity and passport.

Table 1. Cases Faced by the Indonesian Consulate General in Davao 2020-2023

Cases	Total Person			
	2020	2021	2022	2023
Illegal entry undocumented	3	4	5	23
Illegal Fishing	5	-	3	-
Smuggling weapon	-	-	1	2
Murder	-	-	2	-
Presumed terrorism	1	1	-	-
Stranded	-	1	1	-
Kidnapping/Hostage	1	-	-	-
Affected by pandemic	46	5	-	-

(Source: Consulate General Republic Indonesia, Edited by the author)

As stated in table 1, throughout 2020-2023 the Indonesian Consulate General in Davao City faced cases involving Indonesian citizens as listed in the table, some of which were illegal entry undocumented, undocumented Indonesian citizens, murder, presumed terrorism or suicide bombing, Indonesian citizens stranded in the Mindanao area, and kidnapping.

Person of Indonesian Descent (PIDs) in Mindanao also considered as the Indonesian diaspora. The Indonesian diaspora refers to people who have Indonesian heredity but live outside Indonesia. According to former Indonesian Ambassador to the United States, Dino Patti Djalal, in Alunaza (2017), the Indonesian diaspora consists of two categories, the first is those

Firsta Falah Hayanda, Nur Azizah.

Indonesian Consulate General in Davao in Protecting the Rights of the Indonesian Citizens in Mindanao

who have Indonesian blood. While the second is those who have Indonesian culture and soul. Therefore, the Indonesian diaspora is very small if only based on legal calculations through passport ownership. Whereas there are also many who have Indonesian culture, blood and soul who live abroad but do not have a passport or are even foreign citizens (Alunaza, 2017). Even though PIDs in Mindanao may have spent centuries living in the Philippines, they have strong historical and cultural ties to Indonesia. Additionally, via language, rituals, and religion, these PIDs continue to be connected to their Indonesian cultural background. The Indonesian government frequently acknowledges and works to develop ties with PIDs, in order to enhance cultural and diplomatic relations between the two nations.

There are about 6,000 Person of Indonesian descents (PIDs) in the southern Philippines who do not have valid citizenship, according to mapping research conducted in 2012 and 2013 by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the Indonesian Consulate General in Davao and the Philippines Government. They are subject to immigration penalties because they do not have secure immigration status and because neither Indonesia nor the Philippines recognize them as citizens (Tan, 2014). In 2016, the Government of Indonesia through the Indonesian Consulate General in Davao City in collaboration with the Government of the Philippines and UNHCR registered 8,745 people of Indonesian descent who were later confirmed that 2,399 of them were Indonesian citizens (Consulate General Republik Indonesia, 2024). The definition of stateless given by international law is a person who is not considered a citizen by any State under the operation of its laws (UNHCR, n.d.). To guarantee that statelessness does not occur in this way in the future and to give those who have lost their Indonesian citizenship the means to regain it, the government revised the citizenship law in 2006. However, some never formally reclaimed their Indonesian citizenship and remained stateless; at this point, they are not recognized as citizens by Indonesia or the Philippines.

According to the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 108 of 2003 concerning Representative Organizations of the Republic of Indonesia Abroad, Article 6. Consular Representatives have the main task of representing and fighting for the interests of the Nation, State, and Government of the Republic of Indonesia and protecting the interests of Indonesian Citizens and Indonesian Legal Entities through the implementation of consular relations with the Receiving State (Indonesia, 1999). Protection of Indonesian citizens in the working area of the Indonesian Consulate General in Davao City is all efforts made to serve and protect the interests of Indonesian citizens and BHI in the working area of the Indonesian Consulate General in Davao City, including the provision of information/legal/and/or social assistance by taking into account the principle of prioritizing the involvement of responsible and/or authorized parties in accordance with statutory provisions; not take over the criminal and/or civil responsibility of Indonesian citizens; and in accordance with statutory provisions, local state laws and international laws and customs (Consulate General Republik Indonesia, 2024). According to Satjipto Rahardjo, legal protection is to provide protection for human rights that are harmed by others and that protection is given to the community in order to enjoy all the rights provided by law (Rahardjo, 2018). Quoting from Purba (2019), according to Muchsin, Legal Protection is something that protects legal subjects through applicable laws and regulations and is forced to implement them with a sanction (Purba, 2019). Consular representatives are responsible for providing public services related to non-political aspects, such as the legal affairs of citizens abroad (Tarigan, 2020). Consular officials have the power to interfere in matters of judicial procedure to prevent injustice from occurring. However, the interference of consular officials in providing consular assistance is limited to the preparatory stage of justice, whereas if it has entered the judicial process, consular officials have no right to interfere (Jennifer, 2013).

There are several recent studies on the protection provided by Indonesian representatives abroad to Indonesian citizens who are abroad (Ginting, 2022; Son, Mangku, & Yuliantini,

2022; Khotimah, 2023). This research was mostly conducted with the perspective of international law, they also focused on Indonesian citizens in general. (Ginting, 2022) discusses the role of the Ministry of Foreign Affairs in protecting Indonesian citizens abroad during the Covid-19 pandemic. However, none of these studies address the practices of Indonesian representatives abroad in protecting Indonesian citizens in the South Philippines. Thus, research is different from previous research because the author will focus on the problems of legal violations that occur and the problems of Indonesian descendants who do not have an identity to analyze the efforts of the Indonesian Consulate General in Davao in protecting the Indonesian citizens in Mindanao.

THEORETICAL FRAMEWORK

In this study, the author uses the national interest concept and theory of realism which is believed to helping in reviewing research on the efforts of the Indonesian Consulate General in Davao in protecting the rights and interests of the Indonesian diaspora in Mindanao.

National Interest Concept

Hans J. Morgenthau (2010) in his book entitled *Politics Among Nations* defines national interest as the minimum ability of a nation-state to protect its physical identity (territory, land, territory), political identity (political economic regime), and cultural identity (ethnic, linguistic, historical norms) from interference from other countries or nations (Rijal, 2019). Felix E. Oppenheim (1987) defines the concept of national interest as the welfare goal of the national government at the international level. This indicates that the national interest of a country is to maintain its political autonomy and national integration for the continuity of the welfare of its people to the international stage. Broadly speaking, national interest is the goals, ideals and expectations that a country wants to achieve (Saragih et al., 2019). Paul Seabury defines national interest through two perspectives, namely descriptively, which means that it is a goal that must be achieved by a nation permanently through government leadership. While normatively, national interest is a collection of ideals of a nation which the nation tries to achieve by dealing with other countries (Sudarsono et al., 2018).

Security, including the survival of the people and the need for land and welfare, is an essential element in the formation or determination of a nation's national interest (Trisakti & Zahidi, 2022). Indonesia's national interests are generally summarized in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 4th paragraph, which stated that the Government of the Republic of Indonesia protects the entire Indonesian nation, promotes general welfare, and educates the nation's life. Based on this understanding, this paper will see that there are at least two things that become Indonesia's national interests in maintaining and protecting the Indonesian diaspora abroad through the Indonesian Consulate General in Davao. First, security-related interests, Indonesian Consulate General in Davao plays an important role in helping them seek protection. Second, humanitarian and moral interests, the Consulate General of Indonesia Davao plays an important role in fulfilling these moral and legal obligations by providing protection and assistance to the Indonesian diaspora. Both are then elaborated in the discussion of this paper.

Realism

Realism is the perspective that first attempted to fully conceptualize the “national interest”. This view sees that the “national interest” must be seen from the interests of the state, because since 1648, the “state” is the supreme political supremacy in society and “anarchy” in international politics can only be dealt with through the state. Since the state is the only actor, foreign decisions only recognize the “state” as the only entity. Therefore, the “national interest” is nothing but the “state interest” based on the power they possess (Rizky Mardhatillah Umar, 2017). Realist theory in the study of international relations places the concept of power at the

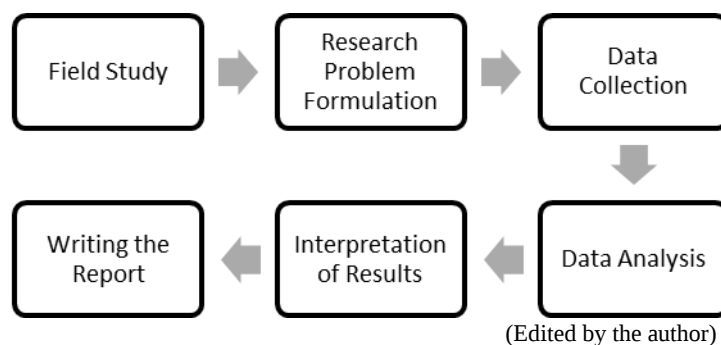
centre of all nation-state behaviour. This theory assumes that states act to maximize their power, so that they can better achieve their own goals. As Hans Morgenthau said, the clue that can help explain the international political landscape is the concept of national interest in the sense of power (Bakry, 2017a).

The author uses the theory of realism to show that the Indonesian Consulate General in Davao can be seen as an instrument of the state in protecting its citizens abroad, especially in conflict areas such as Mindanao. This can be relevant to the efforts made by the Indonesian Consulate General in Davao in protecting Indonesian citizens in Mindanao. The Indonesian Consulate General in Davao plays an important role in safeguarding Indonesia's national security and interests, by protecting the Indonesian diaspora from threats and violence. This effort can be interpreted as an effort to maintain stability and prevent escalation of conflict in Mindanao which can have a negative impact on Indonesia. The theory of realism in the study of international relations at its core places the concept of power at the center of all nation-state behavior. This theory assumes that states act to maximize their power, so that they can better achieve their own goals. As Hans Morgenthau said, the main clue that can help us explain the international political landscape is the concept of national interest (Bakry, 2017b).

RESEARCH METHODS

To analyze "How are the efforts of the Indonesian Consulate General in Davao in protecting the Indonesian citizens in Mindanao?" The author uses qualitative research methodology. Qualitative research methodology uses a variety of data collection techniques, such as interviews, observation, and document analysis. This approach allows researchers to collect rich and varied data, which can provide more comprehensive insights into the phenomena studied in mini research (Rifa'i, 2023). The primary data used by the author in this study are observations during the three months of carrying out an internship at the Indonesian Consulate General in Davao City, as well as interview with Mr Harya K Sidharta, the consul of Protocol and Consular Affairs and Mr Orfendo, home staff at Protocol and Consular affairs Indonesian Consulate General in Davao. This study also uses secondary data obtained by collecting data that has been published in national and international journals. Secondary data in this study were also obtained from official websites, documents and books produced by the Indonesian Consulate General in Davao and the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. This research uses a type of descriptive research with a qualitative approach. Regardless of the facts, the qualitative research process is subjective and descriptive. In this kind of methodology, observation and description are more important. The main purpose of this kind of methodology is to assess people's knowledge, attitudes, behaviors, and views regarding the research subject. This method uses case studies, action research, disclosure analysis, ethnography, and grounded research, among others. The quality of the phenomenon is the basis of the qualitative research approach (Mehta, 2023).

Figure 1. Flowchart Methodology



FINDING AND DISCUSSION

The border between Indonesia and the Philippines, which is mostly a sea area, makes many Indonesian citizens who work as fishermen intentionally or unintentionally cross border crossings when fishing. This also causes many Indonesians to be included in illegal entry violations. Some traditional fishermen also sometimes do not realize that they have caught fish across borders. The PIDs have lived in Mindanao, live without official documents, for more than 4 generations. Some of them have never visited or lived in Indonesia, but their ancestors or parents will remind them of their heritage and where they came from ([Mehta, 2023](#)). They traveled to Mindanao illegally around Sarangani province without official documents. There are some examples of cases involving Indonesian citizens that were resolved by the Indonesian Consulate General in Davao as follows:

1. Arrest of Weapon Smuggling Fugitives

Quoting from Detik, the North Sulawesi Regional Police, arrested one suspect on the wanted list (DPO) initials RM related to a firearm smuggling case in 2022. The perpetrator was arrested in the Philippines after a 2-year fugitive. In coordination with the National Police Division and Police Attaches in Manila and Davao, the suspect, RM as the mastermind of firearms smuggling, was successfully brought back to Indonesia ([Sudirman, 2024](#)).

2. Arrest of Illegal Smuggler

Two Indonesian citizens were arrested in the Southern Philippines by joint Philippine maritime authorities, in September 2023. When the vessel KM PEJUANG DEVISA 2 was searched by Philippine Navy officers, 296 cartons of contraband cigarettes were found on board consisting of four crew members, two Filipinos and 2 Indonesians. Having no valid documents, they were then taken and detained at Felix Apolinario Naval Post, Panacan, Davao City. The arrest of KM PEJUANG DEVISA 2 is not the first time, they have also been smuggling illegal goods such as cigarettes, drugs, and arms trafficking that have come to the attention of the Philippine authorities ([Aulia, 2023](#)).

3. Arrest of Indonesian Citizens Suspected of Having Links to Terrorist Groups

In 2017, the Indonesian Consulate General in Davao, which has obtained consular rights, helped an Indonesian citizen who is the wife of one of the top officials of a terrorist group. They help communicate with law enforcement, regarding whether there are criminal acts committed in Indonesia. This is because, if there is and indeed has been a court decision, then the chance of extradition is even greater. However, if there is none, then legal proceedings will be conducted by the Philippines. The Indonesian Consulate General in Davao also coordinates with the Philippine police regarding the role of the Indonesian citizen in terrorist groups ([Gabrillin, 2017](#)).

4. Illegal Entry

In November 2020, the Indonesian Consulate General in Davao City assisted in the repatriation of 5 Indonesian citizens back to Indonesia after being detained for 1 year for entering Philippine waters and illegal fishing. The repatriation process is carried out after 5 Indonesian citizens have received a deportation order from Philippine Immigration. As a form of protection for Indonesian citizens, the Indonesian Consulate General in Davao City assisted their repatriation to Indonesia at state expense ([Consulate General Republik Indonesia, 2022b](#)).

5. Domestic Violence

According to one of the home staff at the Indonesian Consulate, Protocol and Consular Function, Mr. Orfendo, Domestic violence is also one of the cases handled by the Indonesian Consulate. Rape, scam, kidnapping are usually experienced by Indonesian citizens who have relationships with Filipinos.

6. Residents Who Not Have Legal Identity or Residence Permit

Some Indonesian settlers in Southern Mindanao still have the status of "illegal entry" or what we can call PIDs (Person of Indonesian Descents), because they do not have valid stay permits and work permits, do not have the obligation to pay taxes for foreigners or ACR (Alien Certificate of Registration). In general, the socioeconomic condition of Indonesian citizens is below the poverty line, as a result of low income, limited skills, and the status of Indonesian citizens themselves. Most Indonesians work as sharecroppers and manual laborers in plantations or factories and fishermen in fishing companies, as they are unable to compete with Filipinos and are willing to accept any low-wage jobs to support their families. Their status as Indonesian citizens is also a barrier for them to get a better job, especially if they want to work in the government. In addition, poverty has made them unable to send their children to school, so they are not registered with Philippine government agencies, so that in the event of a case involving them, the authorities can act in accordance with applicable immigration provisions, whether in the form of fines, criminal laws, or even threats of deportation ([Konsulat Jenderal RI, 2006](#)).

In carrying out its duties as Indonesia's representative abroad, the Indonesian Consulate General in Davao in accordance with the direction of the Ministry of Foreign Affairs carries out its diplomatic mission in protecting Indonesian citizens living in Mindanao, Philippines. Some of the efforts made by the Indonesian Consulate General in Davao in protecting Indonesian descendants in Mindanao are as follows:

DISCUSSION

Providing legal Protection

The legal protection referred to here is assistance for Indonesian citizens so that their rights can be fulfilled during the trial process. As stipulated in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia Number 5 of 2018 concerning the Protection of Indonesian Citizens Abroad article 7 concerning the form of protection which includes representing Indonesian citizens in front of courts and other agencies in the local State based on applicable practices and procedures, and providing assistance, mediation, advocacy, and providing legal assistance in the form of providing Advocate services ([Indonesia, 2018](#)). The Consulate General of the Republic of Indonesia Davao makes repeated visits to the accreditation area of the Consulate General of the Republic of Indonesia Davao to provide guidance on various legal, social, and cultural issues. The Indonesian Consulate General in Davao will immediately respond to any problems involving Indonesian citizens in the field of accreditation. It will offer legal assistance to Indonesian citizens involved in various criminal and civil cases by providing or arranging the services of lawyers who consistently work to ensure that cases are resolved as fairly as possible in accordance with applicable law ([Konsulat Jenderal RI, 2006](#)).

Protection that can be done as a sign of the presence of the state is visits to prisons, finding translators if they do not know the local language, local legal system, legal aid schemes, even regarding prosecution and appeal/consular protection procedures must be based as measures to ensure citizens get their rights in every process passed and not as an intervention action ([Pustika, 2022](#)). Although the Indonesian Consulate does not have the authority to intervene in any form in the judicial process. However, the Indonesian Consulate will try to ensure that every Indonesian citizen gets the fairest treatment possible, just like local citizens. In other words, the status of Indonesian citizen is not a reason to complicate the judicial process. The consular function of the Indonesian Consulate General in Davao City recorded 27 common cases including illegal entry, murder cases, and stranded fishermen in 2019 ([Consulate General Republik Indonesia, 2019](#)). In the 2020 period, the Indonesian Consulate General in Davao City handled 18 general cases and 2 special cases, namely the kidnapping of Indonesian citizens

carried out by the Abu Sayyaf Group, and the arrest of suicide bombers in Sulu ([Consulate General Republik Indonesia, 2020](#)). In the 2021 period, the Indonesian Consulate General in Davao City has 10 general cases that have been handled ([Consulate General Republik Indonesia, 2021](#)). In the 2022 period, the Indonesian Consulate General in Davao City handled 32 special cases and 55 general cases ([Consulate General Republik Indonesia, 2022b](#)).

Facilitating legalize Identity to PIDs (People of Indonesian Descents).

In solving the problem of PIDs or undocumented citizens, the issue of legalization is an urgent problem. In implementing it the Consulate General of Indonesia Davao has conducted socialization to people of Indonesian descent on Mindanao Island. The Consulate General of Indonesia Davao has also conducted data collection of all Indonesian citizens in the accreditation area with the aim of knowing how many Indonesian settlers are already required to pay ACR (Alien Certificate Registration). The Consulate General of Indonesia Davao also has an ACR payment assistance program for all Indonesian settlers who are legally required to pay ACR. Upon becoming Indonesian citizens, PIDs will have their status changed to Registered Indonesian Citizens (RINs). They are no longer considered stateless people. The legalization process of PIDs is considered successful due to the well-coordinated cooperation between UNHCR, the Indonesian government, and the Philippine government, with a clear goal of eliminating statelessness in the Southern Philippines ([Saleha & Cheng Guan, 2022](#)).

The Indonesian Consulate General in Davao City has issued a total of 1,259 RI Travel Documents (passports) RINs which were also symbolically handed over by the Minister of Foreign Affairs in 2018. As of 2023, a total of 835 RINs has received special non-immigrant visa / 47 (a)(2) endorsements from the DOJ (Department of Justice) with a validity period of five (5) years ([Consulate General Republik Indonesia, 2023a](#)).

Table 2. Confirmation of Persons of Indonesian Descent (PIDs) in Southern Mindanao by 2022

No	Declaration	Total
1.	Confirmed Indonesian	2,879
2.	Confirmed Philippines	2,758
3.	Have back to Indonesia	2,400
4.	Limited Dual Citizenship (Affidavit)	466
5.	Pending Cases	242
Total		8,745

(Source: Consulate General Republik Indonesia, Edited by the author)

On September 9, 2022, Department of Justice and UNHCR representatives met with the Indonesian Consul General Davao. During the activity, UNHCR presented the Registration and Confirmation of Persons of Indonesian Descent (PIDs) program in Southern Mindanao, and several pending cases. It was announced in December 2021 that a total of 2,879 (33%) confirmed Indonesian citizens, 2,758 (32%) confirmed Philippines, 2,400 (27%) could not be found or had returned to Indonesia, 466 (5%) limited dual nationals, and 242 (3%) pending cases ([Consulate General Republik Indonesia, 2022a](#)).

The Registration and Confirmation of Nationality program is used by the Philippine government to map and register all stateless groups in the country, including Persons of Indonesian Descent (PIDs). The Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) met concurrently in Manila, whereupon both nations decided to address the issues pertaining to individuals of Indonesian heritage residing in the southern Philippines. The Bureau of

Immigration (BI), the Public Attorney's Office (PAO), the Indonesian Consulate in Davao (KJRI Davao), and the United Nations High Commissioner on Refugees (UNHCR) collaborated on this project, which was led by the Refugees and Stateless Persons Unit of the Philippine Department of Justice (RSPPU-DoJ) (Villa & Wiratri, 2023). The Indonesian Consulate assists those who have registered to verify their Indonesian citizenship. Cases involving individuals of Indonesian descent who show no clear Filipino characteristics were submitted to the Consulate for evaluation. As part of their global goal to end statelessness, UNHCR facilitates the missions. Through an integrated registration system that is used to register PIDs, they also offered aid with information management (Tanggol, 2017). The PIDs data was completed between 2012 and 2016, and both governments collaborated to verify the PID's citizenship. In Mindanao, the Bureau of Immigration carried out a last PIDs check. Free legal aid was offered by the PAO, including judicial modifications of birth certificate entries. Those PIDs who chose to apply for Indonesian citizenship were then registered by the Indonesian Consulate. Additionally, in November 2017, hundreds of birth certificates were given to stateless individuals with Indonesian ancestry in several Mindanao provinces by the Indonesian Consulate in Davao, the Republic of the Philippines, and the UNHCR (Basa, 2018).

Programs carried out by the Consulate General in Davao in the protection of Indonesian citizens

- 1) Held coordination meeting with Liaison and guardian officer
This meeting aims to monitor and improve the service and protection of Indonesian citizens, regarding immigration, security, border and cultural issues. The Liaisons and Guardian Officers are expected to assist the Indonesian Consulate General in Davao City to cooperate with the Barangay Captain which has been recognized as having a very positive impact both in the service and protection of Indonesian citizens and in disseminating information about Indonesia.
- 2) Consular Stall
The program aims to improve access to consular services, provide immigration consultation, security information services for Indonesian citizens in the Philippines, and provide the latest developments on border agreements in the Southern Philippines (Consulate General Republik Indonesia, 2023b).
- 3) Self-reporting socialization
The Indonesian Consulate General in Davao regularly socializes self-reporting activities for Indonesian citizens. This effort is carried out to reach Indonesian citizens who are around the Mindanao islands so that they can be recorded, and minimize problems that may arise in the future, especially related to citizenship status, illegal entry, and stay permits
- 4) Immigration and Consular Services
The Indonesian Consulate General in Davao is working to finalize the first batch of residence permits for PIDs who have entered the fifth and sixth generations in the Southern Philippines.
- 5) ACR (Alien Certificate Registration) payment assistance program
In addition, the Consulate General together with UNHCR and the Philippine Department of Justice on separate occasions also held Advocacy Meetings with local government officials. This is done so that people of Indonesian descent who have not renewed the ACR for years can be cleared of fines and Indonesian citizens who do not have birth certificates can be assisted and given relief (Adiyudha, 2018)

The periodic registration and registry program has helped identify the number of Indonesian citizens in Mindanao, making it easier for the Consulate General to provide protection and services. Likewise, legal assistance and labor dispute resolution have helped many Indonesian citizens facing problems, although challenges remain in terms of speed of response and available legal resources. In general, the programs of the Consulate General in Davao City in protecting Indonesian citizens in Mindanao have been successful and effective, but there remains room for improvement. Some of the challenges that need to be addressed include increasing the speed of service, increasing legal resources, and expanding communication and outreach. Regular evaluations and feedback from Indonesian citizens are essential to continuously improve the effectiveness of these programs.

CONCLUSIONS

The Indonesian population living in the Philippines consists of Indonesian immigrants, foreign workers, and their descendants. Among them are a large number of individuals who were previously stateless and are officially known as Person of Indonesian Descent (PIDs). As the representative of the Indonesian government in Davao, the Indonesian Consulate General in Davao City has dealt with various problems experienced and committed by Indonesian citizens in Mindanao. Some of the law violations committed include arms smuggling, fish smuggling, cigarette smuggling, buying and selling illegal goods, difficulty in obtaining passports, difficulty in making visas, not having enough documents to make a passport. However, statelessness is the main reason why they lack identity and passports. In addressing these issues, the Indonesian Consulate General in Davao provides legal assistance to Indonesian citizens involved in various criminal and civil cases by providing or arranging the services of lawyers who consistently work to ensure that cases are resolved as fairly as possible in accordance with applicable laws. The Indonesian Consulate General in Davao has also conducted a data collection of all Indonesian citizens in the accreditation area with the aim of knowing how many Indonesian settlers are already required to pay ACR. The Indonesian Consulate General in Davao also has an ACR payment assistance program for all Indonesian settlers who are legally required to pay ACR. The Indonesian Consulate General in Davao City in collaboration with the Philippine Department of Justice (DOJ), with the assistance of UNHCR Philippines, has initiated a citizenship registration and confirmation program for 8,745 PIDs in Southern Mindanao since 2016 to date. The author's suggestion for future research is to analyze the effectiveness of Consulate General Davao's Efforts in Providing Protection and Facilitating Citizenship for the Indonesian Diaspora and its Descendants in Mindanao.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyudha, R. (2018). *KJRI Davao Permudah Pelayanan Imigrasi ACR di Filipina*. <https://internasional.republika.co.id/berita/p5mbok319/kjri-davao-permudah-pelayanan-imigrasi-acr-di-filipina>
- Alunaza, H. (2017). Diaspora Sebagai Multi Track Diplomacy Indonesia Guna Mewujudkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*), 22(2). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v22i2.2434>
- Aulia, F. (2023). *Lagi, Dua Penyelundup Ilegal Asal Sulawesi Utara Ditangkap di Filipina*. <https://sumut.pikiran-rakyat.com/nusantara/pr-3387156722/lagi-dua-penyelundup-ilegal-asal-sulawesi-utara-ditangkap-di-filipina?page=all>
- Bakry, D. U. S. (2017a). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Prenadamedia Group.

Bakry, D. U. S. (2017b). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. kencana.

Basa, M. (2018). 'Pilipino' receives Indonesian passport. <https://www.rappler.com/philippines/192847-indonesian-mindanao-passports/>

Consulate General Republik Indonesia, D. C. (2019). *Dokumen Laporan Kinerja KJRI Davao City Tahun 2019.pdf*.

Consulate General Republik Indonesia, D. C. (2020). *Dokumen Laporan Kinerja KJRI Davao City Tahun 2020.pdf*.

Consulate General Republik Indonesia, D. C. (2021). *Laporan Kinerja KJRI Davao City*.

Consulate General Republik Indonesia, D. C. (2022a). *Courtesy Visit United Nations High Commissioner for Refugees Philippines (UNHCR), Department of Justice (DOJ), dan Bureau of Immigration Manila (BI) kepada Konsul Jenderal RI Davao City pada 9 September 2022*.

Consulate General Republik Indonesia, D. C. (2022b). *Laporan Kinerja KJRI Davao City*.

Consulate General Republik Indonesia, D. C. (2023a). *Buku Saku KJRI Davao City*.

Consulate General Republik Indonesia, D. C. (2023b). *Warung Konsuler: Layanan Terintegrasi Konsuler dan Imigrasi dari KJRI Davao City Mencapai Tiga Komunitas WNI di Mindanao*. <https://vatican.kemlu.go.id/portal/id/read/4943/berita/warung-konsuler-layanan-terintegrasi-konsuler-dan-imigrasi-dari-kjri-davao-city-mencapai-tiga-komunitas-wni-di-mindanao>

Consulate General Republik Indonesia, D. C. (2024). *Rencana Strategis Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao City 2020- 2024*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Konsulat_Jenderal_Republik_Indonesia_di_Davao_City

Gabrillin, A. (2017). *KJRI Davao Temui WNI Istri Pemimpin Maute Group*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/10193941/kjri-davao-temui-wni-istri-pemimpin-maute-group>

Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Permenlu No. 5 Tahun 2018*. 1323.

Indonesia, R. (1999). Indonesia Law No.37/1999 about Foreign Affairs. *Lembaran Negara RI*, 1, 1–11.

Jafar, N. (2023). Iranun Dan Jejak Sejarahanya Di Morotai: Sisi Lain Jaringan Perdagangan Laut Nusantara Abad XVI-XIX. *Jurnal Pusaka*, 3(2), 12–28. <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/pusaka/article/view/7501>

Jennifer. (2013). Pemberitahuan Konsuler sebagai Bentuk Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Kasus Avena. *Sumatra Journal of International Law*, 1(2), 1–19. <https://www.neliti.com/publications/14971/pemberitahuan-konsuler-sebagai-bentuk-pelaksanaan-hak-asasi-manusia-ditinjau-dar>

Konsulat Jenderal RI, D. C. (2006). *Menyibak Tabir WNI* (A. Suharto (ed.)).

- Mehta, S. (2023). *Types of Research Methodology in Research* | Eduvoice. <https://eduvoice.in/types-research-methodology/>
- Purba, D. A. M. (2019). *Upaya perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari UU no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Universitas Quality
- Pustika, A. A. N. (2022). Arti Penting Mandatory Access Consular Notification dalam Hubungan Konsuler. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.168>
- Putri, R. G. (2017). Peran Diaspora Indonesia-Filipina Selatan (Difs) dalam Pemberdayaan Ekonomi Warga Keturunan Indonesia Pemukim (Wkip) di Filipina Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP)*, Vol 1, No(April). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v1i2.7162>
- Rahardjo, S. (2018). Ilmu Hukum. *Bentuk-Bentuk, 'Teori Perlindungan Hukum', Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum*, 2018, 17–51
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Rijal, N. K. (2019). Kepentingan Nasional Indonesia dalam Inisiasi ASEAN Maritime Forum (AMF). *Indonesian Perspective*, 3(2), 159. <https://doi.org/10.14710/ip.v3i2.22350>
- Rizky Mardhatillah Umar, A. (2017). The National Interest in International Relations Theory. *Global South Review*, 1(2), 185. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28841>
- Saleha, P. A., & Cheng Guan, B. T. (2022). From persons of Indonesian Descent (PIDs) to Registered Indonesian Nationals (RINs): The legalisation process and issues of the RINs in Mindanao, Philippines. *Malaysian Journal of Society and Space*, 18(4). <https://doi.org/10.17576/geo-2022-1804-05>
- Santosa, I. (2016). “Bisnis” Abu Sayyaf dan Solusi Indonesia. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/10/05100011/.Bisnis.Abu.Sayyaf.dan.Solusi.Indonesia?page=all>
- Saragih, H., Hutagalung, E., Hilm, M. Z., Hakim, A., Syukran, Ubaidullah, M. . ., Hariadi, T. M., Wicaksono, H. L., Buku, J., AswicaHyono, H., & Christian, D. (2019). Dampak Kebijakan Pintu Terbuka (Open Door Policy) Turki Bagi Pengungsi Suriah Terhadap Kepentingan Nasional Turki Tahun 2011-2016 (Studi Kasus Pengungsi Suriah Di Turki). *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 4(02), 256–279. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/12976/5569>
- Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & D.W., S. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(3), 83–102. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441>
- Sudirman, M. I. (2024). *Polda Sulut Tangkap DPO Penyelundupan Senpi dari Filipina Usai Buron 2 Tahun*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7231048/polda-sulut-tangkap-dpo-penyelundupan-senpi-dari-filipina-usai-buron-2-tahun>

- Talampas, R. (2015). Indonesian Diaspora Identity Construction in a Southern Mindanao Border Crossing. *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia*, 51(1).
- Tan, V. (2014). *Stateless in the Philippines: Indonesian descendants feel torn between two lands* | UNHCR. <https://www.unhcr.org/news/stories/stateless-philippines-indonesian-descendants-feel-torn-between-two-lands>
- Tanggol, F. (2017). *Philippine and Indonesian Governments work together to end statelessness in Mindanao*. <https://www.unhcr.org/ph/11753-philippine-indonesian-governments-work-together-end-statelessness-mindanao.html>
- Tarigan, M. I. (2020). *Kasus Reynhard Sinaga: analisis terkait bantuan hukum bagi WNI di luar negeri dan upaya jalur diplomasi*. <https://theconversation.com/kasus-reynhard-sinaga-analisis-terkait-bantuan-hukum-bagi-wni-di-luar-negeri-dan-upaya-jalur-diplomasi-129565>
- Trisakti, M., & Zahidi, M. S. (2022). Kepentingan Nasional Kiribati Dalam Memutuskan Hubungan Diplomatik Dengan Taiwan dan Beralih Ke China. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 3671–2679. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6982>
- UNHCR. (n.d.). » *About statelessness*. Retrieved October 26, 2023, from <https://www.unhcr.org/ibelong/about-statelessness/>
- UNHCR. (2016). *UNHCR Philippines » Hundreds finally out of legal limbo in groundbreaking pilot between Indonesia, the Philippines*. <https://web.archive.org/web/20160911205841/http://unhcr.ph/news-stories/hundreds-finally-out-of-legal-limbo-in-groundbreaking-pilot-between-indonesia-the-philippines>
- Villa, A., & Wiratri, A. (2023). Rethinking Local Citizenship and Integration of Persons of Indonesian Descent in the Southern Philippines. In *Migration in Southeast Asia: IMISCOE Regional Reader* (pp. 95–112). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25748-3_6
- Wuryandari, G., & Raharjo, S. N. I. (2019). The Existence of “Sapi/Pisang” People: Challenges and Opportunities for Indonesia-Philippines Border Area Development. *Jurnal Kajian Wilayah/Jurnal Kajian Wilayah*, 10 (2), 21–36 <https://doi.org/10.14203/jkw.v10i2.822>



Check for updates

Strategi Partai Golkar Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Airin Rachmi Diany Pada Dapil Banten III

Glenn Kevin Immanuel^{1*}, Yusa Djuyandi¹

¹Department of Political Science, Universitas Padjadjaran, 45363, Jawa Barat-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: April 26, 2024

Diterima: Jul 01, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Campaign Strategy; Golkar Party; Political Marketing; General Election 2024;

KORESPONDEN:

Glenn Kevin Immanuel

Department of Political Science,
Universitas Padjadjaran.

Email:

glenn23004@mail.unpad.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Immanuel, G. K., & Djuyandi, Y. (2024). Strategi Partai Golkar Dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Airin Rachmi Diany Pada Dapil Banten III. *Journal of Political Issues*. 6 (1); 72-86.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.236>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.236>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This research will analyze the Golkar Party's strategy in the 2024 election with a case study of Airin Rachmi Diany in Banten III electoral district. In researching this issue, the researcher uses the 4P political marketing mix theory proposed by Niffeneger, namely product, promotion, price, and place. In addition, the researcher also used qualitative research methods, with interview technique by interviewing several sources and supported by literature studies and document analysis techniques to analyze the Golkar party's strategy. The author found that there are various factors that make Golkar Party and Airin get a large number of votes and get additional seats in this electoral district. These factors are the party platform that is in line with Airin's characteristics and image. Then the image of Airin who has achievements as mayor of South Tangerang so that he is able to carry out campaign methods with an approach that is in accordance with the culture of the Greater Tangerang community. Airin also has logistics, such as economy, family strength, support from Golkar, and a sufficient image to support the campaign. Lastly, the selection of electoral districts is in accordance with Golkar's strong vote base in the Banten region so that it can smoothen Golkar and Airin's steps in the 2024 elections.

Abstrak Penelitian ini akan menganalisis strategi Partai Golkar dalam pemilu 2024 dengan studi kasus Airin Rachmi Diany di dapil Banten III. Dalam meneliti isu ini, peneliti menggunakan teori pembauran pemasaran politik 4P yang dikemukakan oleh Niffeneger, yaitu produk, promosi, harga, dan tempat. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik wawancara dengan mewawancarai beberapa narasumber serta dikuatkan studi literatur dan teknik analisis dokumen untuk menganalisis strategi partai Golkar. Peneliti menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang membuat Partai Golkar dan Airin mendapatkan suara yang besar dan mendapatkan kursi tambahan pada dapil ini. Faktor-faktor tersebut adalah terdapat *platform* partai yang sejalan dengan karakteristik dan citra Airin. Kemudian citra Airin yang memiliki prestasi sebagai Walikota Tangerang Selatan sehingga mampu melakukan metode kampanye dengan pendekatan yang sesuai dengan budaya masyarakat Tangerang Raya. Airin juga memiliki logistik, seperti ekonomi, kekuatan keluarga, dukungan dari Golkar, dan citra yang cukup dalam menunjang kampanye. Terakhir adalah pemilihan dapil yang sesuai dengan basis suara Golkar yang sudah kuat di daerah Banten sehingga dapat memuluskan langkah Golkar serta Airin dalam Pemilu 2024.

TENTANG PENULIS:

Glenn Kevin Immanuel, menyelesaikan studi S-1 di Program Studi Ilmu Politik Universitas Udayana pada tahun 2019, saat ini penulis sedang melakukan studi S-1 di Ilmu Hukum Universitas Terbuka dan melanjutkan studi di Magister Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

Yusa Djuyandi, menyelesaikan studi S-3 di Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen tetap Departemen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar penting dalam sistem bernegara yang demokratis. Hal ini karena pemilu merupakan arena kompetisi dalam rangka mengisi jabatan politik yang ada di pemerintahan berdasarkan pilihan formal warga negara yang memiliki syarat-syarat tertentu (Pamungkas, 2009). Pemilu menjadi sistem paling termutakhir yang pernah ditemukan oleh manusia untuk menjadikan rakyat sebagai penguasa tertinggi atas dirinya. Pemilu juga menjadi indikator negara demokrasi di dunia, yang mana keberadaan pemilu ditunjukkan sebagai salah satu tolak ukur bagaimana rakyat dapat secara adil memilih pemerintahannya.

Pada tahun 2024, terdapat 17 partai nasional dan 6 partai lokal yang berkontestasi pada Pemilu 2024. Salah satu partai yang ikut berkontestasi dalam Pemilu 2024 adalah Partai Golkar, dimana Partai Golkar memperoleh nomor urut 4. Dalam sejarah Pemilu di Indonesia pasca Reformasi, Partai Golkar merupakan salah satu partai yang secara konsisten menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Pasca Reformasi sekaligus sejak Pemilu 1999, Golkar masih menjadi partai yang diperhitungkan, yang mana pada gelaran Pemilu 1999, Golkar mampu mendapatkan perolehan suara sebesar 22,44 persen dan berada di posisi kedua. Selanjutnya, Golkar berhasil mendapatkan posisi pertama pada Pemilu 2004 dengan memperoleh suara sebesar 21,58 persen. Kemudian, angka perolehan suara Golkar menurun di angka sekitar 14 persen, yaitu 14,45 persen pada tahun 2009 dan 14,75 persen pada tahun 2014, dengan berada di peringkat kedua pada gelaran Pemilu dua kali berturut-turut. Kemudian di tahun 2019, Golkar mampu meraup suara sebesar 12,31 persen dan menduduki posisi ketiga (Litbang Kompas, 2024). Perolehan suara Golkar Kembali naik pada Pemilu 2024 dengan mampu meraup 15,28 persen suara dan berada di posisi kedua (Rosana, 2024). Hal ini menunjukkan konsistensi Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia.

Terlihat bahwa terjadi dinamika perubahan presentase perolehan suara dan jumlah kursi yang diperoleh Partai Golkar dalam pemilu pasca Reformasi. Dari sepanjang gelaran pemilu di Indonesia pasca Reformasi, Partai Golkar tercatat mengalami dua kali peningkatan presentase perolehan suara, yaitu pada pemilu tahun 2014 dan 2024. Namun dari kedua kenaikan presentase suara tersebut, kenaikan presentase suara Partai Golkar yang paling signifikan adalah yang terjadi pada pemilu tahun 2024.

Salah satu daerah pemilihan (Dapil) yang ikut menyumbangkan kenaikan perolehan suara dan jumlah kursi Partai Golkar pada pemilu 2024 adalah Dapil Banten III yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2014 dan 2019, Golkar mampu memenangi satu kursi DPR di Dapil Banten III. Perolehan kursi Golkar meningkat menjadi dua kursi pada Pemilu 2024 setelah mampu memperoleh suara tertinggi dengan 638.064 suara pada Dapil Banten III. Sedangkan Partai lain yang mendapatkan kursi DPR dari Dapil Banten III, antara lain PKB dengan satu kursi, Gerindra dengan satu kursi, PDIP dengan dua kursi, Golkar dengan dua kursi, Nasdem satu kursi, dan PKS, PAN, serta Demokrat yang masing-masing satu kursi (CNN Indonesia, 2024).

Peningkatan kursi yang diraih oleh Partai Golkar di Dapil Banten III menjadi menarik, karena terdapat salah satu calon anggota DPR RI, yaitu Airin Rachmi Diany yang mendapatkan suara terbanyak di dapil ini. Bahkan Airin menjadi salah satu calon anggota DPR RI yang mendapat suara terbanyak di Indonesia dan menjadi calon anggota DPR RI yang mendapatkan suara terbanyak di internal Partai Golkar (Tempo.co, 2024). Airin Rachmad Diany mampu mendapatkan suara sebesar 302.878, disusul oleh Habib Idrus Salim Aljufri dari PKS yang memperoleh suara sebesar 184.407. Kemudian calon anggota DPR dari Partai PDIP berada di posisi ketiga dengan 149.397 suara, disusul Moh. Rano Alfath dengan 125.853 suara dan Sufni Dasco Ahmad dengan 119.692 suara (Sujoni, 2024).

Dari data diatas, ditemukan bahwa Airin memperoleh suara tertinggi di Dapil Banten III mengalahkan beberapa calon lain yang cukup populer di Indonesia, seperti Rano Karno yang

merupakan artis sekaligus mantan Gubernur Banten dan Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan Ketua Harian Partai Demokrat sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI. (Farisa, 2024). Perolehan suara Airin juga turut mendongkrak suara Partai Golkar yang mendapatkan total suara sebanyak 639.064 suara di Dapil Banten III (Sujoni, 2024). Melihat dari data-data yang sudah dijabarkan diatas, maka sangat menarik jika mengkaji lebih jauh strategi Partai Golkar sehingga mendapatkan kenaikan suara di Dapil Banten III pada pemilu 2024.

Terdapat beberapa penelitian mengenai strategi politik partai. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jamil dan Kurniawan (2024) yang berjudul “Strategi Politik Partai Golkar Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pemilihan Legislatif 2019 di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII”. Penelitian ini menemukan bahwa pasca Reformasi, Partai Golkar mengubah citra lama sebagai warisan Orde Baru menjadi citra partai politik yang solid dan mendukung penghapusan politik uang (Jamil & Kurniawan, 2024). Selain itu, Partai Golkar menekankan pada soliditas internal dan melatih saksi dalam mendukung penghitungan suara. Lebih lanjut penelitian ini melihat Partai Golkar menggunakan konsultan yang memiliki spesialisasi teknologi informasi, Big Data, dan media untuk beradaptasi dengan perubahan demografi pemilih (Jamil & Kurniawan, 2024).

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Fransisko dkk. (2020) yang berjudul “Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya dalam Memenangkan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2019-2024”. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan Partai Golkar dalam pemilu legislatif DPRD Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 tidak terlepas dari *personal branding* dari tokoh Partai Golkar, tokoh masyarakat, dan komunitas atau kelompok yang ada di masyarakat. Selain itu, pola komunikasi yang dilakukan oleh Partai Golkar menggunakan pendekatan agenda setting dengan menampilkan wajah murah senyum, ramah, menampilkan program yang peduli dengan masyarakat pada di *platform* media sosial (Fransisko dkk., 2020).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andrika dan Ubaidullah (2020) dengan judul “Kemenangan Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif di Aceh Tenggara: Studi Kasus Pengaruh Hasanuddin Broeh Terhadap Kemenangan Partai Golkar di Pemilu Legislatif tahun 2014”. Penelitian ini menemukan pengaruh figur Partai Golkar yang memegang jabatan sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dan Bupati terhadap kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Aceh Tenggara sangat besar (Andrika & Ubaidullah, 2020). Pada kasus ini, Bupati yang sekaligus sebagai ketua DPD Golkar menggunakan kekuasaannya untuk menggerakkan massa, sehingga partai Golkar dapat memenangkan pemilu legislatif pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, Andrika dan Ubaidillah teori elit dan partai politik dengan konsep patronase dalam pemilu dan patron-klien.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan diatas, belum ada penelitian yang melihat strategi Partai Golkar dalam memenangkan pemilu menggunakan teori bauran pemasaran politik, yang terdiri dari *product*, *promotion*, *price*, dan *place*. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi Golkar melalui salah satu kadernya, Airin Rachmi Diany, dalam Pemilihan Umum 2024 di Dapil Banten III dengan menggunakan teori bauran pemasaran politik.

LANDASAN TEORITIK

Untuk memenangkan pemilu, semua partai politik menggunakan segala cara, taktik dan strategi, begitu juga partai-partai politik yang ada di Provinsi Banten. Dalam mengkaji strategi politik, penting untuk memahami pendekatan tiga fase yang ada, yaitu analisis skenario, pengambilan keputusan strategis, dan implementasi strategis (Schroder, 2008). Salah satu strategi politik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemasaran politik. Terdapat kaidah dalam pemasaran, yaitu “*Marketing is everything and everything is marketing*” (Mc. Kenna dalam Bastian, 2022).

Bauran pemasaran politik memiliki empat faktor yang menjadi patokan untuk mengupayakan terjadinya pemasaran politik kandidat yang dikenal sebagai 4P. 4P tersebut antara lain:

1. Produk (*Product*)

Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh institusi politik, dimana pemilih akan merasakan dampaknya setelah sebuah institusi politik maupun seorang kandidat terpilih (Niffenegger dalam Firmanzah, 2012). Dalam produk politik, pemilih memainkan peran yang cukup penting dalam memaknai dan menginterpretasikan produk politik yang disajikan oleh institusi politik maupun seorang kandidat (Dermondy & Scullion dalam Firmanzah, 2012). Produk politik terbagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) *platform* partai, (2) catatan masa lalu, dan (3) ciri pribadi (Niffenegger dalam Firmanzah, 2012)

2. Promosi (*Promotion*)

Promosi adalah suatu upaya untuk menarik perhatian konsumen dengan metode berkomunikasi dengan media massa, media elektronik, maupun komunikasi antar pribadi (Cangara, 2004). Kegiatan promosi tidak hanya dilakukan ketika pemilu akan dilaksanakan, melainkan harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus diluar jadwal kampanye (Butler & Collins, 2001). Sebagai contoh, bahwa institusi politik maupun kandidat calon dapat melakukan upaya untuk menarik perhatian pemilih dengan gerakan donor darah maupun menghadiri acara-acara yang diselenggarakan bersama rakyat.

3. Harga (*Price*)

Harga yang dalam hal ini adalah harga politik merupakan biaya ekonomi, psikologis dan citra nasional yang jika diartikan secara sebagai biaya kampanye, publikasi, dan operasional tim sukses (Niffenegger dalam Firmanzah, 2012).

4. Tempat (*Place*)

Tempat berkaitan dengan cara hadir atau proses pendistribusian sebuah institusi politik dan kemampuan dalam melakukan komunikasi dengan pemilih (Niffenegger dalam Firmanzah, 2012). Untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka dalam melakukan kampanye politik, institusi politik maupun kandidat harus mengidentifikasi dan memetakan struktur dan karakteristik masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan, menggali, serta memahami makna yang diberikan individu maupun masyarakat terhadap permasalahan sosial (Creswell, 2014). Hal ini dilakukan karena penelitian hendak mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar melalui Airin Rachmi Diany dalam meningkatkan suara dan kursi di Dapil Banten III pada pemilu 2024. Melihat strategi Partai Golkar dalam pemilu 2024 melalui Airin Rachmi Diany juga penting, mengingat Airin Rachmi Diany merupakan kader Golkar yang menjalankan strategipemenangan berdasarkan arahan Partai Golkar. Selain itu, Partai Golkar melihat bahwa Airin Rachmi Diany yang juga merupakan ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), diakui sebagai kader panutan bagi Golkar sehingga ada keselarasan antara strategi Golkar dengan strategi dari Airin Rachmi Diany (Joharsoyo, 2024).

Sumber data yang diperoleh merupakan data primer melalui teknik wawancara serta didukung oleh data sekunder lainnya yang terdiri dari buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan literatur lainnya. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari anggota Partai Golkar yang juga menjadi tokoh masyarakat di Kota Tangerang Selatan, yaitu Baba H. Ahmad H.G., birokrat yang juga menjadi tim sukses Airin Rachmy Diany, yaitu M.Y. dan H.G.

Teknik wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana strategi Airin Rachmy Diany dan Partai Golkar dalam memenangkan Pemilu tahun 2024 di Dapil Banten III. Selain itu, peneliti menggunakan teknik analisis dokumen agar memudahkan dalam mencari informasi yang dapat memperkaya serta mendukung penelitian ini (Guba & Lincoln, 1989). Teknik analisis dokumen merupakan teknik analisis dengan pengambilan dan pencarian data yang berasal dari sumber tertulis untuk memperoleh data yang dapat mendukung penelitian dan hasil analisis (Subroto, 1992). Teknik analisis dokumen ini dapat dijalankan dengan membaca data, mengumpulkan data yang didapat dari sumber tertulis, kemudian data yang relevan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Pemilu 2024, Airin Rachmi Diany mampu meraup suara tertinggi di Dapil III Banten, yang mana suara yang berhasil diraup sebesar 302.878 suara pada pemungutan suara tersebut. Salah satu hal yang berkontribusi dalam keberhasilan Airin Rachmi Diany untuk menduduki kursi DPR RI dengan suara terbanyak di Dapil Banten III pada pemilu 2024 adalah melalui beragam strategi kampanye dengan bauran pemasaran politik.

Penelitian ini akan berfokus pada penerapan bauran pemasaran oleh Partai Golkar bersama dengan Airin Rachmi Diany untuk memenangkan Airin Rachmi Diany dalam gelaran Pemilu 2024. Beberapa strategi tersebut, meliputi penggunaan media sosial, *personal branding*, *door-to-door campaign*, hingga kampanye luring. Secara rinci, strategi tersebut akan dibagi ke dalam bauran pemasaran produk, promosi, harga, dan tempat, yang akan dibahas secara rinci dalam penelitian ini.

Produk (*Product*)

Produk dalam sebuah institusi politik, yaitu platform yang berisikan konsep, identitas, ideologi, dan program kerja (Firmanzah, 2012). Hal ini yang membuat produk dalam sebuah institusi politik dapat dirasakan oleh pemilih setelah institusi tersebut terpilih. Hal ini karena produk dalam politik merupakan manifestasi dari institusi politik tersebut serta apa yang ingin diterapkan jika terpilih. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi pembentukan produk politik adalah yaitu jejak institusi partai politik. Hal ini kemudian memunculkan karakteristik atau ciri dari kandidat yang pada akhirnya memberikan citra, simbol, dan kredibilitas pada produk politik.

Menurut David Reeve (dalam Golkar Institute, 2023) Partai Golkar yang pada waktu itu belum berbentuk partai dirancang oleh Presiden Soekarno pada tahun 1950-an sebagai jalan keluar atas pertarungan ideologi partai politik yang cukup keras. Setelah pemilu 1955, Presiden Soekarno menemukan ide untuk menggantikan partai-partai politik dengan golongan fungsional yang terdiri dari buruh, petani, wanita, pemuda, ulama, hingga aparatur pemerintahan (Reeve, 2013). Hal ini dilakukan oleh Presiden Soekarno karena terjadi perpecahan di tengah masyarakat akibat dari perbedaan ekstrim ideologi yang terjadi pada saat itu.

Saat ini, Partai Golkar memiliki *platform* politik yang berfokus pada pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari buku yang diterbitkan oleh Golkar Institute yang berisi landasan kerja Partai Golkar 2024-2029. Terdapat empat pilar dalam landasan kerja Partai Golkar, yaitu: (1) pilar ekonomi dan ketenagakerjaan, (2) pilar demokrasi yang berkeadilan, (3) pilar kesejahteraan sosial, dan (4) pilar pelayanan publik, pertahanan, dan keamanan (Golkar Institute, 2023a). Selain itu, Partai Golkar juga mengusung ideologi jalan tengah melalui buku yang diluncurkan oleh Partai Golkar sebelum pemilu 2024 yang berjudul 'Jalan Tengah Golongan Karya: Mengutamakan Persatuan dan Kesatuan demi Kemajuan Bangsa'. Ideologi jalan tengah ini untuk memastikan tujuan dari Partai Golkar untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Hal ini kemudian diturunkan kepada seluruh kader Partai

Golkar yang mengikuti pemilu 2024 agar mengedepankan *platform* Partai Golkar mengenai kesejahteraan dan pembangunan.

Platform Partai Golkar ini tercermin pula dalam beberapa kampanye yang dilakukan oleh Airin. Pada dasarnya, Airin memperkuat *personal branding* untuk mensukseskan upaya kampanyenya melalui prestasi yang sudah dicapai selama jabatannya sebagai walikota di Kota Tangerang Selatan. Hal ini karena selama Airin memimpin selama dua periode sebagai Walikota Tangerang Selatan, Airin dianggap mampu berkontribusi terhadap perkembangan Pembangunan di Kota Tangerang Selatan (Prihana, 2021). Prestasi ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berhasil mencapai standar tertinggi dalam akuntansi penyusunan laporan keuangan pada tahun 2011 dan 2012. Selain itu, 21 kelurahan di Kota Tangerang Selatan juga berhasil mendapatkan gelar Kelurahan Sadar Hukum dan piagam Anubhawa Sasana dari Kementerian Hukum dan HAM. Prestasi tersebut ditambah juga dengan gelar Walikota Inovatif Terbaik dalam Penanganan Covid-19 yang berhasil diraih oleh Airin (Ningrum, 2024).

Di luar prestasi dan gelar yang diraih oleh Airin bersama dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, masa pemerintahan Airin juga diwarnai dengan berbagai capaian pembangunan selama dua kali masa jabatan. Capaian tersebut, antara lain seperti Pendapatan Asli Daerah yang melonjak dari Rp. 420,663 miliar di tahun 2011 menjadi Rp. 3,8 triliun di tahun 2020. Selain itu, tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Pendidikan, meningkatnya angka partisipasi murni Sekolah Dasar. Di sektor Kesehatan sendiri Airin mampu meningkatkan alokasi JKN dengan program UHC yang dapat mencapai angka 99,86 persen dan peningkatan jumlah puskesmas serta menurunnya angka stunting hingga 11 persen. Sedangkan dalam bidang infrastruktur sendiri, Tangerang Selatan di bawah pemerintahan Airin dapat menyelesaikan berbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan trotoar. Hal ini didukung juga dengan pembangunan kawasan pertanian terpadu, perpustakaan, serta kawasan alun-alun. Ini yang membuat Tangerang Selatan mampu meraih status Kawasan Ekonomi Khusus oleh pemerintah pusat (Prihana, 2021).

Hal tersebut sudah cukup menjadi modal bagi Airin untuk menunjukkan produk politik yang ditawarkan kepada calon pemilih. Terlebih, capaian pembangunan tersebut sejalan dengan *platform* politik dari Partai Golkar yang sudah memenuhi keempat pilar landasan kerja Partai Golkar. Oleh karena itu, prestasi Airin dalam memajukan Tangerang Selatan selama masa jabatannya sebagai Walikota menjadi modal yang kuat sekaligus *personal branding* yang mendukung strategi Partai Golkar dalam Pemilu 2024.

Selain itu Airin mencirikan dirinya sebagai calon pemimpin yang merakyat, cantik, mumpuni, dan berpengalaman. Sosok merakyat ini juga dikonfirmasi oleh narasumber yang menyatakan bahwa diantara keluarga Ratu Atut yang dianggap elitis, Airin merupakan satu-satunya yang paling merakyat. Salah satunya adalah Airin selalu hadir atau minimal mengirimkan karangan bunga ketika masyarakat mengirimkan undangan pernikahan, khitanan, maupun undangan-undangan lainnya. Namun dari semua undangan tersebut, Airin selalu mendahulukan acara kedukaan apabila terdapat masyarakat yang mengalami musibah kedukaan.

Dalam kanal Youtube terlihat bahwa Airin seringkali menggunakan warna kuning dan hijau toska dalam melakukan kampanye. Warna kuning dapat dikatakan lekat terhadap simbol Partai Golkar yang juga bernuansa kuning. Warna hijau toska juga dapat interpretasikan sebagai simbol Kota Tangerang Selatan, karena logo Kota Tangerang Selatan didominasi dengan warna hijau toska. Ini memang selaras dengan latar belakang Airin yang merupakan kader Partai Golkar dan mantan Walikota Tangerang Selatan. Kedua warna ini tidak hanya digunakan Airin pada saat mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI, namun juga sudah sering digunakan saat mencalonkan diri sebagai Walikota Tangerang Selatan selama dua periode.

Berdasarkan hasil wawancara, Airin memiliki personal *branding* yang kuat, sehingga menurut narasumber, Airin akan menang sekalipun tidak maju melalui Partai Golkar. Sosok Airin yang sangat populer di Dapil Banten III membuat Partai Golkar mampu menambah kursi dari dapil ini. Menurut narasumber, ketika Airin menjadi Walikota Tangerang Selatan, Airin selalu menampilkan sosok keibuan yang ditunjukkan saat melakukan kegiatan. Salah satu contohnya adalah ketika Airin melakukan sosialisasi terhadap ibu-ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) kemudian anaknya menelpon, maka sosialisasi itu dihentikan sementara untuk menjawab telpon anaknya. Hal ini kemudian diterima oleh masyarakat bahwa Airin merupakan sosok keibuan yang mendahulukan keluarga diatas segalanya.

Promosi (*Promotion*)

Agar produk politik dapat tersampaikan dengan baik kepada pemilih, tentu institusi politik maupun seorang kandidat harus melakukan promosi. Dalam melakukan kampanye, Airin menggunakan berbagai macam cara, yaitu secara konvensional dengan pintu ke pintu, kampanye akbar, penempatan baliho, maupun secara digital dengan media sosial. Dalam berbagai media, Airin sering melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai kalangan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan anak muda, komunitas perempuan, dan berbagai komunitas lainnya yang ada di Dapil Banten III.

Walaupun Airin melakukan kunjungan ke berbagai kalangan untuk berkampanye, Airin menggunakan sosok figur atau tokoh di tiap kecamatan dan komunitas ibu-ibu sebagai target promosi dirinya. Hal ini disampaikan oleh narasumber, dimana Airin selalu meminta petunjuk dan petunjuk dari tokoh-tokoh masyarakat ketika ingin maju sebagai calon anggota DPR RI maupun sebagai calon Gubernur Banten. Hal inilah yang kemudian mendapat simpati dari para tokoh masyarakat karena bagi mereka, Airin berbeda dari politisi lainnya. Mereka menganggap ketika Airin mendatangi tokoh-tokoh masyarakat diibaratkan seperti anak yang meminta restu kepada orang tua.

Airin yang juga sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran di Banten juga beberapa kali turun ke masyarakat dengan cara door to door dan melakukan kampanye terbuka di Banten bersama Prabowo dan Gibran. Salah satunya, pada 4 Desember 2024, Airin bersama Gibran melakukan kampanye *door to door* sembari membagikan susu kotak gratis kepada masyarakat di kawasan padat penduduk di Kampung Poris Gaga, Kota Tangerang ([KumparanNews, 2023b](#)). Secara tidak langsung, dengan melakukan kampanye terbuka bersama dengan calon wakil presiden nomor urut dua, yaitu Gibran, Airin juga mendapat efek popularitas di kalangan masyarakat.

Selain menggunakan cara kampanye terbuka dari pintu ke pintu, Airin juga menggunakan baliho sebagai cara untuk mengkampanyekan dirinya. Airin sudah menggunakan baliho untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat jauh sebelum masa kampanye pemilu 2024. Hal ini karena adanya keinginan Airin untuk menjadi calon Gubernur Banten pada tahun 2024. Bahkan sejak tahun 2022, Airin telah menempatkan balihnya di beberapa kota dan kabupaten di Banten ([KumparanNews, 2023a](#)). Dalam baliho yang ditempatkan oleh Airin, berisikan jargon “Banten Maju Bersama, Airin Bukan Yang Lain”.

Gambar 1. Salah Satu Baliho Airin di Jl. Melati Mas, BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan

Sumber: ([Beritatangsel.com](https://beritatangsel.com), 2022)

Pada masa kampanye pemilu 2024, Airin juga tetap menggunakan baliho sebagai salah satu cara berkampanyenya. Berbeda dengan baliho sebelumnya, baliho yang digunakan Airin dalam rangka kampanye sebagai calon Anggota DPR RI berisi slogan “Berkarya Nyata” dan didominasi dengan warna kuning. Hal ini menyimbolkan Airin yang diusung oleh Partai Golkar sebagai calon Anggota DPR RI Dapil Banten III nomor urut satu.

Gambar 2. Salah Satu Baliho Airin pada Masa Kampanye Resmi Pemilu 2024

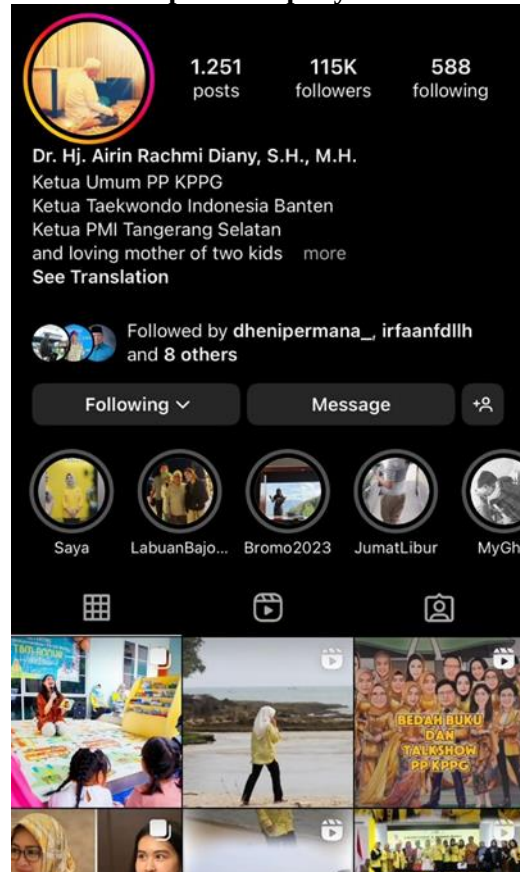
Sumber: ([Day](https://day.com), 2023)

Tidak hanya menggunakan cara kampanye konvensional, Airin juga menggunakan kampanye digital sebagai upaya untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Airin memiliki akun baik dikelola yang oleh pribadi maupun tim kampanye di berbagai sosial media guna mendukung proses kampanye, seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Dalam media sosial Youtube dan TikTok, konten yang ditampilkan berkenaan dengan seputar kegiatan kampanye Airin yang dilakukan secara konvensional, seperti blusukan, kampanye terbuka, tabligh akbar, dan lain-lain. Sedangkan pada akun Instagram dan Facebook, konten

yang ditampilkan tidak hanya mengenai kegiatan kampanye, namun juga kegiatan pribadi Airin beserta dengan keluarganya.

Dalam berbagai kanal YouTube yang membahas seputar kampanye yang dilakukan oleh Airin, memperlihatkan bagaimana Airin turut dalam menyampaikan visi dan misi Partai Golkar mengenai kesejahteraan dan pembangunan. Dalam kanal YouTube yang bernama Airin Pedia, Airin kerap mengusung tema pendidikan, kebudayaan, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat. Khusus pada tema pembangunan dan pendidikan, seringkali Airin menggunakan percontohan keberhasilannya di Kota Tangerang Selatan. Hal ini karena selama Airin memimpin selama dua periode sebagai Walikota Tangerang Selatan, sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur (Prihana, 2021).

Gambar 3. Aktivitas Sehari-hari maupun Kampanye dalam Akun Instagram Pribadi Airin



Sumber: Instagram Airin Rachmy Diany

Dalam akun Instagram pribadi Airin, Airin sering menampilkan berbagai macam kegiatan, baik kampanye, kegiatan partai, maupun keluarga. Airin sering menampilkan sosok anaknya, yaitu Ratu Ghefira M. Wardhana dalam akun Instagram miliknya. Berdasarkan hasil wawancara, sosok Ghefira dianggap sebagai sosok anak muda yang dekat dengan masyarakat kelas menengah kebawah, sehingga Airin sering menampilkan Ghefira, baik dalam kegiatan kampanye secara konvensional maupun di media sosial.

Cara kampanye yang dilakukan Airin dengan menggunakan media sosial, dapat dianggap sebagai bentuk adaptasi dengan budaya masyarakat masa kini. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial. Berdasarkan data dari Datareportal per Januari 2023, 167 juta masyarakat Indonesia atau setara dengan 60.4% dari total populasi Indonesia menggunakan media sosial (Kemp, 2024).

Harga (Price)

Harga dalam konteks pemasaran politik tidak selalu berbicara tentang kekuatan ekonomi, melainkan dapat berupa psikologis hingga citra nasional. Jika berbicara mengenai kekuatan ekonomi, Airin disokong oleh Partai Golkar yang memiliki kekuatan logistik yang cukup kuat. Laporan dana kampanye partai di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Laporan Awal Dana Kampanye Partai di Provinsi Banten dari Terbesar hingga Terkecil

No	Partai	Laporan Awal Dana Kampanye	
		Penerimaan	Pengeluaran
1.	PKS	Rp.5.778.400.000	Rp.5.463.880.000
2.	NasDem	Rp.5.744.860.626	Rp.5.744.372.626
3.	Golkar	Rp.4.194.341.596	Rp.4.184.442.174
4.	Gerindra	Rp.2.446.204.838	Rp.2.380.704.846
5.	PDI Perjuangan	Rp.2.185.017.073	Rp.2.167.469.745
6.	PAN	Rp.1.984.825.000	Rp.1.984.825.000
7.	Demokrat	Rp.1.818.600.000	Rp.1.818.600.000
8.	PKB	Rp.1.269.188.082	Rp.1.268.718.000
9.	Gelora	Rp.647.757.400	Rp.647.757.400
10.	PPP	Rp.490.435.500	Rp.471.755.500
11.	Ummat	Rp.354.952.810	Rp.334.487.310
12.	PSI	Rp.343.809.900	Rp.334.759.900
13.	PBB	Rp.204.865.500	Rp.204.865.500
14.	Hanura	Rp.192.120.000	Rp.191.120.000
15.	Buruh	Rp.191.032.515	Rp.184.782.400
16.	Perindo	Rp.131.915.000	Rp.131.915.000
17.	PKN	Rp.107.293.000	Rp.71.293.000
18.	Garuda	Rp.54.690.000	Rp.54.690.000

Sumber: (Antara Banten, 2024)

Dari sajian tabel diatas, dapat dilihat bahwa Partai Golkar memiliki penerimaan dan pengeluaran dana kampanye terbesar ketiga di Provinsi Banten pada pemilu 2024. Dana kampanye tersebut biasanya digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan kampanye, seperti pertemuan terbatas, penyiaran media massa, alat peraga kampanye, pendanaan saksi, dan lain sebagainya. Selain didorong oleh logistik yang dimiliki Partai Golkar, Airin juga didukung oleh logistik secara pribadi. Berdasarkan laporan LHKPN 2018, Airin memiliki harta kekayaan sebanyak Rp.24.460.195.943. Harta kekayaan ini tersebar di beberapa daerah di Indonesia seperti Bogor, Bandung, Sumedang, Serang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Tangerang dengan rincian harta bergerak sebanyak Rp.1.500.000.000, surat berharga sebanyak Rp.1.850.000.000 (TribunTangerang.com, 2024).

Menurut narasumber, Airin juga didukung oleh kekuatan dana APBD Kota Tangerang Selatan, yang mana Airin menggunakan program-program Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melakukan kampanye secara terselubung. Program-program tersebut, seperti sosialisasi ibu-ibu PKK, pengarahaan terhadap pegawai pemerintah kota, festival hari ulang tahun Kota Tangerang Selatan, dan program-program lainnya yang turun ke masyarakat maupun memiliki massa yang banyak. Selain itu, Airin juga didukung oleh keluarga Ratu Atut yang menduduki

jabatan-jabatan struktural di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang untuk melakukan kampanye.

Tidak hanya didukung oleh kekuatan ekonomi, Airin juga didukung oleh citra yang ada didalam dirinya. Citra positif Airin berhasil dibentuk berkat prestasi yang diperoleh selama masa jabatannya sebagai Walikota Tangerang Selatan sebagai kader Golkar. Selama dua periode, Airin berhasil meningkatkan pembangunan di Tangerang Selatan, termasuk Pendapatan Asli Daerah dan indeks Pendidikan serta kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu, Airin juga membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Tangerang Selatan (Prihana, 2021).

Di sisi lain, Airin juga ditunjuk sebagai ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar, yang mana ini membuat Partai Golkar mendukung penuh langkah dari Airin selama menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan sekaligus saat maju sebagai calon anggota legislatif yang berlaga di Pemilu 2024. Citra positif ini juga ikut dibentuk oleh Golkar, yang mana Partai Golkar berkontribusi sebagai tim sukses bagi Airin sejak pertama kali maju sebagai calon Walikota Tangerang Selatan dengan elektabilitas mencapai 41 persen (Zeliana, et al., 2021). Pemanfaatan citra positif dari Airin digunakan oleh Golkar untuk mendongkrak perolehan suara partai tersebut dalam meraih kursi anggota DPR. Hal ini dibuktikan dari pernyataan Bahrul Ulum selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten, yang mengatakan bahwa Airin ditugaskan oleh Partai Golkar sebagai bagian strategi partai tersebut untuk mendongkrak peningkatan suara partai dalam Pemilu 2024 (Detikcom, 2024). Oleh karena itu, dapat dilihat jika pencalonan Airin sebagai anggota legislatif merupakan bagian strategi dari Golkar untuk mendongkrak perolehan suara dan kursi partai di dalam badan legislatif.

Kemudian Airin juga memiliki kekuatan keluarga politik di belakangnya. Dimana Provinsi Banten dikenal sebagai daerah yang dikuasai oleh dinasti politik, yaitu Keluarga Ratu Atut. Menurut survei yang dilakukan *Indonesian Politics And Consulting* (IPRC), eksistensi keluarga Ratu Atut menjadi keluarga yang paling kuat di Banten saat ini. Hal ini terlihat dari dari survei mengenai kekeluargaan politik terkuat yang muncul di Provinsi Banten, dimana Keluarga Ratu Atut Chosiyah mendapatkan presentase 44.1% sebagai keluarga politik terkuat di Provinsi Banten, diikuti oleh Keluarga Jayabayaaya yang mendapatkan presentase sebanyak 12.7% , Keluarga Dimiyati Natakusuma sebesar 4.1% dan Keluarga Aat Syafaat sebesar 2.4% (Indonesian Politics Research And Consulting, 2023a).

Airin sendiri merupakan adik ipar dari Ratu Atut yang merupakan mantan Gubernur Banten pada tahun 2007 hingga 2015. Selain itu Airin memiliki keluarga yang pernah duduk di berbagai jabatan publik, yaitu: Hikmat Tomet (kakak ipar) yang merupakan anggota DPR RI (2019-2014) dan DPR RI (2014-2019), Andika Hazrumy (keponakan) yang merupakan anggota DPD RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2016) dan Wakil Gubernur Banten (2017-2022), Ade Rossi Khaerunisa (keponakan) menjadi anggota DPRD Kota Serang (2014-2019), Ratu Tatu Chasanah (kakak ipar) menjadi Wakil Bupati Serang (2010-2015) dan Bupati Serang (Petahana), Th. Khaerul Jaman (kakak ipar tiri) menjadi Wakil Walikota Serang (2008-2013), Ratna Komala Sari (mertua tiri) menjadi anggota DPRD Kota Serang (2009-2014), Heryani (mertua tiri) menjadi Wakil Bupati Serang (2011-2016), Andiara Aprilia Hikmat (keponakan) menjadi Anggota DPD RI (2019-2024), dan Teguh Istaal (adik ipar tiri) menjadi Anggota DPRD Provinsi Banten (2019-2024) (Sukri, 2020). Menariknya, hampir semua keluarga besar Airin berasal dari partai politik yang sama, yaitu Partai Golkar.

Melalui kombinasi kekuatan modal ekonomi yang dikeluarkan oleh Partai Golkar, citra positif yang sudah dibangun oleh Airin selama menjabat sebagai Walikota Tangerang Selatan, serta dukungan dari Partai Golkar dengan menerapkan strategi memproyeksikan Airin sebagai calon anggota legislatif menggunakan citra positif yang telah dibangun, mampu menunjang Airin dalam memenangkan pemilu 2024 dengan suara tertinggi di Dapil Banten III. Hal ini juga menjadi faktor yang menyebabkan Partai Golkar mengalami kenaikan suara dan penambahan kursi DPR RI pada pemilu 2024. Dari sini terlihat bahwa dalam mengikuti pemilu,

partai politik maupun kandidat dimungkinkan untuk mengeluarkan harga yang sangat tinggi agar dapat memenangkan kontestasi politik.

Tempat (Place)

Dalam mencapai kemenangan dalam pemilu, partai politik maupun kandidat harus mampu menentukan struktur dan karakteristik masyarakat. Selain itu penting bagi partai politik atau kandidat untuk melihat konsentrasi penduduk di suatu wilayah, penyebaran, dan kondisi fisiknya (Firmanzah, 2012). Untuk menentukan strategi pemenangan dan sasaran kampanya, diperlukan pemetaan mengenai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT yang ada di Dapil Banten III pada pemilu 2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah DPT Dapil Banten III pada Pemilu 2024

No.	Kota/Kabupaten	DPT		Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	DPT
1.	Kabupaten Tangerang	1.188.969	1.164.856	2.353.825
2.	Kota Tangerang Selatan	501.755	520.482	1.022.237
3.	Kota Tangerang	678.001	684.772	1.362.773
Jumlah Total DPT Dapil Banten III				4.738.835

Sumber: (Tristiawati, 2023)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah DPT terbanyak berada di Kabupaten Tangerang, sejumlah 2.353.825 pemilih. Selain itu jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, jumlah pemilih perempuan menjadi yang terbanyak dalam dapil Banten III, yaitu sebanyak 2.370.110 pemilih, sedangkan pemilih laki-laki berjumlah 2.368.725 pemilih. Jika mengacu pada data survei elektabilitas calon gubernur Banten pada pilgub 2024, nama Airin mendapat elektabilitas 29.1% dari kalangan pemilih perempuan (Indonesian Politics Research And Consulting, 2023b). Walaupun menang di kalangan pemilih perempuan, Airin juga mendapatkan elektabilitas tertinggi dari kalangan laki-laki, yaitu sebesar 26.2% (Indonesian Politics Research And Consulting, 2023b).

Kondisi tersebut didukung juga dengan bagaimana Partai Golkar mampu menjadi partai yang kuat di provinsi Banten. Sebagai bagian dari strategi Golkar dalam Pemilu 2024, partai tersebut memiliki strategi jangka Panjang dengan mendominasi provinsi Banten dalam berbagai tingkatan Pilkada. Tercatat, Golkar memiliki kekuatan yang mengakar di Banten. Hal ini yang membuat calon kepala daerah di seluruh wilayah Banten terafiliasi atau dicalonkan oleh Partai Golkar sehingga memperkuat basis partai di wilayah provinsi tersebut. Strategi ini didukung juga oleh upaya Golkar yang mengusung klan dinasti dari Keluarga Tatu, Keluarga Aat Syafaat, dan Zaki yang menjadi kepala daerah di berbagai wilayah di Banten (Permana, 2023). Kuatnya Partai Golkar di wilayah Banten menjadi modal bagi partai tersebut dalam meningkatkan suara dalam Pemilu 2024, salah satunya untuk meningkatkan perolehan kursi DPR melalui Airin.

Jika dipetakan berdasarkan daerah, Airin mendapatkan elektabilitas tertinggi di dua daerah dapil Banten III, yaitu Kota Tangerang sebesar 2.6% dan Kota Tangerang Selatan sebesar 58.1% (Indonesian Politics Research And Consulting, 2023b). Selain itu, Airin juga mendapatkan elektabilitas tertinggi dari kalangan dengan tingkat pendidikan, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, yang secara berturut-turut sebesar 24.7%, 29.4%, dan 38.4% (Indonesian Politics Research And Consulting, 2023b). Walaupun data ini bertujuan untuk memetakan peta politik pilgub Banten tahun 2024 yang akan datang, namun data ini cukup penting untuk digunakan sebagai pemetaan strategi yang akan digunakan Airin sebagai calon anggota DPR RI 2024. Hal ini juga dapat dijadikan alasan mengapa Airin maju sebagai anggota DPR RI dari

dapil Banten III, karena kekuatannya terpusat di Kota Tangerang Selatan dan sebagian Kota Tangerang.

Menurut narasumber, terdapat kesepakatan antara Partai Golkar dan Airin, yang mana jika Airin ingin maju menjadi Gubernur Banten, maka Airin harus maju terlebih dahulu menjadi dalam Pemilu 2024 sebagai calon legislatif. Hal ini kemudian yang membuat Airin maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Selain itu Dapil Banten III dipilih oleh Partai Golkar untuk memasukkan nama Airin dalam calon legislatif karena menurut Partai Golkar, sosok Airin paling diterima di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

SIMPULAN

Kemenangan Airin Rachmi Dianry dan Partai Golkar di Dapil Banten III tidak terlepas dari pemasaran politik yang telah dilakukan. Sangat tepat bagi Partai Golkar untuk memasang Airin sebagai calon anggota DPR RI dapil Banten III dengan nomor urut satu. Hal ini membuat Partai Golkar mengalami kenaikan kursi di DPR RI sebanyak dua kursi dan juga mendapatkan kenaikan suara di Dapil Banten III.

Berdasarkan Analisis pembauran pemasaran politik 4P, didapatkan bahwa Golkar dan Airin sukses dalam membangun citra dan karakteristiknya sebagai kandidat. Strategi Partai Golkar yang memperkuat basisnya di provinsi Banten menjadikan salah satu modal yang kuat bagi partai tersebut dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal ini didukung juga dengan prestasi Airin sebagai Walikota Tangerang Selatan yang diusung partai Golkar sehingga partai tersebut memiliki produk yang dapat ditawarkan kepada calon pemilihnya lewat prestasi dan perkembangan yang sudah dialami oleh daerah Tangerang Selatan. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa besarnya modal ekonomi yang dimiliki oleh Partai Golkar, didukung juga dengan upaya Golkar membentuk citra positif Airin dengan menempatkannya untuk berlaga dalam pemilu legislatif 2024, menjadi modal yang kuat bagi Golkar untuk meraih kursi di DPR RI Dapil Banten III. Airin juga tepat dalam memetakan tempat dalam mengikuti kontestasi. Basis suara Airin yang berada di Kota Tangerang Selatan membuat Airin mendapatkan suara terbanyak di dapil Banten III.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrika, W., & Ubaidullah. (2020). Kemenangan Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Di Aceh Tenggara: Studi Kasus Pengaruh Hasanuddin Broeh Terhadap Kemenangan Partai Golkar Di Pemilu Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5(1), 1–15. <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/13611>
- Antara Banten. (2024, Januari 15). KPU Banten Sebut Dana Kampanye PKS Paling Besar. *banten.antaranews.com*. <https://banten.antaranews.com/berita/271500/kpu-banten-sebut-dana-kampanye-pks-paling-besar>
- Bastian, A. F. (2022). *Strategi Marketing Mix Dalam Pemenangan Pilkada: Suatu Pendekatan Praktik Dan Akademik*. PT. Pustaka Obor Indonesia.
- Beritatangsel.com. (2022, Desember 3). Pengamat: Popularitas Airin Akan Meroket Efek Sosialisasi Massif. *beritatangsel.com*. <https://beritatangsel.com/2022/12/03/pengamat-popularitas-airin-akan-meroket-efek-sosialisasi-massif/>
- Butler, P., & Collins, N. (2001). Payment On Delivery: Recognising Constituency Service As Political Marketing. *European Journal of Marketing*, 35(9/10), 1026–1037. <https://doi.org/10.1108/eum000000005956>
- Cangara, H. (2004). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Kencana Prenada Media Group. http://lib.fisib.unpak.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2812&keywords=

- CNN Indonesia. (2024, Maret 18). Airin, Dasco hingga Rano Karno Lolos DPR RI Dapil Banten III. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240318182211-617-1075836/airin-dasco-hingga-rano-karno-lolos-dpr-ri-dapil-banten-iii>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Pustaka Pelajar. http://opac.fah.uinjkt.ac.id/index.php?p=show_detail&id=6016
- Day. (2023, Oktober 3). Bawaslu Kab. Tangerang Belum Tertibkan Baleho Caleg. *DetakBanten.com*. <https://www.detakbanten.com/today/bawaslu-kab-tangerang-belum-tertibkan-baleho-caleg>
- Detikcom. (2024, March 9). Airin Rachmi Jadi Caleg Dengan Suara Tertinggi Sementara di Internal Golkar. *Detiknews*. <https://news.detik.com/pemilu/d-7234215/airin-rachmi-jadi-caleg-dengan-suara-tertinggi-sementara-di-internal-golkar>
- Farisa, F. C. (2024, Maret 13). Airin Rachmi Amankan Kursi DPR, Suaranya Unggul Lampau Rano Karno hingga Sufmi Dasco. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/13/12074081/airin-rachmi-amankan-kursi-dpr-suaranya-unggul-lampaui-rano-karno-hingga>
- Firmanzah. (2012). *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas* (Revisi). Yayasan Pustak Obor Indonesia. http://digilib.fisip.undip.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2946
- Fransisko, R., Simatupang, H. D., Siallagan, A., & Mutawakkil, F. A. (2020). Strategi Komunikasi Politik Partai Golongan Karya Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2019-2024. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v4i1.20960>
- Golkar Institute. (2023a). *Membangun Untuk Semua*. <https://golkarinstitute.org/>
- Golkar Institute. (2023b, April 16). *Peneliti: Golkar Dirancang Jadi Jalan Tengah Kebuntuan Ideologi Partai*. *Golkarinstitute.org*. <https://golkarinstitute.org/peneliti-golkar-dirancang-jadi-jalan-tengah-kebuntuan-ideologi-partai/>
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1989). *Fourth Generation Evaluation*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412950558.n221>
- Indonesian Politics Research And Consulting. (2023a). *Persepsi Warga Banten Terhadap Kinerja Pemerintah Dan Politik Dinasti*. <https://iprc.co.id/2023/11/15/rilis-temuan-survei-persepsi-warga-banten-terhadap-kinerja-pemerintah-dan-politik-dinasti-periode-3-10-oktober-2023/>
- Indonesian Politics Research And Consulting. (2023b). *Peta Dukungan Warga Banten Jelang Pilgub dan Pilpres 2024*. <https://iprc.co.id/2023/10/13/rilis-temuan-survei-periode-20-30-september-2023-peta-dukungan-warga-banten-jelang-pilgub-dan-pilpres-2024/>
- Jamil, H., & Kurniawan, R. (2024). Strategi Politik Golkar Pasca Orde Baru: Studi Kasus Pemilihan Legislatif 2019 Di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 186–204. <https://doi.org/10.30738/sosio.v10i1.16046>

- Joharsoyo, Y. M. (2024, April 7). Raih Suara Pileg Terbanyak di Golkar, Airin Rachmi Siap Mundur Demi Maju Pilgub Banten. Retrieved from Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1854417/raih-suara-pileg-terbanyak-di-golkar-airin-rachmi-siap-mundur-demi-maju-pilgub-banten>
- Kemp, S. (2024). *Digital 2023: Indonesia*. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-indonesia>
- KumparanNews. (2023a, Januari 26). Baliho Bertebaran Di Seantero Kota Dan Tekad Airin Jadi Cagub Banten. *kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparannews/baliho-bertebaran-di-seantero-kota-dan-tekad-airin-jadi-cagub-banten-1ziAQ9AeUgM/4>
- KumparanNews. (2023b, Desember 4). Ditemani Airin, Gibran Dan Istri Bagi-Bagi Susu Saat Kampanye Di Tangerang. *kumparan.com*. <https://kumparan.com/kumparannews/ditemani-airin-gibran-dan-istri-bagi-bagi-susu-saat-kampanye-di-tangerang-21hdfEMfSLN/1>
- Litbang Kompas. (2024). *Partai Golkar: Perjalanan Panjang dan Tantangan dalam Meraih Dukungan Publik*. Retrieved from https://data.kompas.id/data-detail/kompas_statistic/6462411468b0d1e9c9bf0b06
- Ningrum, M. K. (2024, Maret 14). Mantan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany Raih Suara Terbanyak di Dapil Banten III, Ini Profilnya. Retrieved from Tempo: <https://nasional.tempo.co/read/1844718/mantan-wali-kota-tangsel-airin-rachmi-diany-raih-suara-terbanyak-di-dapil-banten-iii-ini-profilnya>
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Permana, Y. (2023, November 21). Punya Kekuatan yang Mengakar, Golkar Panaskan Mesin Pilkada Banten. Retrieved from Radar Banten: <https://www.radarbanten.co.id/2023/11/21/punya-kekuatan-yang-mengakar-golkar-panaskan-mesin-pilkada-banten/>
- Prihana, E. (2021). Dua Periode Kepemimpinan Walikota Tangerang Selatan: Airin Rachmi Diany. *Lensa*, 15(1), 1–14. <https://doi.org/10.58872/lensa.v15i1.2>
- Reeve, D. (2013). *Golkar: Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran Dan Dinamika* (Cet. 1). Komunitas Bambu.
- Rosana, F. C. (2024, Maret 17). Mengapa Perolehan Suara Partai Golkar Meroket di Pemilu 2024? Retrieved from Tempo: <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/171117/suara-golkar-pemilu-2024>
- Schroder, P. (2008). *Strategi Politik* (Revisi). Friedch-naumann-stiftung fur die Freiheit Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20318525&lokasi=lokal>
- Subroto, E. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sujoni. (2024, Maret 14). KPU Sahkan Caleg DPR Dapil Banten 3, Ada Nama Airin, Rano Karno, Hingga Wahidin Halim. *Sindonews.com*. <https://nasional.sindonews.com/read/1>

340371/12/kpu-sahkan-caleg-dpr-dapil-banten-3-ada-nama-airin-rano-karno-hingga-wahidin-halim-1710417807

- Sukri, Mhd. A. F. (2020). Dinasti Politik Di Banten: Familisme, Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(2), 169–190. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i2.8316>
- Tempo.co. (2024, April 7). Raih Suara Pileg Terbanyak Di Golkar, Airin Rachmi Siap Mundur Demi Maju Pilgub Banten. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1854417/raih-suara-pileg-terbanyak-di-golkar-airin-rachmi-siap-mundur-demi-maju-pilgub-banten>
- TribunTangerang.com. (2024, Maret 19). Masuk Daftar Caleg Suara Terbanyak, Ini Harta Kekayaan Airin Rachmi Yang Digadang Maju Pilgub Banten. *tangerang.tribunnews.com*. <https://tangerang.tribunnews.com/2024/03/19/masuk-daftar-caleg-suara-terbanyak-ini-harta-kekayaan-airin-rachmi-yang-digadang-maju-pilgub-banten>
- Tristiawati, P. (2023, Juni 23). DPT Pemilu 2024 Di 3 Daerah Tangerang Sudah Ditetapkan, Ini Jumlahnya. *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5327514/dpt-pemilu-2024-di-3-daerah-tangerang-sudah-ditetapkan-ini-jumlahnya?page=2>
- Zeliana, Y., Sulastri, E., Sumarno, & Andriyani, L. (2021). Strategi politik pemenangan petahanan pasangan HJ. Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie pada Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2015. *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.24853/independen.2.1.9-20>



Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador

Gunawan Lestari Elake^{1*}, Ferdiansyah Rivai¹, Retno Susilowati¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, 30128, Sumatera Selatan-Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Feb 28, 2024

Diterima: Jul 02, 2024

Dipublikasi: Jul 31, 2024

KATA KUNCI:

Food Sovereignty; La Via Campesina; Transnational Peasant Movement; 2008 Constitution of Ecuador.

KORESPONDEN:

Gunawan Lestari Elake
Universitas Sriwijaya.

Email:

gunawanlestarielake@fisip.unsri.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Elake, G. L., Ferdiansyah, R., & Susilowati, R. (2024). Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador. *Journal of Political Issues*. 6 (1); 87-98.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.198>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.198>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
(CC-BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This research aims to understand the struggle of peasant organizations affiliated with La Via Campesina in Ecuador to successfully incorporate the food sovereignty agenda into the 2008 Ecuadorian Constitution. The theoretical framework utilized is social movements, emphasizing the structural elements of mobilization to comprehend the emergence and development of a social movement in advancing their political agendas. This study employs a qualitative method, specifically a case study approach. Data collection involves a documentation study utilizing techniques for secondary data analysis. The findings of this research indicate that several factors contributed to this success, namely: (a) the role of LVC in promoting the concept of food sovereignty globally, which subsequently served as a point of reference for member organizations' efforts at the national level; (b) the organization's capability to mobilize resources and networks; and (c) active mobilization and direct participation in the constitutional drafting process, leveraging political opportunities during Rafael Correa's administration.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami perjuangan organisasi-organisasi petani anggota La Via Campesina di Ekuador sehingga berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Ekuador 2008. Kerangka teoritis yang digunakan adalah gerakan sosial dengan berfokus pada elemen struktur mobilisasi untuk memahami kemunculan dan perkembangan sebuah gerakan sosial dalam memperjuangkan agenda-agenda politiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dengan teknik analisis data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut ditopang oleh sejumlah faktor, yakni (a) peran LVC dalam mendesiminasi gagasan kedaulatan pangan di tingkat global, yang pada gilirannya menjadi point of reference bagi perjuangan organisasi anggota di tingkat nasional, (b) kapasitas organisasi dalam memobilisasi sumberdaya jaringan, dan (c) mobilisasi dan partisipasi langsung dalam proses legal drafting konstitusi dengan memanfaatkan terbukanya kesempatan politik di bawah pemerintahan Rafael Correa.

TENTANG PENULIS:

Gunawan Lestari Elake, adalah dosen pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Ia menyelesaikan gelar sarjananya pada tahun 2007 di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, ia menempuh program master Hubungan Internasional dan meraih gelar Master of Arts dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2017.

Ferdiansyah Rivai, adalah dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. ia menempuh program master Hubungan Internasional dan meraih gelar Master of Arts dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014.

Retno Susilowati, adalah dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Ia menyelesaikan studi Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya pada tahun 2013.

PENDAHULUAN

Sejumlah ilmuwan sosial telah lama memperkirakan pudar dan lenyapnya kaum tani sebagai akibat yang tak terelakan dari penetrasi kapitalisme pada sektor pertanian (Hobsbawm, 1996; Kautsky, 1988). Meskipun demikian, panorama politik global kontemporer menunjukkan kenyataan yang nampak berbeda, jauh dari lenyap kaum tani justru menunjukkan signifikansinya, mereka mengorganisir diri dan melampaui batas-batas lokalitasnya dengan membentuk jaringan dan aliansi gerakan petani di tingkat global sebagai respon terhadap tata ekonomi politik global neoliberal yang memarginalisasi kepentingan mereka (Dunford, 2016; Edelman & Borras, 2016). Bagi sebagian ilmuwan hubungan internasional fenomena ini dimengerti dengan istilah ‘globalisasi dari bawah’ sebagai perlawanan terhadap ‘globalisasi dari atas’ yang semata-mata bertumpu pada logika kapitalisme-neoliberal dan kepentingan korporasi global (Baylis et al., 2017). Margaret E. Kieck dan Kathryn Sikkink (Keck & Sikkink, 1999) menyebutnya sebagai jaringan advokasi transnasional, sementara Sidney Tarrow (2011) menggunakan istilah *Transnational Activism*, yakni proses transformasi aktor gerakan sosial lokal menjadi berkarakter lintas batas.

La Via Campesina (LVC) merupakan salah satu organisasi penting yang mewarnai dinamika gerakan petani di tingkat global. Organisasi ini merupakan sebuah koalisi global yang menyatukan jutaan petani kecil dan menengah, petani tanpa tanah, perempuan dan pemuda pedesaan, masyarakat adat, imigran dan pekerja pertanian. Berdiri pada tahun 1993 di Mons Belgia, organisasi ini menghimpun sekitar 182 organisasi lokal dan nasional di 81 negara dari Afrika, Asia, Eropa dan Amerika, yang kesemuanya mewakili sekitar 200 juta petani. Setidaknya terdapat tiga agenda penting yang diperjuangkan oleh gerakan ini, yakni (1) kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dan reforma agraria; (2) mempromosikan agro-ekologi dan mempertahankan benih lokal, dan; (3) mempromosikan hak-hak petani. Gerakan ini bersifat otonom, pluralis, multikulturalis serta menerapkan model kepemimpinan yang terdesentralisasi (Claeys, 2013; Rosset, 2013). Sekretariat internasional dirotasi sesuai dengan keputusan kolektif yang dibuat setiap empat tahun melalui Konferensi Internasional. Pertama kali berlokasi di Belgia (1993-1996), kemudian di Honduras (1997-2004), Indonesia (2005-2013), di Harare, Zimbabwe (2013 – 2021), dan sejak 2021 sekretariat berpindah ke Prancis (*La Via Campesina*, 2022; Rosset, 2013).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kedaulatan pangan merupakan salah satu agenda penting organisasi ini. Istilah ini merujuk pada pengertian bahwa orang-orang yang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi makanan harus memiliki kendali atas mekanisme dan kebijakan produksi dan distribusi makanan, ketimbang korporasi dan institusi pasar diyakini mendominasi sistem pangan global saat ini (Borras Jr et al., 2015). Secara umum, prinsip-prinsip kedaulatan pangan terdiri dari: (1) hak atas pangan untuk semua; (2) dukungan dan penghormatan terhadap kedaulatan produsen pangan; (3) sistem pangan lokal (menentang ketergantungan terhadap perusahaan agribisnis transnasional); (4) kontrol lokal terhadap sumberdaya alam dan lahan (menentang privatisasi dan eksploitasi, mendorong akses atas tanah); (5) pengembangan dan pertukaran pengetahuan lokal (menolak teknologi yang mengancam hal tersebut, seperti rekayasa genetika); dan (6) mempromosikan praktik agro-ekologi (Claeys, 2015).

Perjuangan global kedaulatan pangan pertama kali dilakukan *La Via Campesina* dimulai sejak World Food Summit (WFS) yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Dunia (FAO) di Roma, Italia tahun 1996. Sejumlah pencapaian penting dari kampanye ini adalah: adopsi konsepsi kedaulatan pangan oleh *International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development* (IAASTD) (Walsh-Dilley et al., 2016), keterlibatan LVC dalam tata kelola Komite Pangan Dunia (CFS) FAO yang berhasil memasukan agenda kedaulatan pangan ke dalam Panduan Tata Kelola yang Bertanggung Jawab atas Penguasaan Tanah, Perikanan dan Hutan dalam Konteks Ketahanan Pangan (VGGT) tahun 2012, dan kesepakatan

kerangka institusional kedaulatan pangan antara LVC dan FAO tahun 2013 (Elake et al., 2022). Selain itu, melalui perjuangan organisasi anggota di tingkat nasional, LVC relatif berhasil mendorong integrasi agenda kedaulatan pangan ke dalam konstitusi dan undang-undang nasional di sejumlah negara, yakni; Venezuela, Mali, Bolivia, Nepal, Senegal, dan Mesir (Claeys, 2013; European Cordination Via Campesina, 2018).

Berkaitan dengan pencapaian terakhir tersebut, salah satu yang paling monumental adalah keberhasilan LVC melalui organisasi anggotanya di Ekuador dalam mengintegrasikan konsep dan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Baru (undang-undang dasar) Ekuador 2008. Konstitusi baru ini merupakan hasil dari rangkaian panjang proses politik di Ekuador sepanjang tahun 2007-2008, yang melibatkan dua kali refererendum yakni referendum pembentukan Majelis Konstituante (*Constituent Assembly*) untuk menyusun draft konstitusi pada tahun 2007, dan referendum persetujuan konstitusi baru tersebut pada akhir 2008 (Martínez Dalmau, 2016). Dalam konstitusi baru ini terdapat sejumlah pasal dalam konstitusi secara jelas dan rinci mengamanatkan hak rakyat, kewajiban dan strategi negara mengenai kedaulatan pangan. Pada pasal 13 misalnya, dinyatakan bahwa “Setiap orang dan kelompok masyarakat memiliki hak atas akses yang aman dan permanen terhadap makanan yang sehat, cukup dan bergizi, lebih mengutamakan produksi lokal dan sesuai dengan beragam identitas dan tradisi budaya mereka. Negara Ekuador wajib mempromosikan kedaulatan pangan ” (*Constituion of The Republic of Ecuador, 2008*). Pasal ini sendiri berada dalam BAB II mengenai *Rights of the good way of living*. Selanjutnya, terdapat pasal tersendiri mengenai kedaulatan pangan, yakni pasal 281 yang menyatakan bahwa kedaulatan pangan sebagai “tujuan strategis dan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang, komunitas, masyarakat dan bangsa mencapai swasembada makanan yang sehat dan sesuai budaya, secara permanen ”

Keberhasilan integrasi agenda kedaulatan pangan ini tidak bisa dilepaspisahkan dari partisipasi aktif organisasi anggota *La Via Campesina* (LVC) di Ekuador baik sebelum referendum, penyusunan draft di Majelis Konstituante maupun mobilisasi yang dilakukan untuk mendukung referendum tersebut. Setidaknya terdapat empat organisasi anggota LVC yang memainkan peran kunci dalam proses politik ini, yakni: (1) *Federation of Peasant, Indigenous, and Black Organizations* (FENOCIN), (2) *National Federation of Agro-industrial Workers, Peasants, and Free Indigenes of Ecuador* (FENACLE), (3) *Eloy Alfaro National Peasant Confederation* (CNC), dan *Ecuadorean Indian Federation* (FEI) (Claeys, 2015; Endicott, 2020; Via Campesina, 2020). Sejumlah studi terdahulu telah menempatkan LVC sebagai aktor penting aktivisme gerakan petani di tingkat global dengan gagasan kedaulatan pangan sebagai isu sentral mereka. Studi Rosset (2018) misalnya menekankan evolusi perjuangan LVC dalam mendorong reformasi agrarian secara global selama 20 tahun belakangan berhadapan dengan dinamika baru finansiasiasi agribisnis dan industri ekstraktif, serta krisis kapitalisme. Sementara Claeys (2013) meyoroti artikulasi LVC mengenai wacana hak asasi manusia dalam perjuangannya menentang neoliberalisme di sektor pertanian. LVC dipandang berhasil mengkonstruksikan norma hak asasi manusia baru terkait hak masyarakat atas kedaulatan pangan dan hak petani. Konstruksi norma tersebut pada gilirannya ikut mendorong terciptanya norma baru di tingkat global dengan diakuinya hak-hak petani dan kedaulatan pangan dalam *UN Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas* pada tahun 2018 (Claeys & Edelman, 2020). Penelitian lain berfokus pada perspektif legal mengenai kedaulatan pangan yang tertuang dalam konstitusi Ekuador dan Bolivia (Sina, 2018), meskipun tidak secara khusus membahas dinamika dan proses politik yang memungkinkan integrasi gagasan kedaulatan pangan ke dalam konstitusi di dua negara tersebut. Dengan pengecualian studi Sina, berbagai literatur tersebut berhasil mengelaborasi signifikansi LVC dalam memajukan isu kedaulatan pangan di tingkat global, akan tetapi belum menggambarkan secara jelas bagaimana perjuangan agenda kedaulatan pangan organisasi-

organisasi anggota LVC di tingkat nasional. Padahal, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, terdapat sejumlah negara yang telah mengadopsi konsep kedaulatan pangan ke dalam konstitusi dan undang-undang nasional mereka. Oleh karena itu, peneliti berusaha memperkaya berbagai studi tersebut dengan menganalisis perjuangan organisasi-organisasi petani anggota *La Via Campesina* di Ekuador sehingga berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi (undang-undang dasar) Ekuador. Sebagai catatan, terdapat penelitian lain sebenarnya telah berusaha untuk menganalisis dinamika perjuangan di tingkat nasional dengan mengangkat pengalaman Indonesia (Elake et al., 2022). Tentu saja, studi kasus-nya berbeda dengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sementara jenis penelitian adalah studi kasus. Menurut (Creswell, 2014), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sementara menurut (Neuman, 2013) metode ini berusaha untuk memahami hakikat realitas sosial dan mengungkap bagaimana individu menyusun pemaknaan mereka atas satu hal.

Jenis penelitian studi kasus pada hakekatnya bertujuan untuk memahami konteks suatu peristiwa atau fenomena (Ellinger et al., 2005). Menurut Stake (1995) studi intensif menghasilkan deskripsi yang kaya tentang fenomena, peristiwa, organisasi, atau program. Studi kasus penelitian ini adalah keberhasilan *La Via Campesina* sebagai gerakan transnasional dalam memajukan agenda kedaulatan pangan di Ekuador. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yang dihimpun dari berbagai dokumen, literatur, artikel, dan berita yang relevan dengan penelitian. Menurut Bowen (2009), teknik pengumpulan data berbasis dokumen sebagai sumber utama bisa diterapkan dalam studi kasus. Bowen menjelaskan bahwa Segala jenis dokumen dapat membantu peneliti mengungkap makna, mengembangkan pemahaman, dan menemukan wawasan yang relevan dengan masalah penelitian. Oleh karena objek penelitian ini adalah organisasi petani di Ekuador yang sulit dijangkau oleh peneliti di Indonesia maka teknik studi dokumentasi ini memenuhi sejumlah kriteria Bowen untuk digunakan, yakni: efisien, ketersediaan, efektivitas biaya, dan keluasan cakupan. Kendati demikian, peneliti mengakui bahwa keterbatasan utama penelitian ini (berdasarkan kriteria Bowen) adalah kedalaman detail. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan Pangan di Ekuador: Aktor dan Mobilisasi

Pendasaran teoritis penelitian ini adalah gerakan sosial dengan berfokus pada elemen mobilisasi sumberdaya jaringan. Menurut Sidney Tarrow (2011) gerakan sosial merupakan bagian dari *contentious politics* (politik perseteruan), yang mengemuka ketika orang-orang biasa – seriangkali dalam sebuah aliansi dengan kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh berikut perubahan-perubahan dalam suasana batin masyarakat – bergabung dalam konfrontasi dengan elit, otoritas dan lawan. *Contentious politics* terjadi ketika perubahan-perubahan kesempatan politik (juga hambatan) menciptakan dorongan bagi aktor yang tidak memiliki sumberdaya untuk meluncurkan aksi kolektif. Lebih lanjut, salah satu elemen penting dalam memahami perkembangan gerakan sosial adalah struktur mobilisasi, yang mengacu pada kemampuan organisasi dalam memobilisasi jaringan dan sumberdaya.

Fungsi organisasi dalam struktur mobilisasi adalah menyediakan anggota, kepemimpinan, komunikasi dan jaringan sosial bagi pembangunan gerakan sosial. Beberapa contoh diantaranya adalah gereja, komunitas dan organisasi non-profit, kelompok mahasiswa dan kampus (sekolah) (Caren, 2007). Jaringan sosial tersebut merupakan sumberdaya bagi gerakan

untuk mempertahankan dan memperluas Gerakan (Foweraker, 1995). Sumberdaya tersebut mencakup sumberdaya material, kapasitas organisasi dan taktik yang memungkinkan terciptanya mobilisasi dukungan (Smith & Fetner, 2009). Semakin luas jaringan sosial yang tercipta sangat mempengaruhi tingkat mobilisasi dalam memperjuangkan agenda politik gerakan sosial. Dalam konteks tersebut, elaborasi akan difokuskan pada sejumlah organisasi anggota La Via Campesina di Ekuador, sumber daya jaringan (aliansi) yang terbentuk untuk memajukan agenda kedaulatan pangan serta keterlibatan mereka

Secara umum, terdapat tiga organisasi gerakan petani di Ekuador yang memainkan peran penting dalam memajukan agenda kedaulatan pangan sejak akhir 1990-an. Tentu saja, organisasi-organisasi ini merupakan organisasi anggota La Via Campesina di Ekuador. Pertama, FENOCIN (*Federation of Peasant, Indigenous, and Black Organizations*). Berdiri pada tahun 1968, FENOCIN merupakan federasi petani terbesar di Ekuador yang menyatukan berbagai kelompok sosial yang berbeda dalam kerangka perjuangan petani. Secara historis, organisasi ini mengalami sejumlah transformasi ideologis dan ruang lingkup organisasinya. Pada awalnya bernama FENOC (*Federation of Peasant*) yang merujuk pada kelas petani sebagai komposisi utamanya, kemudian berubah menjadi FENOC-I (*Federation of Peasant and Indigenous*) pada 1988 dengan memasukkan isu etnis dan keragaman budaya (interkulturalisme) ke dalam agenda perjuangan kelas petani, dan sejak tahun 1997 bernama FENOCIN untuk menjangkau partisipasi kelompok sosial Afro-Ekuador ke dalam organisasi (Edelman, 2017; FENOCIN, 2021). Pergeseran terakhir ini merupakan terobosan penting dalam konteks isu identitas dan keterwakilan orang kulit hitam, yang secara historis menempati kedudukan paling rendah dalam stratifikasi sosial di Ekuador (Walsh, 2009). Federasi ini menghimpun sekitar 1300 organisasi anggota dan 2200 komunitas lokal yang mencakup lebih dari 500 ribu keluarga, dan memiliki perwakilan pada 20 provinsi di Ekuador. Federasi ini berhasil membangun aliansi yang stabil dan bertahan lama antara masyarakat adat-petani di dataran tinggi, petani pesisir, keturunan Afro dan, dalam derajat tertentu, kelompok indigenous di Amazon.

Organisasi kedua adalah CNC (*Eloy Alfaro National Peasant Confederation*). Berdiri pada tahun 1992, organisasi ini aktif mempromosikan aliansi petani dan masyarakat adat. Agenda politik utamanya adalah akses terhadap tanah, faktor produksi dan pasar yang adil bagi petani serta pembangunan pedesaan yang mencakup adanya jaminan sosial, akses atas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan. Organisasi ini terlibat aktif dalam mobilisasi-mobilisasi menentang kebijakan neo-liberal di Ekuador sepanjang tahun 1990-an (Edelman, 2017; Peña, 2016). Bersama-sama CONAIE (*Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador*), salah satu organisasi adat penting di Ekuador, CNC berkontribusi penting terhadap berdirinya Partai Pachakutik pada tahun 1995, sebuah partai politik dengan visi memajukan kepentingan masyarakat adat (*indigenous*) di Ekuador (Edelman, 2017). Terakhir adalah FENACLE (*National Federation of Agro-industrial Workers, Peasants, and Free Indigenous of Ecuador*). Organisasi ini didirikan pada tahun 1969 dan berbasis pada sektor pedesaan. Aktif mempromosikan redistribusi tanah melalui agenda reforma agraria, dan fokus mengadvokasi hak-hak pekerja di pedesaan dan kepentingan petani tanpa tanah (FENACLE, n.d.).

Afiliasi ketiga organisasi tersebut dengan La Via Campesina menjadikan agenda kedaulatan pangan sebagai agenda utama perjuangan mereka di tingkat nasional. Secara spesifik, FENOCIN merupakan salah satu perwakilan organisasi tani yang ikut terlibat dalam pendirian La Via Campesina di Mons, Belgia pada tahun 1994. FENOCIN juga terlibat dalam Konferensi Internasional La Via Campesina Kedua di Tlaxcala Meksiko (1996), yang menghasilkan salah satu kesepakatan penting yakni, agenda kampanye global kedaulatan pangan sebagai alternatif terhadap wacana dominan rezim pangan global saat itu: keamanan pangan (La Via Campesina, 2007). Ketiga organisasi ini juga terhubung jaringan gerakan petani di tingkat kawasan Amerika Latin yakni CLOC (*Latin American Coordination of Rural*

Organizations). Konteks kemunculan CLOC adalah rangkaian protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai gerakan petani dan masyarakat adat di kawasan tersebut melalui agenda *Continental Campaign 500 Years of Indigenous Resistance, Black and Popular* antara tahun 1989 dan 1992 sebagai respon terhadap peringatan 500 tahun kedatangan Spanyol di kawasan Amerika Latin. Secara umum, CLOC sendiri memiliki dua peran, yakni: (a) menghubungkan berbagai organisasi gerakan pedesaan di kawasan tersebut, dan (b) sebagai sarana dialog dan partisipasi berbagai organisasi tersebut yang terhubung dengan La Via Campesina (Desmarais et al., 2014; Edelman, 2017).

Selain kampanye dan mobilisasi dalam memajukan agenda kedaulatan pangan, organisasi-organisasi petani tersebut juga mengembangkan berbagai praktik pertanian berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan pangan, dan mendesiminasikan praktik-praktik tersebut melalui apa yang disebut dialog pengetahuan (*dialogo de seberes*). Dengan cara ini, berbagai organisasi tersebut berkontribusi dalam menyebarluaskan praktik-praktik pertanian berbasis kedaulatan pangan seperti: pertanian agro-ekologis, diversifikasi sistem pertanian, pertanian organik, sistem tumpang-sari dan agroforestri di Ekuador. Organisasi-organisasi tersebut juga aktif mempromosikan tata kelola pertanian alternatif berbasis *agrobiodiversity* dan bank benih, sistem pertanian terpadu (kombinasi tanaman dan hewan ternak dalam satu kegiatan usaha pertanian), serta substitusi dan pengurangan bahan kimia pertanian (Edelman, 2017; Peña, 2016). Tujuan utama dari praktik-praktik ini adalah mengurangi ketergantungan petani terhadap input eksternal, peningkatan otonomi petani, penguatan solidaritas dan kerjasama sosial, dan menjaga kelestarian alam. Organisasi-organisasi tersebut juga secara konsisten menyelenggarakan pelatihan kepada petani terkait beragam isu. Isu produksi agro-ekologi (dijalankan oleh FENOCIN), pendidikan formal masyarakat pedesaan (CNC), dan pelatihan kepemimpinan politik (FENOCIN, CNC dan FENACLE) (Edelman, 2017; Henderson, 2017).

Politisasi kedaulatan pangan oleh organisasi-organisasi tani tersebut tidak bisa dilepaspisahkan dari mobilisasi gerakan petani (demonstrasi dan protes) yang mengemuka sepanjang tahun 1980-an sampai 1990-an. Mobilisasi tersebut menentang kebijakan neoliberal yang dianggap menjadi penyebab bagi marjinalisasi petani dan masyarakat adat serta kerusakan lingkungan pada umumnya. Meskipun secara sosio-kultural sangat beragam dengan agrobiodiversitas yang kaya, pembangunan pertanian di Ekuador mengadopsi ‘resep umum’ modernisasi pertanian berbasis Revolusi Hijau dan monokultur di bawah anjuran rezim internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (Clark, 2016). Tentu saja, pada awalnya Ekuador diuntungkan oleh modernisasi pertaniannya. Namun pada perkembangannya, berbagai masalah sosial, ekonomi dan lingkungan muncul. Erosi tanah dalam skala besar, hilangnya sumber daya genetik lokal, penurunan keanekaragaman hayati pertanian, masalah hama dan kesehatan masyarakat akibat penggunaan pestisida, serta sistem finansial dan mekanisme pasar yang merugikan petani kecil (Arce et al., 2015). Dampak lainnya adalah, hilangnya akses petani dan masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam (Goodwin, 2017). Secara umum, kebijakan neoliberal di sektor pangan dan pertanian di Ekuador mengakibatkan penurunan drastis dukungan pemerintah terhadap petani, privatisasi tanah dan berfokus pada teknologi padat modal.

Salah satu implikasi penting dari pengalaman mobilisasi tersebut adalah terbentuknya aliansi di tingkat nasional yang menghubungkan berbagai organisasi petani tersebut di atas, yakni *coordinadora Nacional Agraria* (CNA) pada awal tahun 1990-an. Pada perkembangannya CNA kemudian berubah nama menjadi Mesa Agraria (MA). Mesa Agraria menjadi front persatuan perjuangan dan sarana kelembagaan penting bagi gerakan sosial pedesaan tersebut untuk mengartikulasikan tuntutan-tuntutan serta memajukan proposal kebijakan alternatif kepada negara (Edelman, 2017). Meskipun pada kenyataannya, organisasi-organisasi petani di Ekuador memiliki perbedaan orientasi, visi dan strategi bahkan terkadang bertentangan, melalui aliansi ini mereka memiliki kapasitas untuk menyatukan tujuan-tujuan

bersama. Agenda kedaulatan pangan nampaknya merupakan isu utama yang mampu menyatukan organisasi-organisasi ini.

Antara tahun 2001-2006, aliansi ini terlibat aktif dalam berbagai demonstrasi dan kampanye nasional menentang Kesepakatan Perdagangan Bebas (FTAA) antara Ekuador dan Amerika Serikat (Jameson, 2011). Kondisi ini makin memperkuat soliditas aliansi dan memungkinkan terbukanya debat dan dialog internal antara organisasi-organisasi anggota untuk agenda bersama. Hasilnya adalah terbitnya *Agrarian Agenda*, sebuah dokumen yang mempromosikan kedaulatan pangan, program perjuangan dan pentingnya akses terhadap faktor-faktor produksi. Menjelang pemilu 2006, Mesa Agraria menginisiasi dialog dengan sejumlah calon dan mengajukan proposal terkait agenda agraria nasional. Puncaknya adalah keputusan Mesa Agraria untuk mendukung Rafael Correa dalam pemilu presiden. Keputusan ini didasarkan pada janji dan komitmen Correa – jika terpilih – untuk mendukung ‘Revolusi Agraria’ yang mencakup tiga elemen penting, yakni: redistribusi tanah, mencegah privatisasi air dan mendorong akses petani terhadap sumber daya strategis (Clark, 2016; Edelman, 2017; Henderson, 2017).

Dalam derajat tertentu, dukungan terhadap Correa dipengaruhi oleh visi politiknya yang mengemuka selama kampanye presiden. Correa memosisikan dirinya sebagai anti-tesis dari elit (dan partai) politik mapan dan korup, penentangannya terhadap imperialisme Amerika Serikat dan agenda neo-liberalisme di Ekuador, peningkatan belanja sosial terutama bagi masyarakat miskin melalui reformasi industri minyak dan restrukturisasi utang (Mazzolini, 2021). Salah satu komitmen penting selama masa kampanye tersebut adalah janjinya untuk melaksanakan referendum nasional pembentukan majelis kontituante (*constituent assembly*) yang berfungsi untuk menulis ulang konstitusi baru Ekuador. Dengan dukungan populer yang kuat (termasuk yang datang dari organisasi-organisasi petani), Rafael Correa akhirnya memenangkan pemilihan presiden di akhir tahun 2006, dan menjadi presiden ke-45 Ekuador (BBC, 2007).

Institusionalisasi Agenda Kedaulatan Pangan ke dalam Konstitusi Baru Ekuador

Kemenangan Rafael Correa membuka kesempatan politik yang lebih luas bagi gerakan petani untuk memajukan agenda reforma agraria, termasuk kedaulatan pangan. Sepanjang tahun 2007, mayoritas organisasi petani di Ekuador terlibat aktif mendukung kampanye referendum pembentukan majelis konstituante. Hasilnya, sekitar 87 persen pemilih menyatakan setuju dalam referendum yang diselenggarakan pada April 2007. Selanjutnya, pada September 2007 pemilihan delegasi majelis kontituante diselenggarakan. PAIS (*Proud and Sovereign Homeland*) Alliance, partai yang didirikan Correa ketika bertarung dalam pemilu presiden, menang telak dalam pemilihan tersebut (berhasil mendapatkan 80 kursi dari 130 kursi di majelis konstituante) (Romero, 2007). Menariknya, pemimpin FENOCIN (Pedro De La Cruz) dan FENACLE (Guillermo Tourma) merupakan dua tokoh yang juga terpilih sebagai delegasi dalam proses tersebut. Keterlibatan langsung representasi organisasi petani inilah yang nanti memainkan peran penting institusionalisasi kedaulatan pangan dalam Konstitusi Ekuador 2008 (Peña, 2016).

Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi petani (yang juga tergabung dalam Mesa Agraria) untuk bekerjasama dengan anggota Majelis Konstituante dalam mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan ke dalam konstitusi baru. Sejumlah komite dibentuk untuk memberikan masukan kepada anggota majelis konstituante. FENOCIN berpartisipasi dalam Komite Kebijakan Publik dan Komite Agraria (bersama-sama FENCALE), sementara CNC terlibat aktif dalam komite kedaulatan pangan. Komite-komite ini memiliki pengaruh penting dalam *final drafting* ketentuan kedaulatan pangan. Sebagai contoh, Komite Agraria menyusun laporan setebal 64 halaman dengan lima rekomendasi utama untuk konstitusi baru. Rekomendasi tersebut adalah (1) menjamin kedaulatan pangan, (2)

mendorong reformasi agraria, (3) mengembangkan model pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan, (4) menjamin hak petani, dan (5) terus mempertahankan kedaulatan bangsa yang berbasis interkulturalisme. Pedro de la Cruz (representasi FENOCIN di Majelis Konstituante) memainkan peran penting dalam memajukan rekomendasi tersebut ke dalam konstitusi (Clark, 2016; Peña, 2016).

Sementara itu, disaat bersamaan, organisasi-organisasi tersebut mengadakan dialog partisipatif dan deliberatif melalui sejumlah forum di tingkat regional dan lokal yang bertujuan untuk menyusun proposal bersama yang nanti diajukan dalam proses politik di Majelis Konstituante. Sejumlah dialog tersebut menghasilkan ‘ide-ide utama’ yang seharusnya mengemuka dalam konstitusi baru, seperti isu kedaulatan dan keamanan pangan, pembangunan pedesaan dan kesetaraan hak-hak pekerja. Organisasi seperti FENOCIN misalnya mengajukan proposal yang berjudul ‘FENOCIN: *For a National Agrarian Plan and Interculturality*’ dengan penekanan tentang pentingnya ‘jaminan kedaulatan pangan di dalam konstitusi’. Proposal ini sepenuhnya berbasis pada konsep kedaulatan pangan oleh La Via Campesina yang mencakup ‘produksi pertanian nasional, mengembangkan sistem agro-ekologi dan menghindari ketergantungan terhadap produk impor, mendorong dan melindungi petani, produsen kecil dan menengah serta komunitas melalui akses terhadap tanah, air dan kebutuhan dasar lainnya untuk produksi pangan yang sehat, layak, cukup dan memadai’ (Flores et al., 2018). Selain itu, FENOCIN mendukung orientasi produksi pertanian yang berfokus pada pemenuhan pasar domestik, pentingnya pengetahuan tradisional sebagai basis pengembangan agroekologi, dan penguatan perencanaan pedesaan yang partisipatoris (Intriago et al., 2017).

Diluar proses politik yang berkembang pada Majelis Konstituante, berbagai *event* diselenggarakan oleh jaringan organisasi petani untuk menggalang opini publik sekaligus memberi ‘tekanan dari luar’ kepada anggota-anggota majelis. Acara-acara tersebut adalah kampanye, diskusi dan festival makanan dan benih yang diselenggarakan di sekitar gedung pertemuan. Salah satu acara yang monumental adalah ‘Festival Kedaulatan Pangan’ (7 Mei 2008), dimana jaringan organisasi petani (Mesa Agraria) memamerkan makanan dan benih, menyebarkan pamflet, dan menawarkan berbagai macam variasi makanan yang ada di negara tersebut kepada anggota Majelis Konstituante, wartawan dan masyarakat. Sekitar 500 orang berpartisipasi dalam acara ini, dan menjadi momen penting dalam perjuangan gerakan petani untuk kedaulatan pangan di Ekuador (Edelman, 2017).

Berbagai mobilisasi jaringan organisasi petani sepanjang proses penulisan konstitusi baik ‘dari dalam’ (melalui perwakilan mereka di Majelis Konstituante) maupun ‘dari luar’ (diskusi, dialog, lobi, kampanye, proposal kedaulatan pangan, dan festival-festival) pada akhirnya berhasil mengintegrasikan agenda kedaulatan pangan pada Konstitusi Baru Ekuador. Setelah melalui mekanisme referendum konstitusi di akhir September 2008 (68 persen pemilih setuju dengan draft konstitusi), konstitusi baru ini akhirnya berlaku secara efektif, dan secara umum mengadopsi isu kedaulatan pangan yang diadvokasi oleh jaringan gerakan petani di Ekuador. Sejumlah pasal dalam konstitusi ini memuat secara lugas mengenai kedaulatan pangan termasuk kewajiban negara dan pemerintah. Sebagai contoh, pasal 281 yang menyatakan bahwa kedaulatan pangan sebagai “tujuan strategis dan kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang, komunitas, masyarakat dan bangsa mencapai swasembada makanan yang sehat dan sesuai budaya, secara permanen ” (Constitution of The Republic of Ecuador, 2008). Pasal ini juga merinci strategi dan tanggung jawab negara ke dalam beberapa ayat, diantaranya adalah (Constitution of The Republic of Ecuador, 2008):

1. Mendorong swasembada pangan yang lebih besar;
2. Mengadopsi kebijakan fiskal, pajak dan tarif yang melindungi sektor pertanian dan perikanan nasional guna mencegah ketergantungan pada impor pangan;
3. Mendukung diversifikasi dan pemanfaatan teknologi ekologi dan organik dalam produksi pertanian dan peternakan;

Gunawan Lestari Elake, Ferdiansyah R, Retno Susilowati.

Keberhasilan La Via Campesina sebagai Gerakan Petani Transnasional dalam
Memajukan Agenda Kedaulatan Pangan di Ekuador

4. Mempromosikan kebijakan redistribusi yang memungkinkan petani kecil memiliki akses ke tanah, air, dan sumber daya produksi lainnya.
5. Menetapkan mekanisme preferensial untuk pembiayaan produsen kecil dan menengah, memfasilitasi mereka untuk memperoleh alat produksi.
6. Mempromosikan agro-ekologis dan penggunaan benih secara gratis;
7. Larangan praktek monopoli dan spekulatif seputar pangan;
8. Ekonomi yang adil dan hubungan langsung antara produsen dan konsumen.

Dengan demikian, perjuangan La Via Campesina melalui organisasi anggotanya di Ekuador dapat dikatakan berhasil. Ini adalah pencapaian terbesar institusionalisasi agenda kedaulatan pangan di tingkat nasional, sekaligus menjadi pengalaman bagi gerakan sosial pada umumnya bahwa kapasitas organisasi memanfaatkan ruang-ruang politik yang tersedia menjadi syarat mutlak keberhasilan suatu gerakan memajukan agenda-agenda politiknya.

SIMPULAN

Keberhasilan perjuangan organisasi-organisasi petani anggota La Via Campesina (LVC) di Ekuador dalam mengintegrasikan isu kedaulatan pangan ke dalam Konstitusi Ekuador 2008 merefleksikan beberapa hal penting. *Pertama*, peran LVC sebagai aktor petani di tingkat global sangat elementer disini, yakni mendesiminasi gagasan dan konsep kedaulatan pangan di tingkat global, sekaligus menyatukan isu dan tuntutan bersama yang menjadi *point of reference* bagi perjuangan di tingkat lokal. *Kedua*, kapasitas organisasi di tingkat lokal merupakan kunci untuk mematerialisasi agenda-agenda global tersebut. Dalam kasus Ekuador diatas, kapasitas organisasi petani nasional dalam memobilisasi jaringan sumberdaya melalui pendidikan dan pelatihan, aliansi, diskusi publik, dan pemajuan proposal terkait kedaulatan pangan menjadi faktor penting yang mendeterminasi keberhasilan tersebut. *Ketiga*, perjuangan dengan memanfaatkan ruang-ruang politik kekuasaan adalah hal penting disini. Mobilisasi dan partisipasi langsung dalam *legal drafting* proses penulisan konstitusi melalui representasi gerakan petani di Majelis Konstituante terbukti berhasil mengawal agenda-agenda konstitusi. Dukungan dan mobilisasi terhadap Rafael Correa semenjak proses pemilihan presiden sampai referendum konstitusi justru menciptakan kesempatan politik yang luas dan sumberdaya yang besar bagi gerakan sosial. Dalam pengertian ini, pelajaran penting dari kasus ini adalah, gerakan sosial tidak hanya berhenti sebagai aktor 'di luar' kekuasaan yang hanya menjadi 'watch dog' tetapi juga mampu mengeksplisitkan agenda-agenda-nya dari 'dalam'.

DAFTAR PUSTAKA

- Arce, A., Sherwood, S., & Paredes, M. (2015). Repositioning food sovereignty: Between Ecuadorian nationalist and cosmopolitan politics. *In Food Sovereignty in International Context* (pp. 135–152). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315764429-17>
- Baylis, J., Owens, P., & Smith, S. (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford University Press. <https://philpapers.org/rec/BAYTG O-7>
- BBC. (2007). *Ecuador swears in new president*. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/6262555.stm>
- Borras Jr, S. M., Franco, J. C., & Suárez, S. M. (2015). Land and food sovereignty. *Third World Quarterly*, 36(3), 600–617. <https://doi.org/10.1080/01436597.2015.1029225>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Caren, N. (2007). Political process theory. *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. <https://doi.org/10.1002/9781405165518>
- Claeys, P. (2013). From Food Sovereignty to Peasants' Rights: An overview of La Via Campesina's Rights-based claims over the last 20 years. *Food Sovereignty: A Critical Dialogue*. https://dial.uclouvain.be/downloader/downloader.php?pid=boreal:137348&dastream=PDF_01
- Claeys, P. (2015). *Human rights and the food sovereignty movement: Reclaiming control*. Routledge. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BB17930857>
- Claeys, P., & Edelman, M. (2020). The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas. *The Journal of Peasant Studies*, 47(1), 1–68. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1672665>
- Clark, P. (2016). Can the State Foster Food Sovereignty? Insights from the Case of Ecuador. *Journal of Agrarian Change*, 16(2), 183–205. <https://doi.org/10.1111/joac.12094>
- Constituion of The Republic of Ecuador. (2008). *Constituion of The Republic of Ecuador*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Desmarais, A. A., Rivera-Ferre, M. G., & Gasco, B. (2014). Building alliances for food sovereignty: La Vía Campesina, NGOs, and social movements. In *Alternative agrifood movements: Patterns of convergence and divergence*. Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/s1057-192220140000021009>
- Dunford, R. (2016). *The Politics of Transnational Peasant Struggle: Resistance, Rights and Democracy*. Rowman & Littlefield. <https://eprints.brighton.ac.uk/15729/>
- Edelman, M. (2017). *Critical Perspectives on Food Sovereignty: Global Agrarian Transformations*, Volume 2. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315689562>
- Edelman, M., & Borras, S. M. (2016). *Political Dynamics of Transnational Agrarian Movements*. Practical Action Publishing, Fernwood Publishing. <https://doi.org/10.3362/9781780449142>
- Elake, G. L., Susilowati, R., & Ferdiansyah, R. (2022). Aktivisme Petani Transnasional: Perjuangan La Via Campesina dan Serikat Petani Indonesia untuk Kedaulatan Pangan. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 925–938. <https://doi.org/10.33578/mbi.v17i5.219>
- Ellinger, A. D., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2005). *Case study research methods. Research in organizations: Foundations and methods of inquiry*. Berrett-Koehler Publishers.
- Endicott, S. (2020, December 17). 17 South American Groups Striving for Food and Land Rights. *Food Tank*. <https://foodtank.com/news/2020/12/movements-in-south-america-fighting-for-food-and-land-sovereignty/>
- European Cordination Via Campesina. (2018). *Food Sovereignty NOW! A Guide to Food Sovereignty*. European Cordination Via Campesina.

- FENACLE. (n.d.). *FENACLE – FENACLE*. Retrieved August 20, 2021, from <http://www.fenacle-ecuador.org/fenacle/>
- FENOCIN. (2021). *Causa Nuestra | FENOCIN*. <https://www.fenocin.org/informacion-institucional/quienes-somos/>
- Flores, A. M., Ruivenkamp, G., & Jongerden, J. (2018). Drafting a law, dissolving a proposal: Food sovereignty and the state in Ecuador. *Agrarian South: Journal of Political Economy*, 7(3), 351–380. <https://doi.org/10.1177/2277976018800590>
- Foweraker, J. (1995). *Theorizing Social Movements*. Pluto Press. [https://doi.org/10.1016/0261-3050\(96\)89762-2](https://doi.org/10.1016/0261-3050(96)89762-2)
- Goodwin, G. (2017). The quest to bring land under social and political control: Land reform struggles of the past and present in Ecuador. *Journal of Agrarian Change*, 17(3), 571–593. <https://doi.org/10.1111/joac.12181>
- Henderson, T. P. (2017). State–peasant movement relations and the politics of food sovereignty in Mexico and Ecuador. *The Journal of Peasant Studies*, 44(1), 33–55. <https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1236024>
- Hobsbawm, E. J. (1996). *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991*. Vintage Books. <https://doi.org/10.2307/20047214>
- Intriago, R., Gortaire Amézcu, R., Bravo, E., & O’Connell, C. (2017). Agroecology in Ecuador: Historical processes, achievements, and challenges. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 41(3–4), 311–328. <https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1284174>
- Jameson, K. P. (2011). The Indigenous Movement in Ecuador: The Struggle for a Plurinational State. *Latin American Perspectives*, 38(1), 63–73. <https://doi.org/10.1177/0094582x10384210>
- Kautsky, K. (1988). *The Agrarian Question*. Zwan Publications. <https://doi.org/10.1080/03066159008438422>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). Transnational advocacy networks in international and regional politics. *International Social Science Journal*, 51(159), 89–101. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00179>
- La Via Campesina. (2007, September 20). *II International Conference Of The Via Campesina Tlaxcala, Mexico, April 18-21: Via Campesina*. Via Campesina English. <https://viacampesina.org/en/ii-international-conference-of-the-via-campesina-tlaxcala-mexico-april-18-21/>
- La Via Campesina. (2022). *About La Via Campesina: Via Campesina*. La Via Campesina - EN. <https://viacampesina.org/en/international-peasants-voice/>
- Martínez Dalmau, R. (2016). Democratic constitutionalism and constitutional innovation in Ecuador: The 2008 Constitution. *Latin American Perspectives*, 43(1), 158–174. <https://doi.org/10.1177/0094582X15571277>

- Mazzolini, S. (2021). Rafael Correa and the Citizen's Revolution in Ecuador. *Populism in Global Perspective: A Performative and Discursive Approach*.
- Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Peña, K. (2016). Social movements, the state, and the making of food sovereignty in Ecuador. *Latin American Perspectives*, 43(1), 221–237. <https://doi.org/10.1177/0094582x15571278>
- Romero, S. (2007, February 14). Ecuador: Congress Approves Referendum on Constitutional Assembly. *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2007/02/14/world/americas/14briefs-ecuadorassembly.html>
- Rosset, P. (2013). Re-thinking agrarian reform, land and territory in La Via Campesina. *The Journal of Peasant Studies*, 40(4), 721–775. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.826654>
- Rosset, P. (2018). Evolution of the struggle for land and territory in La Via Campesina International. In *Reframing Latin American Development* (pp. 164–182). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315170084-9/evolution-struggle-land-territory-la-via-campesina-international-peter-rosset>
- Sina, A. (2018). The Constitutional Protection of the Right to Food in Bolivia and Ecuador. In A. Isoni, M. Troisi, & M. Pierri (Eds.), *Food Diversity Between Rights, Duties and Autonomies: Legal Perspectives for a Scientific, Cultural and Social Debate on the Right to Food and Agroecology* (pp. 265–275). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-75196-2_16
- Smith, J., & Fetner, T. (2009). Structural Approaches in the Sociology of Social Movements. In B. Klandermans & C. Roggeband (Eds.), *Handbook of Social Movements Across Disciplines*. Springer Science & Business Media. https://doi.org/10.1007/978-0-387-70960-4_2
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. SAGE. <https://doi.org/10.2307/329758>
- Tarrow, S. (2011). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (3 edition). Cambridge University Press.
- Via Campesina. (2020). *Via Campesina*. Via Campesina English. <https://viacampesina.org/en/who-are-we/regions/south-america/>
- Walsh-Dilley, M., Wolford, W., & McCarthy, J. (2016). Rights for resilience: Food sovereignty, power, and resilience in development practice. *Ecology and Society*, 21(1) <https://doi.org/10.5751/es-07981-210111>



JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Bangka Belitung

Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan
Bangka Belitung, 33172

Email: jpi@ubb.ac.id | **E-ISSN:** 2685-776